

**KEPEMIMPINAN INKLUSIF KEPALA SEKOLAH DASAR
DI KOTA YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan



Oleh :
Larasati Azizah
NIM. 16101241045

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2020

KEPEMIMPINAN INKLUSIF KEPALA SEKOLAH DASAR DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh:

Larasati Azizah
NIM 16101241045

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi pandangan sekolah terhadap pendidikan inklusif dan praktik yang dilakukan dalam kepemimpinan inklusif kepala sekolah dasar di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian enam kepala sekolah dasar negeri inklusif di Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Uji keabsahan data menggunakan *member check*. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu *grounded theory*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif beragam macamnya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: 1) Pendidikan; 2) Pelatihan; dan 3) Pelaksanaan Kebijakan. Kepala sekolah melakukan beberapa praktik kepemimpinan dalam memfasilitasi pendidikan inklusif, meliputi: (a) Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif, (b) Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi, (c) Melakukan audit ekuitas, (d) Mendesain ulang organisasi sekolah, (e) Kepemimpinan guru, (f) Membangun tim pengajaran, (g) Membangun kapasitas staf, (h) Dukungan emosional dan apresiasi, (i) Menggunakan data dalam pengambilan keputusan, dan (j) Memastikan hak suara bagi semua.

Kata Kunci : Kepemimpinan Inklusif, Kepala Sekolah dan Sekolah Inklusif.

INCLUSIVE LEADERSHIP OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPAL AT YOGYAKARTA

By:

Larasati Azizah
ID 16101241045

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and explore principal's views on inclusive education and the practices carried out in the leadership in the principal's inclusive leadership at inclusive education.

This research is a qualitative research with the research subjects of six principals who lead inclusive school in the city of Yogyakarta. Data collection techniques used in-depth interviews and document study. Test the validity of the data used the member check. Then the data analysis technique in this research used qualitative data analysis, that is grounded theory.

The results of this research indicate that the principal's view of inclusive education has various kind and influenced by various factors, which is: 1) Education, 2) Training and 3) Implementation of policies. Principals carry out several leadership practices in leading inclusive education, including: (a) Establishing a clear and clear vision of inclusion, (b) Engaging in collaborative planning and implementation, (c) Conducting equity audits, (d) Redesigning school organizations, (e) Teacher leadership, (f) Building teaching teams, (g) Building staff capacity, (h) Emotional support and appreciation, (i) Using data in decision making, and (j) Ensuring voting rights for all.

Keywords: *Inclusive Leadership, Principal and Inclusive School.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larasati Azizah

NIM : 16101241045

Program Studi : Manajemen Pendidikan

Judul TAS : Kepemimpinan Inklusif Kepala Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 27 September 2020
Yang menyatakan,



Larasati Azizah
NIM. 16101241045

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

KEPEMIMPINAN INKLUSIF KEPALA SEKOLAH DASAR DI KOTA YOGYAKARTA

Disusun Oleh

Larasati Azizah

NIM 16101241045

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan
Ujian Tugas Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dwi Esti Andriani, M.Pd., M.Ed., St., Ed.D.
NIP. 19770510 200112 2 005

Yogyakarta, 27 September 2020
Disetujui,
Dosen Pembimbing

Dwi Esti Andriani, M.Pd., M.Ed., St., Ed.D.
NIP. 19770510 200112 2 005

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

**KEPEMIMPINAN INKLUSIF KEPALA SEKOLAH DASAR
DI KOTA YOGYAKARTA**

Disusun oleh:

Larasati Azizah
NIM 16101241045

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2020

Yogyakarta, 19 Oktober 2020
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sujarwo, M.Pd.

NIP. 19691030 200312 1 001

HALAMAN MOTTO

*“ No matter how inclusive we are working towards being, we can always do more.
We can always do better”*

(Victoria N. McGovern)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan penyelesaian tugas akhir ini sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Suranto dan Ibu Katimah selaku orang tua dari peneliti yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama menimba ilmu.
2. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Agama, Nusa, dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Inklusif Kepala Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta”. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan izin, dukungan, bimbingan, dan motivasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Esti Andriani, M.Pd., M.Ed.,St.,Ed.D. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah memberikan arahan, semangat, dan motivasi selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini;
2. Ibu Pujaningsih, S.Pd., M.Pd., Ed, D. selaku Penguji Utama, dan Ibu Rahmania Utari, M.Pd. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran perbaikan terhadap Tugas Akhir Skripsi ini;
3. Ibu Dwi Esti Andriani, M.Pd., M.Ed.,St.,Ed.D. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyetujui dan memberikan dukungan kepada dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi;
4. Bapak Dr. Sujarwo, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian;
5. Bapak/Ibu narasumber penelitian yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti dalam melakukan penelitian;

6. Orang tua tercinta Bapak Suranto dan Ibu Katimah serta adik saya yang senantiasa selalu mendoakan, memotivasi, memberikan semangat dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita.
7. Teman-teman seperjuangan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi khususnya Stella Maraszona, Lela Reni Nur Aini, Laily Nurjannah, Eva Yuliyanti, dan Wayangan, serta teman-teman Jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2016.
8. Semua pihak yang telah memberikan ketersediaan untuk membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Peneliti,



Larasati Azizah
NIM. 16101241045

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Fokus Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan.....	6
F. Manfaat.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.....	7
1. Kajian tentang Pendidikan inklusif di Indonesia.....	7
a. Kebijakan Pendidikan inklusif di Indonesia.....	7
b. Konsep Pendidikan inklusif.....	11
c. Kurikulum dalam Pendidikan inklusif.....	14
d. Pembelajaran dalam Pendidikan inklusif.....	17
2. Kajian tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah.....	19
a. Konsep Kepemimpinan.....	19
b. Kepemimpinan Kepala Sekolah.....	20
3. Kajian Tentang Kepemimpinan Inklusif.....	24
a. Kepemimpinan inklusif.....	24
b. Kepemimpinan Inklusif di Sekolah.....	25
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	32
C. Kerangka Pikir.....	34
D. Pertanyaan Penelitian.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	48
1. Pandangan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Indonesia.....	48
2. Praktik Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pendidikan Inklusif.....	54
B. Pembahasan.....	83
1. Pandangan Kepala Sekolah terhadap Pendidikan Inklusif.....	83
2. Praktik Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.....	86
C. Keterbatasan Penelitian.....	114

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....	119
----------------------------	------------

LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	125
---------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	37
Tabel 2. Pedoman Pertanyaan Penelitian Berdasarkan Pertanyaan Penelitian...	43
Tabel 3. Pengembangan Pedoman Wawancara.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	126
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “P”.....	127
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “PS”.....	139
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “SL”.....	147
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “BR 2”.....	159
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “DA”.....	165
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “K”.....	179
Lampiran 8. Penyajian Data Hasil Peneltian dengan <i>Member Check 1</i>	186
Lampiran 9. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan <i>Member Check 2</i>	190
Lampiran 10. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan <i>Member Check 3</i>	194
Lampiran 11. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan <i>Member Check 4</i>	198
Lampiran 12. Penyajian Data Hasil Penelitian <i>Member Check 5</i>	203
Lampiran 13. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan <i>Member Check 6</i>	208
Lampiran 14. SK Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Yogyakarta...	213
Lampiran 15. Kurikulum untuk anak-anak normal.....	214
Lampiran 16. Kurikulum untuk ABK.....	215
Lampiran 17. Surat Izin Penelitian.....	216

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyediakan pendidikan bagi semua, tanpa diskriminasi, dan memenuhi kebutuhan semua siswa baik itu siswa normal maupun siswa yang berkebutuhan. Kebijakan mengenai pendidikan inklusif telah disepakati dalam skala internasional yang tercantum dalam *Declaration of Human Rights* (1948) dan *Rights of The Child* (1989) serta persetujuan internasional yang dilakukan seperti *Education for All* (1991) di Bangkok dan *Salamanca Statement* (1994) tentang pendidikan khusus (Budiyanto, 2017: vii). Indonesia melaksanakan pendidikan inklusif melalui kebijakan-kebijakan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif, seperti Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas.

Negara-negara termasuk Indonesia mengupayakan sekolah ramah difabel agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat berbaur dan bergaul dengan teman sebayanya yang normal. Sekolah yang mampu mengupayakan hal tersebut disebut sekolah inklusif. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dimana memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu salah satu faktor penting dalam mewujudkan organisasi sekolah yang berhasil adalah kepemimpinan sekolah.

Kepala sekolah merupakan komponen yang paling penting dalam peningkatan layanan pendidikan. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah (Syarifuddin, 2008 dalam Taufan & Mazhud, 2016: 63). Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan. Dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, kepala sekolah juga dituntut untuk memiliki lima kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Menurut Villa & Thousand dalam Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 20) dikemukakan bahwa:

perubahan sistemik menuju pendidikan inklusif membutuhkan pemimpin yang visioner dan bersemangat yang mau membangun konsesus dalam tujuannya menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk semua pelajar. Terdapat banyak faktor yang berkontribusi dan berkepentingan untuk sekolah inklusif terhadap siswa normal, siswa disabilitas, staf, guru, orangtua, dan komunitas. Bagaimanapun, pemimpin yang pada akhirnya berusaha menjadi inklusif dan lebih inklusif dari retorika inklusif ke realita untuk merangkul seluruh baik siswa normal maupun siswa dengan disabilitas sebagai anggota pembelajar pendidikan umum di komunitas sosial.

Merujuk pada pendapat di atas, maka kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus memiliki visi dan semangat yang besar dan mau berkolaborasi dalam mencapai tujuan pendidikan inklusif yaitu menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua. Dalam pendidikan inklusif, faktor internal dan eksternal

sangat berpengaruh pada penyelenggaraannya sehingga semua faktor tersebut perlu dirangkul untuk dapat bersama-sama menjadi komunitas yang inklusif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019, tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dikutip dalam laman web pendidikan.jogjakota.go.id bahwa tahun 2012 Kota Yogyakarta diberikan penghargaan atas kepeduliannya terhadap pendidikan inklusif di Indonesia yaitu *Inclusive Education Award* yang diserahkan oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Denpasar, Bali. Kota Yogyakarta diakui oleh pemerintah pusat karena memiliki komitmen yang tinggi mengenai pendidikan yang ramah disabilitas, tanpa adanya diskriminasi dan menjunjung tinggi etika multi kultural (Nunuk, 2012: 1).

Penelitian mengenai kebijakan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta telah ada yaitu penelitian evaluasi yang dilakukan oleh Hanjarwati & Aminah pada tahun 2014 yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan inklusif” mengungkapkan bahwa program pendidikan inklusif di Yogyakarta berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan perbaikan pada aspek manajemen implementasi agar output dan outcome yang dihasilkan semakin baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Penelitian lainnya yaitu tentang kinerja kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di

Indonesia oleh Munawir Yusuf yang berjudul “Kinerja Kepala Sekolah dan Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusif “ pada tahun 2012. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari enam aspek implementasi pendidikan inklusif yang diukur, rata-rata kinerja kepala sekolah mencapai 65,5% atau berada pada kategori sedang, dengan capaian kinerja tertinggi pada aspek kelembagaan (77,5%) dan capaian kinerja terendah ada pada aspek sarana prasarana (50%). Skor rata-rata capaian tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar (35%) cakupan pekerjaan yang berhubungan dengan program inklusi yang belum dapat dijalankan dengan baik. Kinerja kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, untuk semua aspek/dimensi berdasarkan analisis deskriptif kategorik, rerata empirik berada dalam kategori sedang. Pendidikan inklusif telah berjalan namun belum maksimal.

Hasil penelitian tersebut di atas khususnya pada aspek kinerja kepala sekolah yang belum maksimal mendorong perlunya peneliti untuk menggali kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusif. Fokus penelitiannya yaitu pada pandangan kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif dan praktek-praktek kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu seluruh sekolah negeri di Yogyakarta adalah sekolah inklusif, namun penelitian Hanjarwati & Aminah (2014) mengemukakan bahwa masih terdapat masalah-masalah dalam implementasi kebijakan tersebut.
2. Kurang maksimalnya input dan outcome dari sekolah inklusif dikarenakan masalah manajemen implementasi.
3. Kinerja kepala sekolah berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian Munawir Yusuf (2012) menunjukkan skor capaian rata-rata (65,45%) menunjukkan masih ada sekitar (35%) cakupan pekerjaan yang berhubungan dengan program inklusi yang belum dapat dijalankan dengan baik.
4. Kinerja kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang tidak maksimal berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya.

C. Fokus Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh pandangan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri Kota Yogyakarta. Pandangan kepala sekolah tersebut akan mengarah pada kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya. Selain itu, kepemimpinan kepala sekolah tersebut akan membantu peneliti melihat pandangan dan usaha kepala sekolah dalam menciptakan dan menjaga sekolah di jalur inklusif.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi masalah yang ditemui, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kepala sekolah dasar tentang pendidikan inklusif?
2. Bagaimana praktik kepemimpinan kepala sekolah dasar dalam mewujudkan pendidikan inklusif?

E. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah memperoleh pemahaman tentang:

1. Pandangan kepala sekolah dasar tentang pendidikan inklusif.
2. Praktik kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

F. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian akan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca, serta memperkaya teori pendidikan inklusif terkhususnya teori tentang kepemimpinan inklusif kepala sekolah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan dalam praktik kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian tentang Pendidikan inklusif di Indonesia

a. Kebijakan Pendidikan inklusif di Indonesia

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia dilandasi oleh kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan sebagai dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Kebijakan pendidikan inklusif dilandasi dengan landasan fisiologi, landasan yuridis, landasan pedagogis dan landasan empiris (Pratiwi et al, 2018: 23-24) sebagai berikut:

1) Landasan fisiologis

Pancasila sebagai dasar negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menjadi dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Pancasila digambarkan sebagai sebagai wujud kebhinekaan, kecacatan bukan berarti keterbasan melainkan dianggap sebagai keberagaman. Pancasila memberikan landasan bahwa pendidikan harus adil dan merata bagi seluruh warga Indonesia termasuk penyandang disabilitas.

2) Landasan yuridis

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan landasan yuridis dimulai dengan lahirnya Pernyataan Salamanca oleh para menteri pendidikan se-dunia termasuk Indonesia pada tahun 1994. Selanjutnya, Indonesia berpartisipasi dengan meratifikasi Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan PBB pada tahun 2006.

3) Landasan pedagogis

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yaitu tujuan pendidikan nasional. Secara pedagogis, penempatan anak penyandang disabilitas dalam kondisi terpisah berarti menempatkan mereka pada isolasi sehingga pengembangan potensi anak tidak dapat dilakukan secara maksimal.

4) Landasan empiris

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *National Academy of Sciences* USA bahwa setting pendidikan bagi anak penyandang disabilitas secara terpisah tidak efektif dan terkesan diskriminatif. Pendidikan inklusif berdampak baik bagi anak penyandang disabilitas dan anak normal.

Linimasa perkembangan inklusif di Indonesia tidak dapat lepas dari perkembangan inklusif di dunia internasional. Dimulai tahun 1945 bahwa negara telah menjamin pendidikan bagi setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas yang diamankan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 5 ayat 2. Selanjutnya, muncul Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 yang menjamin hak pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik dan mental dalam bentuk lahirnya Sekolah Luar Biasa (SLB) (Hafiz, 2017: 10). Tepatnya, pada tahun 1978, HKI (Hellen Keller Indonesia) konsep pendidikan terpadu bagi penyandang disabilitas yang menjadi cikal bakal pendidikan inklusif di Indonesia dengan mendampingi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia mendirikan sekolah terpadu bagi penyandang tuna netra. Selanjutnya, dikeluarkanlah SK Mendikbud Nomor 002/U/1989 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat yang mengatur bahwa anak disabilitas memiliki kemampuan yang setara dengan anak normal sehingga dapat mengikuti pendidikan reguler. Namun, program ini tidak berjalan lama sehingga pada tahun 90-an inisiasi pendidikan inklusif muncul melalui kerjasama Depdiknas dengan Norwegia (Rahardja, 2010 dalam Pratiwi ddk, 2018: 22). Jaminan pendidikan tersebut menguat semenjak adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 nomor 4 tentang Pendidikan Luar Biasa yang didefinisikan sebagai pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik dengan kelainan fisik dan/atau mental, kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Pratiwi et al, 2018: 19).

Keseriusan pemerintah terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut

(1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pada tanggal 8-14 Agustus 2004 di Bandung terjadi “Deklarasi Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” sebagai cikal bakal bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk berbicara, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan sebagaimana tercatum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Tahun 2006 terjadi Konvensi

hak-hak Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh PBB dan diikuti oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Menindaklanjuti resolusi tersebut Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas (Hafiz, 2017: 11).

Pemerintah makin serius dalam menjamin pendidikan inklusif dengan dikeluarkannya Permendiknas RI – No. 70 Tahun 2009 tentang “Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa”. Dirjen Dikdasmen Depdiknas mengeluarkan surat edaran No. 380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 yang tertulis: ”setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK” (Hafiz, 2017: 11). hal tersebut menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mempromosikan pendidikan inklusif hingga di tingkat daerah. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin diperkuat haknya dan diberi jaminan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang dijelaskan pada pasal 40 ayat (2) yaitu hak mendapatkan pendidikan di semua jenjang dalam bentuk pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus (Pratiwi et al, 2018: 26).

b. Konsep Pendidikan inklusif

Kata inklusif berasal dari Bahasa Inggris “*inclusion*” yang berarti “penyertaan”. Inklusif memiliki definisi penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah (Smith, 2009: 45). Pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler (Hanjarwati & Aminah, 2014: 232). Artinya, sekolah reguler dapat menerima anak-anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminatif. Sementara itu, Allen dan Cowdery (2000) dalam Handayani & Rahadian (2013: 31) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Artinya, anak-anak berkebutuhan khusus menghabiskan sebagian waktu mereka dengan anak-anak normal untuk mengembangkan potensi masing-masing. Kemudian, Stainback (1990) dalam Budiyanto (2017: 16) memberikan batasan lebih spesifik pada *setting* persekolahan yaitu sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Artinya, sekolah menyediakan program pendidikan yang layak dan mengakomodir kemampuan dan kebutuhan semua murid serta para guru memberikan bantuan kepada semua murid.

Pendidikan inklusif di Indonesia telah diatur kebijakannya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009 tentang “Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa”. Definisi pendidikan inklusif pada Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 diatur dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa:

yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Petikan definisi pendidikan inklusif dari Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 memiliki maksud bahwa sekolah bertanggung jawab dan menghormati hak anak penyandang disabilitas dengan memfasilitasi dan mengusahakan pemenuhan pendidikan mereka, sesuai dengan kebijakan yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat (3) poin (f) yang mana poinnya berbunyi “perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menuntut semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak normal dan harus belajar di kelas yang sama dengan teman-teman sebayanya. Melalui pendidikan inklusif maka dapat mengakomodasi semua anak baik anak normal maupun anak yang berkebutuhan dalam pengembangan potensi, bakat, dan keterampilan yang dimiliki setiap anak secara optimal.

Pendidikan inklusif telah memutus diskriminasi yang terjadi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Adapun tujuan pendidikan inklusif dalam Budiyanto (2017: 91) dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum pendidikan inklusif memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada

semua anak, khususnya anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus. Tujuan secara khusus pendidikan inklusif adalah: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan; (2) meningkatkan perolehan hasil belajar bagi semua peserta didik; (3) meningkatkan pemberdayaan nilai-nilai budaya lokal dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, dan (4) meningkatkan peran tiga komponen (orangtua, masyarakat, dan pemerintah) dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan, menurut Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah:

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pendidikan inklusif dijalankan dengan landasan prinsip. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011: 10) mengemukakan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa meliputi:

- 1) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu

Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan

yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua siswa dan menghargai perbedaan.

2) Prinsip keberagaman

Adanya perbedaan individu dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan siswa, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu siswa.

3) Prinsip kebermaknaan

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian siswa.

4) Prinsip keberlanjutan

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

5) Prinsip keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

c. Kurikulum dalam Pendidikan Inklusif

Albertycs (1965) dalam Lismina (2018: 15) mendefinisikan kurikulum sebagai “*all of the activities that are provided for students by the school*”. Jabar, et al (2016: 47) mengemukakan bahwa kurikulum adalah segala kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang dituangkan dalam bentuk rencana yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah rencana yang berisikan hal-hal apa saja yang akan dilakukan sekolah, ditunjukkan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, untuk pendidikan inklusif di sekolah perlu ada penyesuaian lebih lanjut. Hal tersebut mengingat bahwa sekolah inklusif memfasilitasi semua anak-anak normal serta anak-anak berkebutuhan khusus sehingga kebutuhan sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusif berbeda dengan sekolah biasa. Penyesuaian kurikulum dalam pendidikan inklusif perlu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus.

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2017: 18). Namun, dengan melihat kondisi sekolah inklusif yang berbeda dengan sekolah umum, maka kurikulum reguler dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat diterima di sekolah inklusif. Kurikulum dimodifikasi oleh tim pengembang kurikulum yang terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Terdapat tiga model pengembangan kurikulum di sekolah inklusif (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2017: 19). Adapun model-model pengembangan kurikulum tersebut meliputi:

1) Model kurikulum reguler

Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya. Artinya, anak-anak berkebutuhan khusus menjalani kurikulum reguler sesuai anak normal, namun anak berkebutuhan khusus tetap akan diberikan layanan khusus melalui pendampingan belajar dan menumbuhkan motivasi belajar.

2) Model kurikulum reguler dengan modifikasi

Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Artinya, model ini diterapkan kepada siswa berkebutuhan khusus yang mampu mengikuti tuntutan kurikulum reguler namun juga harus mengikuti kurikulum PPI.

3) Model kurikulum PPI

Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendamping khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Artinya, kurikulum ini ditunjukkan untuk anak berkebutuhan khusus yang mempunyai hambatan sehingga tidak mungkin mengikuti pembelajaran di sekolah dengan sistem kurikulum reguler.

d. Pembelajaran dalam Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif mempunyai tantangan yang lebih daripada pembelajaran di sekolah umum. Proses pembelajaran di pendidikan inklusif dilakukan oleh guru di mana setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pembelajaran pada sekolah inklusif tetap mengacu pada kurikulum reguler yang sama dengan tingkatan kelasnya, namun dibutuhkan strategi khusus yang dilakukan oleh guru untuk mengajar sesuai dengan kurikulum reguler yang berlaku.

Budyanto (2005: 157) dalam Fitria (2012: 92-93) mengemukakan bahwa terdapat lima profil pembelajaran di kelas inklusif. Adapun profil pembelajaran di kelas inklusif adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan inklusif menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan;
- 2) Pendidikan inklusif berarti penerapan kurikulum yang multi level dan multi modalitas;
- 3) Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif;
- 4) Pendidikan inklusif berarti menyediakan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi;
- 5) Pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.

Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusif dimulai dengan perencanaan yang dilakukan oleh guru umum bersama guru khusus. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 23) kegiatan perencanaan pembelajaran pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan pengelolaan kelas;
- 2) Merencanakan pengorganisasian bahan;
- 3) Merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar;
- 4) Merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar;
- 5) Merencanakan penggunaan sumber dan media belajar;
- 6) Merencanakan penilaian.

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007: 23-24) juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan apersepsi;
- 2) Menyajikan materi atau bahan;
- 3) Menyiapkan metode, sumber atau bahan belajar, dan bahan latihan sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran;
- 4) Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif;

- 5) Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan;
- 6) Membina hubungan antar pribadi, antara lain: (a) Bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa; (b) Menampilkan kegairahan dan kesungguhan; (c) Mengelola interaksi antar pribadi.

2. Kajian tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah

a. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan memiliki banyak definisi menurut para ahli berdasarkan pribadi mereka dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi para pakar yang bersangkutan (Wahyosumidjo, 2008: 16). Kepemimpinan menurut Indrafachrudi et al (1983: 23) dalam Basri & Tatang, (2015: 12) adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang untuk menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan, menurut Mayjend.(Purn) Soedarsono dalam Suparman (2019: 11) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang terlebih ditentukan menggunakan atau menggerakkan orang lain agar bekerja dengan cara terbaik dan mudah sesuai dengan fungsi merencanakan, mengorganisasi dengan sistem pengawasan, pengendalian secara efektif dan efisien. Dikutip dalam Wahyosumidjo (2008: 17), dari definisi yang berbeda-beda tersebut mengandung kesamaan asumsi yang bersifat umum, seperti:

- 1) Di dalam suatu fenomena kelompok melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih;
- 2) Di dalam melibatkan proses mempengaruhi, di mana pengaruh yang disengaja (*intentional influence*) digunakan oleh pemimpin terhadap para bawahan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah:

- 1) Melibatkan orang lain;
- 2) Adanya situasi kelompok atau organisasi sebagai tempat berinteraksi;
- 3) Terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan yang dilakukan oleh pemimpin, dan;
- 4) Terdapat tujuan yang harus dicapai.

b. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah berperan penting dalam menggerakkan kehidupan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut meliputi (Luddin, 2010: 88):

- 1) Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah.
- 2) Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa.

Kata ‘kepala’ dapat diartikan sebagai ‘ketua’ atau ‘pemimpin’ dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang, ‘sekolah’ adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan dalam Wahyosumidjo (2008: 83) sebagai:

“seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran kepada murid yang menerima pelajaran”

Terutama pada jenjang Sekolah Dasar, kepala sekolah merupakan guru yang diberi tambahan tugas sebagai kepala sekolah.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru yang diberi tambahan tugas. Hak tersebut juga telah diatur secara legal dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Pada pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa:

kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa tugas kepala sekolah adalah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Dengan adanya peraturan ini, maka secara legal kepala sekolah telah menjadi perhatian serius pemerintah.

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan upaya kepala sekolah mempengaruhi atau menggerakkan staf, guru, siswa, orang tua siswa, komunitas dan stakeholders sekolah menuju pencapaian tujuan atau visi sekolah (Andriani, 2011: 54). Kepemimpinan adalah satu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci untuk menjadi seorang manajer yang efektif. Esensi kepemimpinan adalah kepengikutan (*followership*), kemauan orang lain atau bawahan untuk mengikuti pemimpin itulah yang menyebabkan seseorang menjadi pemimpin, dengan kata lain pemimpin tidak akan terbentuk apabila tidak ada bawahan (Wahyosumidjo, 2008: 104).

Menurut Wahyosumidjo (2008: 105) berlandaskan pada pendapat Koontz, bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu:

- 1) Mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri pada guru, staf, dan siswa melaksanakan tugas masing-masing;
- 2) Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf, dan para siswa memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan.

Keberhasilan organisasi, institusi, maupun lembaga ditentukan oleh pemimpin organisasi, institusi, maupun lembaga tersebut, sehingga keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Beberapa diantara kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan para siswa, kepala sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tugas mereka dan

mereka yang menentukan irama bagi sekolah mereka (Lipham James dalam Wahyosumidjo, 2008: 82). Mengingat peran kepala sekolah dalam mengelola sekolah, maka kepala sekolah memiliki tugas pokok dalam mengelola sekolah.

Tugas pokok kepala sekolah tertulis pada Panduan Kerja Kepala Sekolah (Direktorat Jenderal GTK. 2017: 7) meliputi; (1) menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi, dan tujuan sekolah; (2) menyusun struktur organisasi sekolah; (3) menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT); (4) menyusun peraturan sekolah; dan (5) mengembangkan sistem informasi manajemen.

Dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dijabarkan ketentuan-ketentuan mengenai kepala sekolah profesional, yaitu kepala sekolah dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi. Kompetensi kepala sekolah merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dipelajari, dipahami, dan diimplementasikan dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah adalah kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Dengan adanya Permendikbud ini yang mengatur mengenai standar kepala sekolah, maka profesionalitas kepala sekolah dapat diwujudkan dan pengisian jabatan kepala sekolah memiliki regulasi yang jelas.

Jabatan kepala sekolah adalah jabatan profesional sehingga harus dijabat oleh guru yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Persyaratan pokok untuk menduduki

jabatan kepala sekolah adalah guru yang sudah bersertifikat pendidikan profesional, memiliki masa kerja tertentu, dan bersertifikat kekepalasekolahan yang menjadi bukti formal bahwa guru yang bersangkutan telah memiliki lima kompetensi kepala sekolah (Jabar et al, 2016: 245).

3. Kajian Tentang Kepemimpinan Inklusif

a. Kepemimpinan inklusif

Definisi kepemimpinan inklusif menurut Saunders (2005: 14) bahwa kepemimpinan inklusif adalah memanfaatkan apa yang terbaik pada suatu keadaan dimana ada diversitas seperti suku, politik, dasar nilai, jenis kelamin dan gender, atau beberapa bagian penting lainnya yang berbeda di mana pemimpin terlibat di dalamnya. Kepemimpinan inklusif adalah kepemimpinan sebagai sebuah proses yang mempengaruhi secara kolektif peningkatan inklusif yang dilaksanakan melalui dua cara, *pertama* proses yang terjadi adalah bersifat inklusif; termasuk dalam hal ini baik sebagai individu maupun kelompok senantiasa ikut dalam kegiatan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, *kedua*, kepemimpinan inklusif meningkatkan praktik inklusif, yaitu berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan (Ryan, 2006: 4-5).

Kepemimpinan inklusif adalah salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk kepemimpinan yang memungkinkan kita untuk bekerja menuju keadilan sosial di sekolah dan masyarakat kita. Kepemimpinan inklusif dalam pendidikan inklusif menurut Ryan (2006: 9) terdiri dari beberapa kegiatan, yang termasuk di dalamnya mendukung pelaksanaan inklusif, berpartisipasi dalam pendidikan, membangun dengan penuh kesadaran, mengembangkan dialog, mengutamakan

belajar sambil praktik, mendukung inklusivitas sebagai strategi pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, dan membangun kebersamaan.

Dengan kata lain, kepemimpinan inklusif adalah pendekatan kepemimpinan yang melibatkan semua orang, bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan semua orang. Kepala sekolah bertindak sebagai teladan dalam sekolah yang dapat mengajarkan dan memberi contoh kepada semua warga sekolah tentang bagaimana perwujudan pendidikan untuk semua, menolak diskriminasi dan merangkul semua kalangan di sekolah agar secara bersama-sama dapat mencapai sekolah yang benar-benar inklusif.

b. Kepemimpinan Inklusif di Sekolah

Mendidik seluruh komunitas sekolah tentang isu-isu inklusif penting karena administrator, guru, siswa, dan orang tua, khususnya mereka yang berada dalam latarbelakang yang beragam, biasanya mengetahui terlalu sedikit tentang satu sama lain, tentang praktik praktik eksklusif seperti rasisme, dan cara mendekati dan mengimplementasikan praktik inklusif (Ryan, 2006: 10).

Dalam praktik pendidikan inklusif, kepala sekolah yang dinilai berhasil membawa sekolah ke arah inklusif melakukan cara-cara berikut:

1) Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif

Kepala sekolah memiliki visi kepemimpinan yang kuat tentang sekolah inklusif dinilai sangat penting untuk keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Penetapan visi kepemimpinan yang inklusif merupakan esensi dari bagaimana jalannya sekolah inklusif tersebut. Para pemimpin memerlukan

konsistensi dalam visi mereka untuk bergerak menuju sekolah yang sepenuhnya inklusif. Pemimpin inklusif yang sukses tidak menerima inklusif sebagian sebagai tujuannya, juga tidak berbicara dalam kata-kata hampa seperti “semua anak dapat belajar”. Mereka spesifik dan teguh dalam visi mereka untuk sekolah inklusif (Theoharis, Causton, & Woodfield, 2015: 21).

Sekolah harus berjalan dengan visi yang tegas dan juga jelas tentang inklusif dan pemahaman mengenai layanan yang diberikan. Menurut Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 25), tiga bidang yang menjadi perhatian agar sekolah berjalan sesuai dengan visi dan tujuan adalah : a) Struktur sekolah, yaitu bagaimana sekolah mengatur sumber daya manusia yang ada termasuk siswa; b) Iklim sekolah; dan c) Memenuhi kebutuhan semua siswa.

Di pelayanan inklusif dibutuhkan tim yang profesional untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, tanpa peran seluruh warga sekolah maka sekolah inklusif tidak akan berjalan, sehingga dalam menyusun visi sekolah yang inklusif, para pemimpin sekolah perlu mendorong proses kolaboratif yang mengarah menuju visi inklusif secara bersama di sekolah (Theoharis, Causton, & Woodfield, 2015: 21). Senuggs dan Mastropieri (1996) dan Waldron, McLeskey, & Red (2011) dalam Zapata (2016: 149) mencatat bahwa kepala sekolah tidak hanya harus mengembangkan komitmen mereka sendiri dengan nilai-nilai inti dari pendidikan inklusif, tetapi juga menginspirasi komunitas sekolah mereka untuk membangun kesepakatan untuk visi inklusif. Mendidik seluruh komunitas sekolah adalah hal yang penting dan juga vital di mana administrator, guru, siswa, dan orang tua berpartisipasi.

2) Terlibat dalam Perencanaan Kolaboratif dan Implementasi

Kepala sekolah terlibat dalam perencanaan dan memfasilitasi proses perencanaan secara demokratis dan transparan dengan tim yang representatif yang terdiri atas administrator sekolah, guru umum, guru pendamping khusus, dan anggota staff lainnya. Tim yang dibentuk oleh kepala sekolah harus berkolaborasi dengan staff lainnya selama proses perencanaan berlangsung. Proses perencanaan bersifat demokratis (Theoharis, Causton, & Woodfield, 2015: 22).

Menurut Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 23), bahwa komponen kunci dari layanan inklusif yang sukses ini melibatkan rencana kolaboratif - yang membawa para pemangku kepentingan yang berbeda ke meja untuk mengembangkan dan menyempurnakan implementasi untuk rencana sekolah. Bagian dari perencanaan kolaboratif dan implementasi reformasi inklusif adalah menciptakan iklim.

3) Melakukan audit ekuitas

Menurut Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 23) audit ekuitas menjadi alat yang lebih banyak digunakan untuk dipahami oleh para pemimpin sekolah dengan mengumpulkan data lokal tentang sekolah mereka. Audit dilakukan untuk mempermudah sekolah inklusif mencapai tujuannya, seperti membuat kasus untuk mengubah pemberian layanan, memperkuat visi inklusif, dan menyediakan data untuk proses perencanaan kolaboratif. Artinya, audit ekuitas berfungsi untuk mengetahui apakah sekolah telah adil dalam melayani kebutuhan sesuai siswa,

dan menemukan ketidakadilan yang terjadi untuk membawa layanan tersebut ke arah keadilan pendidikan untuk semua.

4) Mendesain ulang organisasi sekolah

Berdasarkan hasil penelitian Waldron, McLeskey & Redd (2011: 54) dapat diketahui bahwa kepala sekolah berkolaborasi dengan guru untuk mendesain organisasi sekolah untuk menyesuaikan dengan visi yang telah ditentukan. Fullan (2007: 54) dalam Waldron, McLeskey & Redd (2011: 54) mengemukakan bahwa kepala sekolah tidak melakukan desain organisasi sendiri seakan - akan dia tahu desain organisasi bagaimana yang dibutuhkan, melainkan dia berkolaborasi dengan guru untuk mengembangkan komunitas belajar dengan keputusan - keputusan yang dihasilkan yang akan menjadikannya sebagai organisasi yang didesain ulang dan direkonstruksi. Langkah ini melibatkan pemikiran kembali struktur dan penggunaan staf untuk membentuk tim profesional juga untuk melayani semua siswa secara inklusif. Dengan kata lain, membuat pemetaan pelayanan yang baru (Theoharis, Causton, & Woodfield, 2015: 27). Staff membentuk kelas yang seimbang dan heterogen dimana semua siswa disertakan. Guru sebagai pendidik dalam kelas diberi hak membuat keputusan nyata tentang ruang kelas mereka dan sekolah.

5) Membangun tim pengajaran

Para pemimpin sekolah inklusif mengembangkan tim pengajaran spesialis dan umum. Mengembangkan tim dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, tetapi pada intinya melibatkan penyatuan para profesional yang akan berbagi tanggung

jawab untuk bekerja sama untuk terlibat secara inklusif memenuhi kebutuhan berbagai peserta didik di bawah asuhan bersama mereka.

Pada penelitian Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 27) diketahui kepala sekolah tidak lagi menyediakan pengajaran secara khusus untuk siswa - siswa yang berkebutuhan khusus dan tidak lagi mempertahankan program tersebut. Semua pengajaran dilakukan atas dasar kerjasama staf pendidikan dan melakukan pengajaran bersama. Tujuan dari kepala sekolah adalah menjadikan sekolah milik bersama antara siswa dan guru. Guru juga ditingkatkan kapasitasnya secara bersama. Kepala sekolah memastikan guru pendamping khusus dapat melakukan perencanaan bersama dengan guru pendidikan umum dan mengetahui dengan siapa guru pendamping khusus berkerjasama. Kepala sekolah menyediakan waktu agar guru pendamping khusus dan guru pendidikan umum dapat saling mengenal dan berkolaborasi dalam memberikan pendidikan.

6) Kepemimpinan Guru

Guru juga dilibatkan menjadi pemimpin dalam melaksanakan pengajaran di kelas. Menurut Waldron dan McLeskey (2010) dalam Zapata (2015: 152) bahwa kepala sekolah harus memberdayakan guru untuk mengambil peran kepemimpinan, berbagi dan menganalisis data siswa, dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama untuk lebih jauh mengubah agenda. Kepala sekolah membangun dan menggunakan kelompok kepemimpinan guru tidak hanya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, tetapi juga untuk memimpin sesi pengembangan profesional. Kepemimpinan guru diberikan oleh kepala

sekolah melalui sikap kolaboratifnya. Sifat kolaboratif yang menjadi budaya sekolah inklusif memiliki implikasi yang jelas untuk sifat kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

7) Membangun kapasitas staff

Para kepala sekolah dalam penelitian Zapata (2016: 150) diketahui melakukan apa pun untuk membangun keterampilan staff sekolah mereka, menggunakan beragam sumber daya seperti kursus universitas, pelatihan pengembangan profesional, DVDs, buku, dan konsisten mengulang observasi kelas dipadukan dengan umpan balik, pemodelan, dan pembinaan. Dalam membangun kapasitas staf, sekolah tidak memilih siapa saja yang akan dikembangkan menjadi profesional, tetapi hingga warga sekolah diberikan pelatihan meliputi penjaga sekolah, petugas makan siang, pengawas taman bermain, sopir bus, orang tua, dan siswa (Zapata. 2016: 151).

8) Dukungan emosional dan apresiasi

Kepala sekolah dalam penelitian Zapata (2016: 153) menyoroti pentingnya menghadapi kebutuhan sosial emosional karyawan mereka. Kepala sekolah mengadakan sesi tanya jawab setiap hari dengan guru dan staf sekolah, tidak hanya membahas seberapa baik pengajaran dan dukungan untuk siswa serta bekerja secara kolaboratif, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan emosional karyawan dan merayakan kesuksesan karyawan. Beberapa kepala sekolah berbicara tentang pentingnya memberikan nasihat kepada guru baru termasuk untuk mengajar secara akademik dan untuk mendengarkan kekecewaan mereka

dan merayakan keberhasilan mereka. Keberhasilan staff dapat dirayakan melalui penggunaan kartu ucapan terima kasih, umpan balik positif, sertifikat, dan buletin serta mensetting guru agar memimpin pengembangan kapasitas rekan guru lainnya.

9) Menggunakan data dalam pengambilan keputusan

Peningkatan sekolah tidak mungkin tidak didukung oleh sistem data. Pada penelitian Waldron, McLeskey & Redd (2011: 57) kepala sekolah benar-benar memulai melihat data siswa, dan siapa yang tidak sukses di sini, dan mengapa mereka tidak menjadi berhasil untuk memandu pengajaran, penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas sekolah. Sistem data juga digunakan sebagai bahan kepala sekolah berbicara dengan guru mengenai siswa mereka, bagaimana mereka maju, seberapa baik mereka mengajar tanpa data individual tentang siswa serta memiliki percakapan yang baik tentang bagaimana yang dilakukan anak - anak, bagaimana kita bisa membuat mereka bergerak, sumber daya apakah yang Anda butuhkan, dan semua itu. Dibutuhkan pengembangan profesional, bagaimana teknologi dan sumber daya dialokasikan, dan sebagainya. Sekolah membutuhkan *data driver* siswa.

10) Memastikan hak suara bagi semua

Dalam sekolah inklusif menjadi hal yang penting agar semua orang memiliki hak yang sama untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Menurut Burbules (1993) dalam Ryan (2006: 11) setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, untuk menghormati anggota lain, hak untuk berbicara

dan merasa aman untuk berbicara; semua ide harus ditoleransi dan mengalami penilaian yang adil. Proses bertukar ide dan saling mendengarkan dapat dilakukan dalam dialog. Dialog antar warga sekolah dapat terjadi melalui media telepon, saling berkunjung, bertukar informasi dengan orang, menggunakan survei untuk mengumpulkan informasi tentang keinginan masyarakat, menggunakan buletin, koran sekolah, dan pertemuan untuk mendapatkan informasi ke dalam komunitas, dan mengundang orang tua dan kelompok masyarakat ke dalam sekolah (Ryan, 2003 dalam Ryan, 2006: 11).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah “Kepemimpinan Inklusif Dalam Pelaksanaan Pendidikan inklusif di Kota Makassar” oleh Muhammad Basri mahasiswa S-3 Program Studi Ilmu Sosial Universitas Hasanudin Makasar tahun 2010. Penelitian dilakukan di 45 sekolah di Kota Makasar. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara menguji validitas (ketepatan), reabilitas (ketetapan), dan internal konsistensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

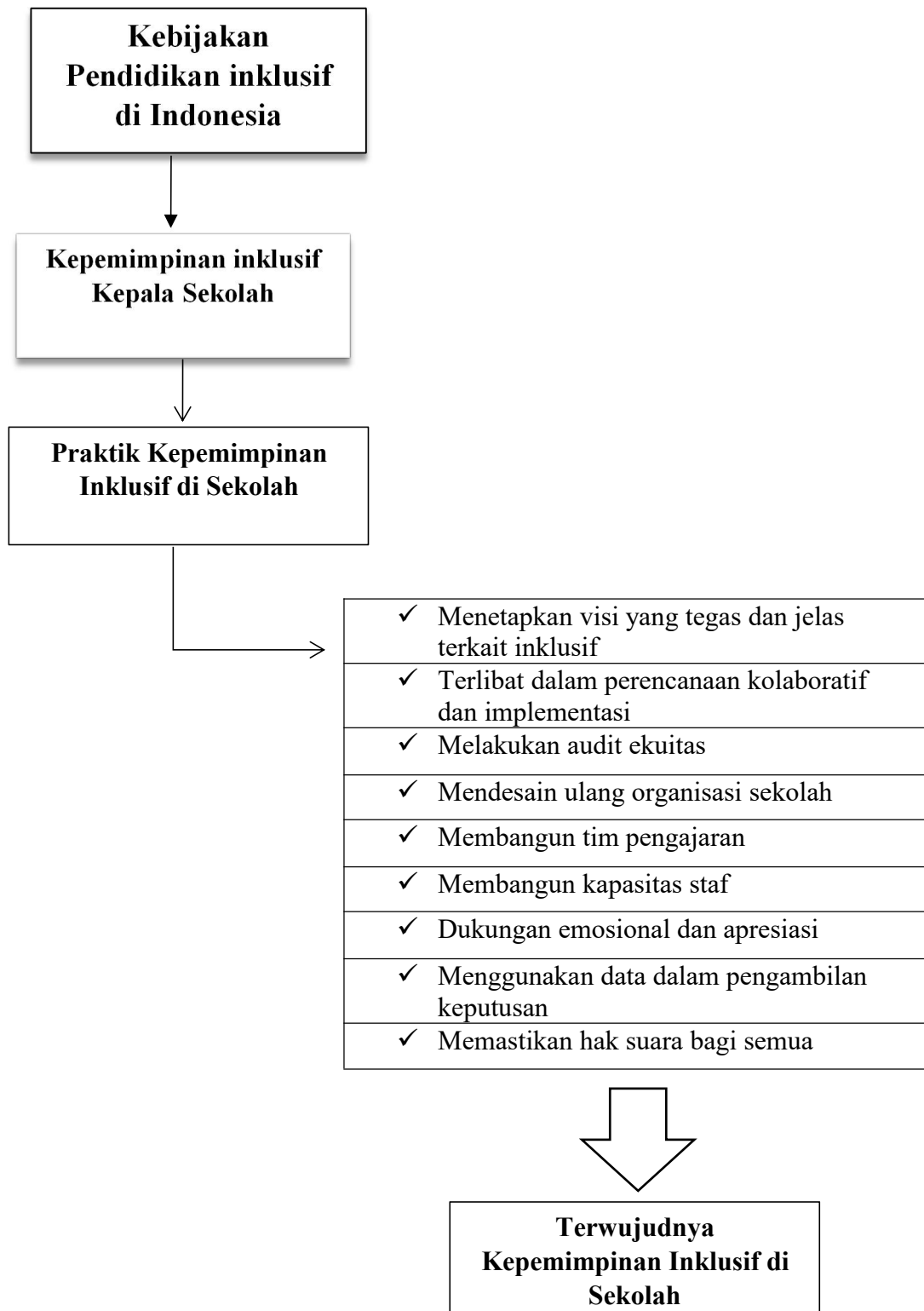
1. Nilai emansipasi dan partisipasi sebagai nilai yang membangun kepemimpinan inklusif berpengaruh secara signifikan terhadap salah satu dimensi yang membangun pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu budaya inklusif. Dengan demikian, tinggi rendahnya pelaksanaan budaya inklusif dijelaskan oleh penerapan nilai emansipasi dan partisipasi.
2. Nilai emansipasi dan partisipasi sebagai nilai yang membangun kepemimpinan inklusif berpengaruh secara signifikan terhadap kebijaksanaan inklusif sebagai salah satu dimensi yang membangun pelaksanaan pendidikan

inklusif. Dengan demikian tinggi rendahnya pelaksanaan kebijaksanaan inklusif dijelaskan oleh penerapan nilai emansipasi dan partisipasi.

3. Nilai emansipasi dan partisipasi sebagai nilai yang membangun kepemimpinan inklusif berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan praktik inklusif sebagai salah satu dimensi yang membangun pelaksanaan pendidikan inklusif. Dengan demikian tinggi rendahnya pengembangan praktik inklusif dijelaskan oleh penerapan nilai emansipasi dan partisipasi.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini melihat bagaimana kepala sekolah dalam memimpin sekolahnya ke arah inklusif dan praktik-praaktik yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta secara kualitatif. Kepala sekolah yang menjadi narasumber pada penelitian ini berjumlah enam orang yang memimpin sekolah inklusif. Berikut adalah gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia?
 - a. Apa harapan kepala sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia?
 - b. Apa manfaat dari tercapainya harapan tersebut?
2. Bagaimana praktik kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif?
 - a. Mengapa praktik tersebut dilakukan?
 - b. Apa hasil dari praktik yang diterapkan kepala sekolah tersebut?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk menunjukkan kemampuan kepala sekolah untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah yang ia pimpin. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011: 15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Denzin & Lincoln (1987) dalam Moleong (2009: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dalam Moleong (2009: 6) dikemukakan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memberikan pemahaman atas fenomena yang dialami oleh subjek penelitian pada suatu konteks alamiah, diteliti melalui berbagai tahap alamiah, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan praktik kepemimpinan sekolah di sekolah inklusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri di Kota Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran terkait strategi kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusif di SD Negeri di Yogyakarta melalui deskripsi kata-kata, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah sekolah negeri pada jenjang sekolah dasar di Kota Yogyakarta. Tempat penelitian yang disasar oleh peneliti berjumlah enam sekolah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bulan Juli 2020 - Agustus 2020.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Hari, tanggal	Tempat
1	Selasa, 14 Juli 2020	SD Negeri TP Yogyakarta
2	Rabu, 15 Juli 2020	SD Negeri BC Yogyakarta
3	Rabu, 22 Juli 2020	SD Negeri MG Yogyakarta
4	Rabu, 22 Juli 2020	SD Negeri BR2 Yogyakarta
5	Rabu, 5 Agustus 2020	SD Negeri TR Yogyakarta
6	Rabu, 22 Juli 2020	SD Negeri JT1 Yogyakarta

C. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2009: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial tertentu berupa lembaga pendidikan, sehingga dilakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang-orang yang akan diwawancarai dilakukan dengan *purposive*, yaitu dipilih melalui pertimbangan dan tujuan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011: 300). Sumber data penelitian ini merupakan kepala sekolah negeri tingkat sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, meliputi enam kepala sekolah negeri yang berada di Kota Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah inti dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam dan Semi Terstruktur

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dikarenakan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011: 317) bahwa wawancara merupakan pertemuan

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan jenis wawancara mendalam dan semi terstruktur. Patton dalam Ahmadi (2016: 119) mengemukakan bahwa wawancara mendalam dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang. Sedangkan, wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2011: 233) merupakan jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas tatkala dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Peneliti dalam penelitian ini memilih wawancara mendalam dan semi terstruktur dikarenakan pedoman wawancara yang digunakan bebas, hanya mencantumkan garis besar pertanyaan saja. Pertanyaan dapat dikembangkan lagi seiring proses wawancara berlangsung. Pelaksanaan wawancara selalu mengembangkan pertanyaan yang diberikan, karena wawancara bersifat "*open ended*" di mana pertanyaan akan ke arah yang lebih mendalam untuk menggali ide dan opini informan-informan yang terlibat dalam penelitian ini.

Informasi yang ingin digali peneliti pada penelitian ini adalah mengenai pandangan kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif dan praktik-praktik yang dilakukan kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Wawancara dilakukan dengan enam kepala sekolah negeri tingkat SD yang melaksanakan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta.

2. Observasi Tidak Terstruktur Non Partisipatif

Observasi non partisipatif yaitu melakukan pengumpulan data tanpa harus melibatkan diri langsung ke dalam situasi di mana peristiwa itu berlangsung, melainkan melalui media tertentu (Ahmadi, 2016: 169). Teknik observasi non partisipatif digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan.

Peneliti dalam penelitian ini akan mengamati kegiatan dengan batasan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti sehingga data observasi yang dihasilkan valid dan sesuai dengan kondisi nyata yang diamati. Tidak ada pedoman observasi karena penelitian ini menggunakan observasi yang tidak terstruktur.

3. Studi Dokumen

Sugiyono (2011: 329) mengemukakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dimaksud dapat dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui data yang terdapat dalam dokumen tersebut. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sehingga data yang didapat lebih kredibel. Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen terhadap dokumen pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif pada sekolah yang diteliti. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pedoman kurikulum yang digunakan sekolah untuk mengetahui bagaimana sekolah menetapkan standar kriteria minimum bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk mempermudah proses pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapat informasi dari responden (Gulo, 2002: 123). Instrumen itu disebut pedoman wawancara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan, alat perekam suara, dan kamera. Pedoman wawancara dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis wawancara yang dipilih peneliti untuk mengumpulkan data lapangan, yaitu pedoman untuk wawancara mendalam dan semi terstruktur.

Pedoman wawancara ini memberikan suatu kerangka kerja yang mana di dalamnya pewawancara akan mengembangkan pertanyaan, urutan dari pertanyaan tersebut, dan membuat keputusan tentang informasi yang dikejar dengan kedalaman yang lebih besar (Ahmadi, 2016: 139). Patton dalam Ahmadi (2016: 142) membuat garis besar tentang jenis pertanyaan yang dapat diajukan dalam wawancara, meliputi:

1. Pertanyaan tentang pengalaman/perilaku;
2. Pertanyaan tentang pendapat/nilai;
3. Pertanyaan tentang perasaan;
4. Pertanyaan tentang pengetahuan;
5. Pertanyaan tentang sensori atau penginderaan;
6. Pertanyaan tentang latar belakang/demografi.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian ini menggunakan paradigma interpretivism dan kerangka teoritis Interaksionism

Simbolik (IS). Menurut Blumer (1969) kerangka teoritis IS akan menjawab pertanyaan X (partisipan) dalam menghadapi, melaksanakan ataupun mengatasi Y (fenomena/ realita). Bentuk pertanyaan yang mengacu pada kerangka teoritis IS adalah:

1. Apa pandangan awal X terhadap Y?
2. Bagaimana tindakan X terhadap Y dengan pandangan awal yang ia miliki tersebut?
3. Apa perubahan pada pandangan awal X, jika ada akibat dari hasil tindakan mereka?

Menurut Blackledge & Hunt (1985) dalam rangka melengkapi penjelasan di atas, mereka mengemukakan bahwa pemahaman terhadap pandangan seseorang tentang suatu fenomena dapat dicapai melalui unsur-unsur berikut, yaitu: (a) tujuan tindakan individu dan alasannya; (b) strategi untuk mencapai tujuan dan alasannya; (c) arti atau makna dari strategi atau tindakan yang dilakukan dan tercapainya tujuan dan alasannya; dan (d) hasil yang diharapkan atas tindakan yang dilakukan dan alasannya.

Paradigma interpretivism dan kerangka teoritis Interaksionism Simbolik (IS) serta komponen pembentuk pandangan dijadikan sebagai bahan acuan peneliti dalam menyusun pertanyaan umum untuk wawancara, sehingga bisa membawa peneliti memahami pandangan dan apa saja yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pertanyaan yang akan digunakan sebagai bahan wawancara dapat membawa

jawaban yang berdasarkan pada pandangan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang mana dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pedoman Pertanyaan Penelitian Berdasarkan Pertanyaan Penelitian

Pedoman Wawancara	Pertanyaan dalam Pedoman Wawancara	
Bagaimana pandangan kepala sekolah tentang pelaksanaan pendidikan inklusif?	1	Apa tujuan Bapak/Ibu melaksanakan pendidikan inklusif?
	2	Apa strategi yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam memimpin sekolah ini agar mencapai tujuan tersebut? Mengapa strategi tersebut digunakan?
	3	Apa manfaat yang diinginkan dari pencapaian tujuan dan strategi yang telah diterapkan oleh Bapak/Ibu?
	4	Apa hasil yang diharapkan dari tercapainya tujuan tersebut? Mengapa hasil seperti itu yang diharapkan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas berfungsi sebagai pertanyaan awal yang seiring wawancara akan membawa ke pertanyaan penting lainnya. Sehingga, pertanyaan-pertanyaan di atas bukanlah hal spesifik. Berikut adalah contoh pengembangan pertanyaan-pertanyaan umum yang disajikan pada tabel:

Tabel 3. Pengembangan Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara	Pertanyaan dalam Pedoman Wawancara	
Apa tujuan Bapak/Ibu dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di	1	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif ?
	2	Apa visi Bapak/Ibu terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif?

sekolah?	3	Mengapa tujuan itu dipilih dan ingin dicapai oleh Bapak/Ibu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif?
	4	Apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu untuk mencapai tujuan tersebut?
	5	Mengapa Bapak/Ibu melakukan hal-hal tersebut sebagai usaha dalam mencapai tujuan yang diharapkan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan pertanyaan umum untuk membawa ke arah data yang dibutuhkan. Petanyaan ini dapat menyesuaikan dengan apa yang sedang terjadi saat wawancara berlangsung. Hal yang sama juga dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2015: 368) mnejelaskan bahwa uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan penulis adalah member check. Menurut Sugiyono (2018: 375) member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Member check bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. Member check dalam penelitian ini dibutuhkan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dari wawancara penulis kepada informan. Dalam penelitian ini member check dilakukan oleh tiap kepala sekolah yang menjadi informan penulis, yaitu enam kepala sekolah yang menjadi subjek penelitian. Kepala sekolah memberi tanda tangan pada tabel

member check jika menyetujui hasil data yang diinterpretasikan oleh penulis (terlampir).

G. Teknik Analisis Data

Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah *grounded theory* (teori membumi). Definisi *grounded theory* dalam Ahmadi (2016: 52) adalah teori yang diperoleh secara induktif dari studi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Menurut Strauss & Corbin (1998: 12), *grounded theory* berasal dari data, yang kemudian memfokuskan pada pembangunan teori.

Dalam *grounded theory*, teori yang ditemukan dikembangkan, dan dibuktikan sementara waktu melalui pengumpulan data yang sistematis dan analisis data mengenai fenomena tersebut. Tujuan dari metode *grounded theory* adalah membentuk teori yang bagus dan megembangkan mengembangkan bidang yang dikaji (Ahmadi, 2016: 54). Nyoman Budiasih (2014: 20) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dengan model *grounded theory* bertolak belakang dengan riset kuantitatif pada umumnya yang berawal dari teori konseptual menuju kajian empiris, sedangkan *grounded theory* bermula dari kajian empiris berdasarkan data yang diperoleh menuju ke teori konseptual.

Tahap analisis data pada riset kualitatif dengan menggunakan metode *grounded theory* merupakan proses yang saling berhubungan dan dilakukan secara bergantian. Tahapan analisis data dengan metode *grounded theory* ini dilakukan dalam bentuk pengkodean, yang merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep, dan penyusunan kembali dengan cara yang baru. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2011: 334) adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.

Grounded theory dipilih dalam penelitian ini karena dapat memberikan pedoman yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, yang mana tersiri atas *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Proses awal analisis data dengan metode *grounded theory* adalah pengkodean (*coding*) serta pengkategorian data. Adapun proses diawali dengan *open coding* dimana peneliti melakukan identifikasi, penanaman, kategorisasi, dan penguraian gejala yang ditemukan dalam hasil wawancara, observasi, dan catatan harian peneliti itu sendiri. Selanjutnya, adalah proses *axial coding* yaitu menghubungkan berbagai kategori riset dalam bentuk susunan bangunan atau sifat-sifat yang dilakukan dengan menghubungkan kode-kode. Tahap terakhir adalah *selective coding* yakni memilih kategorisasi inti dan menghubungkan kategori-kategori lain pada kategori inti. Metode riset *grounded theory* menekankan pada validitas data melalui verifikasi dan menggunakan *coding* sebagai alat utama dari pengolahan data (Nyoman Budiasih, 2014: 23-24).

Tahap analisis data pada penelitian ini adalah setelah peneliti mengumpulkan data penelitian dari responden melalui wawancara, observasi dan studi dokumen maka peneliti memberikan inisial kepada tiap responden, misalnya W1.KS.9. W2.KS.8, dan seterusnya. Proses selanjutnya adalah *open coding* di mana peneliti melakukan identifikasi, penanaman, kategorisasi, dan penguraian gejala yang ditemukan dengan cara menuliskan catatan pinggir mengenai kategori yang

dibuat untuk menunjukkan *properties* atau indikator dari hasil wawancara yang telah dilakukan. *Axial coding* adalah proses mengelompokkan *properties* yang telah dibuat dalam tahap *open coding* berdasarkan kesamaan antar kategori yang selanjutnya, peneliti melihat *properties* yang dihasilkan untuk kemudian dikelompokkan lagi menjadi kategori yang lebih umum. Tahapan terakhir, peneliti akan menyajikan hasil penafsiran data tersebut melalui bagan, tabel ataupun gambar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Pandangan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia, dan (2) Praktik kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Hasil penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara dengan informan yaitu enam kepala sekolah dasar negeri di kota Yogyakarta.

1. Pandangan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam, maka perlu adanya penyamaan pemahaman terkait apa itu pandangan. Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hasil dari perbuatan memandang. Pandangan dapat memiliki maksud sebagai hasil dari perbuatan memandang yang memunculkan pendapat. Pada penelitian ini, peneliti memilih pandangan kepala sekolah sebagai informan dan juga karena kepala sekolah adalah seorang pemimpin di sekolahnya.

Pandangan manusia dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, dan pendapat seseorang. Hal ini juga berlaku pada pandangan kepala sekolah, yang mana kepala sekolah memiliki bekal pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang mumpuni.

Merujuk pada hasil penelitian, ketika peneliti menanyakan mengenai pandangan kepala sekolah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, dapat

disimpulkan bahwa pandangan kepala sekolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pandangan kepala sekolah dipengaruhi latar belakang pendidikan

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif pandangan sangat berpengaruh pandangannya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian, kepala sekolah yang memiliki pandangan positif dapat dibedakan karena. (a) terbentuk dari dalam hati dilatarbelakangi pendidikan. (b) terbentuk setelah mengikuti pelatihan. Secara lebih lanjut, dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu kepala sekolah yang visioner, yaitu informan W1.P.TP yang mana memahami betapa pentingnya pendidikan inklusif yang dalam hal ini memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh siswa-siswi di sekolah yang dipimpin.

“Pendidikan inklusi menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan juga khususnya kepala sekolah tentang bagaimana caranya supaya anak berkebutuhan bisa dilayani semua dalam kelas.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan W1.P.TP memandang pendidikan inklusif menjadi suatu tantangan yang mana kepala sekolah harus bisa melaksanakan dan memenuhi tantangan tersebut. Informan memahami pendidikan inklusif seperti apa dan bertindak cepat dengan mengajukan assesmen bagi anak-anak yang kesulitan belajar secara inisiatif bahkan saat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta belum memfasilitasi assesmen bagi sekolah-sekolah inklusif di Yogyakarta.

“Saat rapat bersama kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, diketahui pihak Dinas memfasilitasi pengajuan assesment anak-anak dan menerima laporan assesment mandiri dari pihak sekolah. Saya melaporkan hasil assesmen mandiri yang telah saya lakukan”. W1.P.TP

Merujuk pada kutipan wawancara informan W1.P.TP di atas maka dapat dilihat bahwa kepala sekolah W1.P.TP melakukan assesmen secara mandiri sebagai usaha membantu siswa-siswa yang kesulitan belajar. Alasan mengapa informan W1.P.TP melakukan assesmen secara mandiri dilatarbelakangi oleh pendidikan SPGLB yang pernah ditempuh, yang mana dapat dilihat pada kutipan berikut:

”Sebelumnya, saya pernah berkuliah di SPGLB selama satu semester dan mendapatkan materi dasar tentang tuna grahita, dengan latar belakang tersebut saya sempat berpikir apakah anak ini memiliki masalah IQ, lalu saya inisiatif untuk melakukan assesmen kepada anak-anak yang sering dikeluhkan guru”. W1.P.TP.

Berdasarkan kutipan wawancara informan W1.P.TP di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan di sekolah yang ia pimpin. Pada kasus ini, kepala sekolah W1.P.TP memiliki inisiatif untuk melakukan assesmen IQ pada anak-anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran, sehingga nanti dari hasilnya dapat diketahui kebutuhan apa yang dimiliki oleh anak-anak tersebut dan menentukan *treatment* yang tepat yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam melayani kebutuhannya.

Informan W1.P.TP memiliki pandangan terhadap pendidikan inklusif yang visioner, dan dibuktikan bahwa kepala sekolah ini mengetahui bagaimana jalannya pendidikan inklusif secara ideal, yang mana dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Inklusi itu berarti dalam kelas perlu adanya pendekatan terhadap anak-anak yang tertinggal kemampuannya daripada teman-temannya. Inklusi berarti guru memberikan perlakuan yang berbeda kepada ABK daripada dengan anak-anak normal” W1.P.TP.

“Saya merasa SD-SD di Kota Yogyakarta ini benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Harapannya semua sekolah di Kota Jogja akan menjadi inklusif yang maksimal.” W1.P.TP

Pada akhirnya, pandangan yang dimiliki informan W1.P.TP ini membawa harapan yang diinginkan informan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif yang maksimal, yang akan diwujudkan melalui praktik-praktik kepemimpinan yang memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

b. Pandangan kepala sekolah dipengaruhi pelatihan inklusif

Berbicara mengenai pandangan positif kepala sekolah, dapat diketahui bahwa pandangan dapat terbentuk melalui pelatihan-pelatihan yang mumpuni bagi kepala sekolah inklusif dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah yang ia pimpin. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang dalam hal ini mengeluarkan kebijakan sekolah inklusif di Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam memberikan bekal dan peningkatan kapasitas bagi kepala sekolah - kepala sekolah di Kota Yogyakarta mengenai pemahaman dan wawasan terkait inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan kepala sekolah selaku informan sebelumnya tidak memahami bagaimana pendidikan inklusif seharusnya, mereka baru memahami setelah mendapatkan pelatihan inklusif. Hal ini diungkapkan oleh informan-informan W2.PS.BC; W5.DA.TR1 ; W4.B.BR2; dan W6.K.JT.1.

“Ya harus ikut pelatihan-pelatihan dulu mbak. Pelatihan inklusif diadakan dari ULD, namun pernah saya mengikuti diadakan di SD Tumbuh tentang penanganan anak-anak inklusif. Mulai dari itu saya paham bagaimana mengapa pendidikan inklusif perlu diselenggarakan.” W4.B.BR2

Merujuk pada informan di atas, ditelaah bahwa informan di atas dengan mengikuti pelatihan inklusif bagi kepala sekolah, dapat memberikan pemahaman mengenai pendidikan inklusif yang pada akhirnya kepala sekolah mengetahui mengapa pendidikan inklusif ini menjadi penting.

Berdasarkan hasil penelitian pula, diketahui bahwa seluruh kepala sekolah di sekolah inklusif telah mendapatkan pelatihan inklusif. Pelatihan inklusif tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui lembaga ULD (Unit Layanan Disabilitas), Universitas, maupun lembaga psikologis. Dengan latar belakang pelatihan pendidikan inklusif yang telah diikuti oleh kepala sekolah, maka terbentuklah harapan kepala sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Sekolah ingin menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keaneka ragaman , tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran terutama peserta didik yang berkebutuhan khusus.” W6.K.JT1

“Kami harus bisa memberikan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan sesuai dengan kebutuhannya” W4.B.BR2.

“Ya sudah menjadi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang nyaman bagi siswa. Anak yang berkebutuhan khusus perlu perlakuan yang khusus dan butuh perhatian khusus.” W2.PS.BC

“Penanganan pendidikan inklusif itu adalah tanggung jawab kita bersama karena anak-anak itu harus tetap mendapatkan pendidikan, agar mereka tetap bisa tertangani sesuai kebutuhan sehingga menjadi penerus bangsa yang berkualitas” W5.DA.TR1.

Merujuk pada kutipan wawancara di atas, kepala sekolah memahami bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan pembelajaran yang ramah bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, memenuhi kebutuhan peserta didik dan menciptakan sistem pendidikan yang adil bagi semua.

c. Pandangan kepala sekolah pendidikan inklusif sebagai pelaksanaan kebijakan

Terdapat berbagai macam pandangan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Pandangan tidak hanya yang bersifat positif, namun juga pandangan ada yang bersifat negatif. Kepala sekolah yang berpandangan negatif mengenai pendidikan inklusif dapat diketahui yaitu dengan mereka tidak bisa menerima penyelenggaraan inklusif sebagaimana mestinya, melainkan mereka membebankan syarat-syarat tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan dari enam kepala sekolah yang menjadi informan, terdapat satu kepala sekolah yang memiliki persepektif negatif terhadap pendidikan inklusif. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

”Sekolah inklusi memang melaksanakan pendidikan untuk semua namun ada syarat dan ketentuannya.” W3.SL.MG.

Merujuk pada kutipan wawancara informan W3.SL.MG di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah tersebut membatasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pandangan negatif informan tersebut tentu saja berimplikasi pada praktik-praktik pendidikan inklusif yang dilakukan.

Berdasarkan pada hasil penelitian, informan W3.SL.MG melaksanakan pendidikan inklusif sebagai wujud kepatuhan sekolah terhadap kebijakan yang dicetuskan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:

“Kan namanya kebijakan, artinya sekolah inklusi merupakan kebijakan Dinas Pendidikan untuk melayani masyarakat maka kami melaksanakan sebagai wujud kewajiban kami terhadap kebijakan. Jika kami tidak melaksanakan kebijakan sekolah inklusi, kami melanggar Perwal kota Yogyakarta. Begitu Perwal ditandatangani petinggi, maka saya anggap bahwa saya harus melaksanakan.” W3.SL.MG

Merujuk pada kutipan wawancara dengan informan W3.SL.MG di atas, maka disimpulkan bahwa kepala sekolah tersebut melaksanakan pendidikan inklusif sebatas untuk memenuhi perintah atau kebijakan yang dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang secara legal tertulis dalam Perwal (Peraturan Walikota).

2. Praktik Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pendidikan Inklusif

Adapun dasar dari pembahasan di sub bab ini adalah penggabungan dari teori-teori pendidikan inklusif yang mana akan menunjukkan praktik-praktik kepemimpinan inklusif sebagai berikut:

a. Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.

Visi yang tegas dan jelas terkait inklusi perlu dimiliki oleh kepala sekolah yang memimpin sekolah inklusi karena berkaitan dengan keberhasilan implementasi dan berkaitan dengan esensi dari jalannya sekolah inklusi tersebut. Para pemimpin memerlukan konsistensi visi inklusi, ketegasan, dan kejelasan sehingga dapat berjalan sekolah yang sepenuhnya inklusif.

Dengan visi yang kuat maka pelayanan inklusif yang diberikan akan terarah. Oleh karena itu, kepala sekolah mengimplementasikan visi inklusif dalam bentuk pelayanan yang dilakukan di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu informan mengungkapkan:

“Yang utama itu ada 3P (Pelayanan, Penampilan, dan Prestasi)” W.1.P.TP Merujuk pada kutipan informan di atas, kepala sekolah memasukan esensi pendidikan inklusif dalam visi sekolah yang mana nantinya menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya. Praktik ini dilakukan oleh informan W1.P.TP; W2.PS.BC; W4.B.BR2; W5.DA.TR1, dan kemudian dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Salah satu visi di sekolah ini itu memberikan pelayanan sesuai minat bakat siswa. Sesuai kan dengan nilai inklusi yaitu mengembangkan kelebihan siswa karena tiap siswa pasti memiliki kelebihan.” W1.P.TP

“Visi sekolah kami “Terwujudnya Siswa Berakhlaq Mulia, Berprestasi, Mandiri, Berbudaya, dan Peduli Lingkungan”. Menurut saya, visi misi kami sesuai dengan nilai-nilai inklusi. Mandiri ini adalah salah satu upaya kami untuk membuat ABK menjadi anak yang mandiri.” W2.PS.BC

“Di depan dekat gerbang masuk itu ada di misi sekolah, “Memberikan pelayanan sesuai minat bakat siswa”” W5.DA.TR1

“Misi sekolah adalah menumbuh kembangkan kreativitas siswa sesuai dengan potensi masing-masing” W6.K.JT1

“Ada misi yang kami usung adalah “Semua anak dapat sekolah”” W4.B.BR2

Dalam pelayanan inklusif, melibatkan seluruh civitas akademika di sekolah. Tentu saja visi yang kuat perlu disebarluaskan kepada seluruh civitas akademik di sekolah agar mereka mampu memberikan pelayanan inklusif yang sesuai. Kepala sekolah perlu juga menanamkan visi inklusi agar civitas akademika di sekolah juga memahaminya. Yang dilakukan adalah menempel visi-misi sekolah pada dinding-dinding sekolah, ataupun pada gerbang masuk sekolah, hal ini berdasarkan apa yang telah diamati peneliti di sekolah yang menjadi tempat penelitian ini. Selain itu, kepala sekolah kembali menguatkan visi sekolah inklusif

dengan memberikan pemahaman pada guru-guru. Kutipan salah satu informan melakukan penekan visi kepada seluruh civitas akademika:

“Saya selalu menekankan dalam rapat-rapat bahwa ASN itu adalah pelayanan yang harus melayani sebaik-baiknya, apapun kondisi anak kita di sekolah adalah tanggung jawab kita, karena kita diberi amanah.”
W5.DA.TR1.

Kepala sekolah dalam menentukan visi inklusif yang tegas dan jelas tidak terlepas dari pemahaman kepala sekolah terhadap bagaimana pendidikan inklusif itu seharusnya. Dalam membentuk pemahaman kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif, kepala sekolah ikut berbagai macam pelatihan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan inklusif untuk kepala sekolah secara general difasilitasi oleh Dinas Pendidikan DIY maupun melalui ULD, namun kepala sekolah juga bisa ikut pelatihan diluar lembaga-lembaga tersebut:

“Ya harus ikut pelatihan-pelatihan dulu mbak. Pelatihan inklusif diadakan dari ULD, namun pernah saya mengikuti diadakan di SD Tumbuh tentang penanganan anak-anak inklusif.” W4.B.BR2

“Saya diikutkan Diklat oleh pihak Dinas sebanyak dua kali. Pertama, di Hotel Cokro Kembang dan kedua di Hotel Ross Inn yang mana keduanya dikepalakan oleh Dikpora DIY. Mulai itu, saya menjadi paham dan adanya dukungan dari Dinas Pendidikan yang mana memiliki ULD untuk mengurus inklusi” W1. P. TP.

“Kami berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Lalu saya mengikuti pelatihan-pelatihan.” W2. PS. BC.

“Saya mengikuti pelatihan di level kebijakan. Pelaksana pelatihan pernah dilakukan dari dinas pendidikan dan juga LPMP” W3.SL.MG

Kutipan di atas adalah kutipan dari informan yang mana mereka menyampaikan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan semua informan telah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif oleh kepala sekolah baik itu dilaksanak oleh Dinas Pendidikan maupun lembaga pendidikan lainnya.

Kepala sekolah yang tidak memiliki visi yang tegas dan jelas terkait inklusi akan kurang dalam memberikan pelayanan inklusi. Seperti yang dipaparkan oleh informan berikut:

“Secara tersirat visi misi sekolah ini tidak inklusi, tidak dapat menggambarkan langsung bahwa sekolah ini inklusi.” W3.SL.MG

Merujuk pada kutipan di atas, kepala sekolah tidak memasukkan nilai-nilai inklusif secara tersirat pada visi-misi sekolah. Visi-misi sekolah seharusnya dapat menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang inklusif, sehingga sekolah yang tidak menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif menunjukkan bahwa tidak ada arah ke inklusif sepenuhnya dalam pelayanannya.

b. Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi

Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi adalah salah satu praktik yang dilakukan kepala sekolah inklusif dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Kepala sekolah dalam melakukan praktik ini perlu berkolaborasi dalam melakukan perencanaan dan implementasinya di sekolah, karena kolaborasi merupakan kunci pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mereka mengungkapkan bahwa:

“Dengan menyelenggarakan koordinasi kepada administrasi sekolah sekaligus pihak yang terkait dengan lembaga penyelenggara pendidikan inklusif” W6.K.JT1

“Pada setiap hari kamis, kami melaksanakan forum koordinasi dengan para guru. Pada forum tersebut guru bisa cerita masalah yang dihadapi dan kami cari solusi bersama, termasuk masalah ABK” W2. PS. BC

“Pertemuan guru secara resmi dilakukan 1 kali/bulan. Namun jika briefing untuk surat-surat dari Dinas Pendidikan, kami lebih sering dan tidak

terbatas. Kami membahas masalah di sekolah termasuk masalah inklusif, serta hal apa saja yang akan dilakukan sekolah ke depannya.” W5.DA.TR1.

“Rapat guru yang resmi minimal dilakukan sebulan dua kali, tema rapat bisa banyak termasuk membahas permasalahan guru dalam mengajar ABK. Rapat insidental jika ada urgensi maupun kegiatan mendadak.” W3.SL.MG

Berdasarkan kutipan wawancara di atas pula, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah melakukan perencanaan kolaboratif dengan melihat masalah atau kondisi yang sedang terjadi di sekolah yang ia pimpin kemudian menentukan tindak lanjut yang perlu diambil berdasarkan data dan kesepakatan bersama, dimana dalam pelaksanaan tugas kepala sekolah melakukan kolaborasi dan pendelegasian kepada guru dan staf sekolah untuk mengimplementasikan perencanaan. Masalah inklusif dan permasalahan pelayanan dan pengajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus menjadi topik bahasan yang terdapat di setiap pertemuan, karena hal tersebut sangat krusial dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Dilihat dari kutipan wawancara di atas pula, tiap sekolah memiliki kebijakan sendiri dan beragam terkait berapa kali mereka melakukan pertemuan dalam satu bulan, walaupun nantinya perencanaan yang kolaboratif ini tidak terikat waktu dan sifatnya fleksibel.

Selain dengan pihak internal sekolah dalam melaksanakan perencanaan kolaboratif, kepala sekolah juga perlu berhubungan dengan pihak-pihak di luar sekolah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pendidikan inklusif. Hal tersebut dikarenakan kunci keberhasilan pendidikan inklusif adalah melibatkan rencana kolaboratif - yang membawa para pemangku kepentingan yang berbeda ke meja untuk mengembangkan dan menyempurnakan implementasi untuk rencana sekolah (Theoharis, Causton, & Woodfield , 2015: 23). Pentingnya

berkolaborasi dengan pihak lain adalah memperlancar layanan inklusif yang diberikan oleh sekolah. Kepala sekolah yang melibatkan stake holder dalam pendidikan inklusi dapat memberikan pelayanan inklusif dengan lebih mudah.

Berdasarkan hasil penelitian, kepala sekolah terlibat dan berkolaborasi dengan pihak lainnya ketika ingin melakukan assesmen. Assesmen diperlukan karena untuk mengetahui mana saja peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hal ini termasuk dalam perencanaan treatment yang perlu diberikan kepada anak tersebut. Berikut adalah kutipan wawancara terhadap informan-informan:

“Kami bekerja sama dengan para ahli, dari UNY, UST, dan dengan Psikologi UII berkaitan dengan assesmen.” W2. PS. BC.

“ Disini assesmen nya bisa ke ULD atau kita kerjasama dengan SLB Negeri 1 Bantul.” W4.B.BR2.

“Saya menjalin hubungan yang baik dengan beberapa SLB di Yogyakarta” W3.SL.MG.

“ kami mendatangkan psikolog ke sekolah, kerjasama dengan SLB maupun Psikologi UGM” W5.DA.TR1

“Saat rapat bersama kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, diketahui pihak Dinas memfasilitasi pengajuan assesment anak-anak dan menerima laporan assesment mandiri dari pihak sekolah.” W1.P.TP

“Kita juga bekerja sama dengan ULD selaku lembaga yang handle assesmen, dan juga yang memberi pelatihan-pelatihan inklusif” W6.K.JT1

Merujuk pada kutipan wawancara informan-informan di atas, maka sekolah inklusif melakukan proses kolaborasi dengan lembaga eksternal untuk memperlancar kegiatan pelayanan inklusif di sekolah. ULD (Unit Layanan Disabilitas) menjadi lembaga yang paling banyak diajak berkolaborasi oleh sekolah inklusif dalam pemberian layanan inklusif, hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Kota Yogyakarta memfasilitasi dengan baik pelaksanaan pendidikan inklusif melalui lembaga ULD yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah inklusif dalam memastikan pemberian layanan inklusif terbaik. Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggung jawab atas kebijakan sekolah inklusif yang telah mereka cetuskan yang mana sekolah-sekolah negeri di Yogyakarta wajib menerima dan melayani ABK. Selain dengan ULD, kepala sekolah juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga independen lainnya yang masih bersangkutan paut dengan inklusif, seperti Universitas, Lembaga psikologi, maupun SLB. Sekolah dan SLB memiliki hubungan yang baik sehingga memperlancar pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah inklusif. Kesimpulan pada praktik ini adalah kepala sekolah memiliki kemampuan berkolaborasi dalam melakukan perencanaan dan implementasinya baik dengan pihak internal sekolah maupun *stakeholder* di luar sekolah.

c. Melakukan Audit Ekuitas

Kepala sekolah inklusif selalu berusaha untuk mewujudkan pelayanan yang adil bagi seluruh warga sekolah. Cara yang dilakukan kepala sekolah adalah menggunakan audit ekuitas. Menurut Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 23) audit ekuitas menjadi alat yang lebih banyak digunakan untuk dipahami oleh para pemimpin sekolah dengan mengumpulkan data lokal tentang sekolah mereka. Berikut kutipan-kutipan yang disampaikan informan:

“Dari awal siswa yang masuk ke kelas 1, semua perlu melakukan assesmen untuk mengetahui IQnya berapa” W4.B.BR2.

“Guru kan selama mengajar pasti memperhatikan bagaimana anak-anak didiknya setiap hari. Apabila ada guru yang merasa bahwa anak didiknya

tidak bisa dibimbing, maka anak tersebut dilakukan assesmen”
W5.DA.TR1

“Guru melakukan screening untuk kepentingan assesmen peserta didik untuk mengetahui apakah anak ini ABK atau tidak.” W6.K.JT1

“Saya inisiatif untuk melakukan assesmen kepada anak-anak yang sering dikeluhkan guru.” W1.P.TP.

Berdasarkan hasil penelitian, kepala sekolah mengumpulkan data lokal sekolah mereka demi bisa memberikan treatment yang tepat bagi peserta didik. Cara yang mereka tempuh adalah dengan memberikan assesmen kepada peserta didik. Assesmen adalah usaha untuk mengukur kemampuan peserta didik sehingga diketahui kebutuhan apa yang dimiliki peserta didik. Assesmen dilakukan secara psikologis dan dibawah naungan lembaga psikologi. Assesmen untuk mengetahui kebutuhan apa yang dimiliki peserta didik adalah assesmen dimana hasilnya mengetahui besaran nilai IQ yang dimiliki peserta didik peserta assesmen tersebut, nilai IQ itu nantinya menjadi modal menentukan kebutuhan apa yang ada pada diri peserta didik.

Terkait pemberian assesmen, kepala sekolah tidak hanya satu kali dalam melakukan assesmen. Hal tersebut dikarenakan untuk memastikan apakah treatment yang diberikan sudah sesuai atau belum, seperti kutipan wawancara dengan informan berikut:

“Diadakan pula assesmen ulang bagi anak yang dahulunya pada saat kelas satu/dua sudah melakukan assesmen untuk mengetahui perkembangannya.”
W5.DA.TR1.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh sekolah yang diteliti telah melakukan assesmen sebagai upaya melakukan audit ekuitas yaitu untuk mengumpulkan data

lokal sekolah mereka agar bisa mengetahui kebutuhan peserta didiknya, sehingga dapat adil dalam memberikan treatment kepada peserta didik.

Audit ekuitas juga berguna agar sekolah dapat dengan mudah untuk mencapai tujuannya. Tujuan sekolah inklusif adalah memberikan pelayanan yang adil dan maksimal kepada peserta didiknya. Kurikulum adalah wujud praktik audit ekuitas yang dilakukan kepala sekolah, dikarenakan kurikulum adalah pedoman dalam melakukan pengajaran dan evaluasi hasil pembelajaran terhadap peserta didik. Melihat kenyataan bahwa ABK memiliki kemampuan yang berbeda daripada siswa normal lainnya, maka pada pendidikan inklusif terjadi pemodelan kurikulum yang berbeda.

Adanya kurikulum modifikasi di sekolah inklusif berfungsi untuk membawa sekolah ke pelayanan yang adil, di mana anak-anak berkebutuhan khusus mendapat penyesuaian agar tidak ketinggalan jauh dalam pembelajaran dengan anak-anak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah yang diteliti telah melakukan kurikulum modifikasi di sekolah yang mereka pimpin, seperti kutipan salah satu informan:

“Kita modifikasi kurikulum terutama untuk ABK dalam indikator pencapaian dan penilaian. KKMnya tetap sama, hanya bobotnya yang berbeda.” W5.DA.TR1

Secara konkret, KKM 70 pada siswa normal maka siswa normal tersebut harus menguasai 10 kompetensi, sedangkan KKM 70 pada anak berkebutuhan khusus hanya perlu menguasai 5 kompetensi.

Membahas mengenai kurikulum merupakan tugas sekolah untuk dapat menentukan metode apa yang baik dan efektif digunakan bagi peserta didiknya. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat sekolah yang membedakan KKM bagi ABK dan anak-anak normal lainnya, seperti pada kutipan berikut:

“Kemampuan ABK tidak setara dengan anak normal. Oleh karena itu mereka memiliki kurikulum sendiri di sekolah ini. Baru kita mulai bentuk tahun ini dan sudah jadi. Ada dua kurikulum dalam setiap mata pelajaran, yaitu untuk anak normal dan ABK. Misalkan KKM anak normal 70, sedangkan KKM bagi ABK itu 40.” W6.K.JT1

Merujuk pada kutipan wawancara di atas, informan menggunakan perbedaan KKM bagi siswa ABK dan siswa normal. KKM ini merupakan kebijakan sekolah yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendamping khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan ABK mencapai KKM.

d. Mendesain Ulang Organisasi Sekolah

Sekolah inklusif sudah seharusnya menjadi organisasi yang tidak kaku dan selalu berkembang karena keberagaman di sekolah inklusif membuat semua harus diterima dan harus bekerjasama, sehingga dapat disimpulkan organisasi disesain ulang agar warga sekolah lebih mudah berkolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian, berikut kutipan wawancara informan-informan dalam menjalankan praktik mendesain ulang organisasi sekolah:

“Disini ada GPK. Jumlahnya ada tiga GPK. Tugasnya membantu guru jika guru ada kesulitan dan jika GPK dibutuhkan saat proses pembelajaran berlangsung, maka GPK dapat membantu guru biasa. Biasanya anak-anak yang berkebutuhan ini kesulitan dalam pembelajaran maka GPK akan dimintai tolong oleh guru kelas mendampingi, lalu ABK ini belajar bersama

teman-temannya dahulu, tapi jika sudah sulit untuk ditangani dalam kelas maka akan diajak belajar di Grey Rooms.” W5.DA.TR1

“Tentunya GPK nanti bekerja sama dengan guru kelas.” W6.K.JT1

“GPK melakukan pendampingan apabila ada guru yang kesulitan dalam mengajar, dan tiap GPK ada jadwal untuk masuk ke kelasnya walaupun jadwal fleksibel, maksudnya GPK tetap akan mendampingi jika benar-benar dibutuhkan walaupun bukan jadwalnya. Kerjasama lainnya yang dilakukan dgn guru kelas berupa membuat soal maupun materi. Terkadang juga ada GPK yang menggantikan tugas guru kelas jika guru kelas berhalangan mengajar.” W4.B.BR2

“Guru meminta GPK melakukan pendampingan pada saat pembelajaran berlangsung, nanti ada jadwalnya untuk GPK masuk ke kelas mana. Namun, jika guru butuh GPK secara urgent maka GPK siap masuk ke kelas itu.” W2.PS.BC

“Ada jadwal dimana dan kapan GPK ditempatkan di kelas. Namun, jika dalam kondisi guru membutuhkan GPK walaupun bukan di jadwal kelas tersebut, GPK bisa masuk ke kelas itu.” W1.P.TP

Berdasarkan penjelasan dari kepala sekolah sebagai informan di atas, diketahui kepala sekolah memfasilitasi adanya kerjasama antara guru dengan GPK. Bukti bahwa kepala sekolah memfasilitasi GPK dan guru umum untuk saling bantu adalah kepala sekolah tidak membatasi gerak mereka, melainkan menyusun jadwal bagi GPK untuk dapat masuk ke kelas walaupun jadwal ini nantinya akan bersifat fleksibel sesuai kondisi dan situasi yang terjadi di kelas saat itu yang menentukan apakah guru membutuhkan bantuan GPK atau tidak untuk menghandle anak berkebutuhan khusus.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, diketahui organisasi sekolah dilakukan desain ulang sehingga tidak kaku. Guru bisa dengan mudah berkolaborasi dengan siapa saja dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran inklusif. Kepala sekolah kemudian memfasilitasi guru dengan kemudahan kolaborasi. Sekolah menjadi

organisasi yang lentur, fleksibel tidak birokratis dan hirarkis bagi semua warga sekolah- kolaborasi, kerjasama, kerja tim bisa mudah dan nyaman dilaksanakan.

e. Membangun Tim Pengajaran

Pada pendidikan inklusif dipahami bahwa kelas yang heterogen membuat tidak ada pengajaran yang dikhususkan untuk ABK maupun yang dikhususkan untuk anak normal, karena segala pembelajaran telah dilakukan bersama dalam kelas. Semua pengajaran dilakukan atas dasar kerjasama staf pendidikan dan melakukan pengajaran bersama (Theoharis, Causton, & Woodfield, 2015: 27). Oleh karena itu diadakannya staf pengajaran yang membantu guru dalam melakukan pembelajaran di kelas yaitu GPK (Guru Pendamping Khusus).

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pendidikan inklusif yang maksima, Kota Yogyakarta ini memiliki ULD (Unit Layanan Disabilitas) yang berfungsi untuk mengurus segala hal berkaitan jalannya pendidikan inklusif, termasuk salah satunya adalah memfasilitasi GPK bagi sekolah-sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, sekolah telah mengusahakan adanya GPK sehingga terwujud adanya GPK yang membantu pelaksanaan pendidikan inklusif (W1.P.TP; W2.PS.BC; W4.B.BR2; W5.DA.TR1; dan W6.K.JT 1). Berikut adalah kutipan wawancara dengan informan-informan:

“Kami baru diberikan GPK oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2020. Sebelum-sebelumnya saya menunjuk guru kelas sekaligus menjadi GPK”
W2. PS. BC.

“Ada GPK dari Dinas Pendidikan berjumlah 4 orang.” W4.B.B32

“Membentuk Tim Khusus inklusif di sekolah. Tim ini terdiri dari guru dan karyawan sekolah secara umum, terutama melibatkan Guru Pendamping

Khusus (GPK). GPK di sekolah ini sekarang sudah ada 2 orang.” W6.K.JT1.

“Saat ini di SD kami ada satu GPK” W1.P.TP

“Ada tiga GPK. Masing-masing GPK menghandle dua kelas, yaitu kelas 1-2; kelas 3-4; dan kelas 5-6.” W5.DA.TR1

Dari kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memfasilitasi GPK kepada sekolah-sekolah inklusif. Namun masih ada hambatan yang terjadi ketika sekolah ingin mendapatkan GPK dari pihak Dinas Pendidikan melalui ULD, seperti informasi yang dikutip dari informan berikut:

“Saya bertindak cepat ketika mengetahui bahwa sekolah ini inklusi dengan melaporkannya pada pihak Dinas sehingga saya mendapat jatah GPK, jika tidak saya tidak akan mendapatkan jatah GPK seperti SD-SD lainnya.” W1.P.TP

Merujuk pada kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa penyediaan tenaga GPK oleh ULD selagi lembaga yang menaungi pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta masih sedikit yang bahkan membuat sekolah-sekolah perlu menunggu dan berusaha keras untuk mendapatkan jatah GPK/

Terkait GPK yang disediakan Dinas Pendidikan menjadi rebutan, bahkan kepala sekolah perlu menunggu, maka timbul permasalahan dan hambatan baru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Saya tidak pernah meminta GPK ke ULD karena pertama, kami tidak punya anak-anak yang berkebutuhan golongan “berat”, kami masih bisa menangani anak-anak ini. Kedua, kami tidak yakin apakah jika kami meminta, kami akan mendapatkan GPK.” W3.SL.MG

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa masih ada kepala sekolah yang tidak memberikan tenaga profesional pada pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya yang inklusif, hal tersebut dilatarbelakangi hambatan untuk meminta fasilitas GPK melalui ULD yang memakan waktu lama. Namun, kepala sekolah tersebut berupaya memberikan pengajaran inklusif dengan menjadikan semua guru kelas sebagai konselor sekaligus GPK, seperti kutipan wawancara berikut:

“Saya meminta guru kelas melayani pendidikan untuk semua. Guru berindak sebagai konselor dan guru juga sebagai GPK bagi anak yang membutuhkan” W3.SL.MG.

Merujuk pada kutipan wawancara di atas, perlu diingat bahwa guru kelas yang ditugaskan menjadi konselor di kelas berbeda dengan GPK. Hal ini tidak bisa disamakan mengingat GPK adalah guru yang dikhususkan untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

GPK menjadi unsur penting dalam jalannya pendidikan inklusif di sekolah, karena pengajaran di pendidikan inklusif dilakukan secara bersama. Hal ini menjadi penting mengingat perbedaan pemahaman dan kebutuhan yang ada pada diri anak normal sehingga anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perlakuan khusus pula, dan untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi anak berkebutuhan khusus adalah tugas GPK.

f. Kepemimpinan Guru

Salah satu ciri dari kepemimpinan inklusif di sekolah adalah adanya kepemimpinan guru. Secara singkat, kepemimpinan guru dapat dipahami sebagai guru dilibatkan menjadi pemimpin dalam melaksanakan pengajaran di kelas.

Menurut Waldron dan McLeskey (2010) yang dikutip Zapata (2015: 152) bahwa kepala sekolah harus memberdayakan guru untuk mengambil peran kepemimpinan, berbagi dan menganalisis data siswa, dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Benang merah dari kepemimpinan guru adalah guru memiliki wewenang atas kelasnya, berhak mengelola kelasnya dengan cara guru, dan sebagai pemimpin di kelasnya sekaligus memiliki hak untuk mengambil keputusan atas kelasnya.

Adapun penjelasan kepala sekolah sebagai informan terkait praktik kepemimpinan guru yang ia laksanakan di sekolah yang ia pimpin adalah sebagai berikut:

“Untuk anak kelas 1, karena kita tidak mengetahui bagaimana anak tersebut maka saya meminta guru melakukan pemetaan seperti siapa saja yang sudah bisa mengenal huruf, siapa yang sudah mengenal angka, dan siapa yang belum bisa sama sekali.” W3.SL.MG.

“Saat pandemi ini saya meminta semua guru kelas untuk memetakan siapa saja siswa yang bisa belajar daring, yang hanya bisa luring, dan bisa kedua” W3.SL.MG

Kepala sekolah memandang bahwa yang mengetahui bagaimana anak didiknya di kelas adalah guru kelas tersebut, oleh karena itu guru kelas diberikan kekuasaan untuk melakukan pemetaan bagaimana anak-anak didiknya dari segi kemampuan maupun sifat sehingga terkumpulnya data siswa yang kemudian dianalisis sebagai bahan pembuat kebijakan dan juga sebagai modal bagaimana guru akan mengelola kelasnya.

Kepala sekolah memberikan wewenang kepada guru untuk mengelola kelasnya karena guru yang memahami bagaimana kondisi kelasnya. Berikut adalah contoh praktik yang diterapkan:

“Guru bisa membawa anak yang sulit belajar ke suasana yang baru, contohnya membawa anak belajar di perpustakaan.” W1.P.TP

“Jika terdapat masalah, akan ditangani oleh guru kelas terlebih dahulu.” W1.P.TP

“Guru bisa mengundang orang tua apabila ada permasalahan anak.” W6.K.JT1

“Kadang-kadang terjadi bullying, lalu guru melakukan pendekatan dan akhirnya bisa dihandle.” W2.PS.BC.

Merujuk pada praktik kepemimpinan guru yang dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru diberikan kewenangan oleh kepala sekolah untuk menggunakan sikap kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Selain itu, kepala sekolah membangun dan menggunakan kelompok kepemimpinan guru tidak hanya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, tetapi juga untuk memimpin sesi pengembangan profesional (Zapata, 2015: 152). Oleh karena itu, sebagai upaya memaksimalkan praktik kepemimpinan guru maka kepala sekolah memfasilitasi guru untuk membantu pengembangan profesional guru lainnya dan sebagai narasumber dalam pelatihan tersebut, seperti praktik yang dilakukan oleh informan berikut:

“Salah satu guru kami, menjadi guru penggerak inklusif di Kota Yogyakarta. Beliau juga menjadi koordinator pelaksanaan inklusif di sekolah ini, dan di tingkat kota selalu menjadi narasumber tentang topik inklusif.” W5.DA.TR1

Dilihat dari kutipan di atas, kepala sekolah memfasilitasi guru di sekolahnya yang memiliki pemahaman pada topik tertentu memberikan pelatihan kepada guru

lainnya terkait topik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa guru dapat bertindak sebagai pemimpin. Selain kepada sesama guru, terdapat juga pemberian pelatihan oleh guru kepada orang tua ABK juga seperti kutipan berikut:

“Guru kelas satu memberikan pelatihan tentang ABK kepada orang tua atau wali murid, namun pelatihan ini hanya singkat dan ada di kelas masing-masing, bukan pelatihan yang diadakan sekolah namun hanya inisiatif guru-guru kelas 1.” W4.B.BR2.

Berdasarkan berbagai kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa guru kelas dapat memiliki inisiatif dan menjalankan ide atau inisiatifnya. Kepala sekolah memfasilitasi guru untuk mengelola kelasnya sedemikian rupa, karena guru yang memahami kelasnya, guru yang tahu kebutuhan kelasnya secara detail, dan guru diberi wewenang sebagai pemimpin dan menjalankan praktik kepemimpinannya juga pengambilan keputusan.

g. Membangun Kapasitas Staf

Dalam upaya membangun dan melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah secara maksimal, kepala sekolah perlu mengembangkan guru dan staf di sekolah. Perwujudan yang dilakukan dalam mengembangkan guru dan staf adalah kepala sekolah memberikan akses bagi mereka untuk belajar melalui berbagai media dan event seperti workshop, pelatihan, seminar, dan lain-lain. Hal tersebut sejalan dengan praktik yang telah dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif seperti kutipan sebagai berikut:

”Saya belajar bersama bapak-ibu guru disini tentang sekolah inklusif itu apa, kemudian kami juga menghadiri beberapa undangan workshop atau diklat tentang inklusif. Guru-guru disini kita tanamkan pula rasa menerima untuk

mengajari anak berkebutuhan khusus, dengan cara menambah keilmuan dan keterampilan mereka melalui diikutkan workshop dan diklat.” W5.DA.TR1

Menilik pada kutipan wawancara dengan kepala sekolah di atas, maka dalam menjalankan pendidikan inklusif tidak lupa kepala sekolah memberikan sesi pengembangan staf kepada guru di sekolahnya. Sesi pengembangan staf ini menjadi penting mengingat guru dan karyawan yang berhubungan langsung dalam melaksanakan pendidikan inklusif, mereka yang menjadi roda jalannya pendidikan inklusif di sekolahnya. Selain itu, penting bagi kepala sekolah untuk memberikan pemahaman mengenai inklusif kepada guru atau karyawan yang masih sulit untuk diajak bersama mengarah ke inklusif. Hal tersebut diungkapkan pada kutipan wawancara berikut:

“Yang saya lakukan terhadap guru-guru yang sering mengeluh itu saya ikutan workshop yang paling awal, termasuk juga untuk guru-guru yang baru masuk. Untuk staf kita ikutan pelatihan ketika ada pelatihan yang dilakukan untuk internal sekolah maka mereka tetap kita ikutkan.”W5.DA.TR1.

Pada kutipan wawancara di atas, pelatihan diberikan kepada guru lebih luas cakupannya hingga ke eksternal sekolah dibandingkan untuk staf karyawan yang hanya ikut pelatihan internal sekolah, hal ini dikarenakan guru memiliki hubungan lebih intens dan erat dengan peserta didik di kelasnya baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus.

Namun, dalam sesi pengembangan staf, sekolah tidak bisa melakukannya sendiri, ada peran dari pihak luar yang membantu pengadaan sesi pengembangan staf tentang inklusif. Pihak luar ini meliputi pihak pemerintahan melalui Kementerian dan Dinas Pendidikan serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sejalan dengan beragamnya pihak luar yang mengadakan sesi pengembangan

inklusif, maka topik pelatihan dan workshop yang diberikan juga beragam yang mana nanti merujuk pada satu tema besar yaitu bagaimana pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan kutipan wawancara para kepala sekolah selaku informan sebagai berikut:

“Pelatihan inklusif bagi guru diberikan oleh UNY selama 10 hari dengan materi SPPI dan juga materi dasar pendidikan inklusi seperti screening anak jika anak menunjukkan perilaku yang berbeda, dan materi permainan di kelas yang cocok bagi pembelajaran ABK.” W2.PS.BC.

“Ada pelatihan GPK. Bimtek dari ULD dan juga sharing-sharing bagaimana penanganan siswa inklusif dengan pihak ULD. Pelatihan inklusif diadakan dari ULD, namun saya sebagai kepala sekolah pernah mengikuti diadakan di SD Tumbuh tentang penanganan anak-anak inklusif.” W4.B.BR2.

“Pelaksanaan pelatihan pernah dilakukan dari Dinas Pendidikan dan juga LPMP. Pelatihan ke guru-guru lebih ke membuat assesmen, dan bagaimana deteksi dini anak-anak ABK. Dari hasil pelatihan, sudah diaplikasikan dalam kelas” W3.SL.MG.

“Pelatihan yang saya ikuti banyak mbak, namun yang paling saya ingat itu pelatihan SPPI. Saya memfasilitasi guru-guru untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan. SD ini guru-gurunya telah mendapatkan pelatihan (bimtek) tentang mengelola siswa ABK sebanyak dua kali yang kedua pelatihannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yang harapannya guru-guru bisa melakukan assesmen mandiri.” W1.P.TP.

“Kita mengadakan workshop tentang inklusif di sekolah ini dengan mendatangkan narasumber sebanyak dua kali dalam satu tahun. Workshop itu kadang-kadang dibiayai oleh Dinas Pendidikan, namun saat Dinas Pendidikan tidak ada bantuan ya kami menggunakan dengan anggaran sendiri.” W5.DA.TR1.

“Kita juga pernah mengada workshop inklusif di sekolah, yang mana segala ‘ubo rampe’nya difasilitasi ULD.” W6.K.JT1

Pada kutipan wawancara dari informan-informan di atas, dapat diketahui bahwa kepala sekolah melibatkan banyak kerja sama dan sumber daya dalam sesi pengembangan dan juga banyak topik yang dibahas.

Terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sesi pengembangan staf ini. Hambatan yang terjadi di lapangan merujuk pada hasil penelitian adalah kuota pelatihan inklusif yang sedikit dan terbatas untuk tiap sekolah sehingga tidak semua guru dan staf dapat mengikuti pelatihan inklusif maupun masih dapat mengikuti pelatihan inklusif walaupun tidak maksimal. Seluruh sekolah inklusif di kota Yogyakarta mengalami hambatan yang sama dalam pengembangan staf mereka. Adapun, yang diungkapkan oleh informan adalah sebagai berikut:

“Tiap tahun itu ada pelatihan inklusi. Namun karena banyak sekolah di kota yang harus ikut pelatihan, maka jumlah guru yang ikut pelatihan per sekolah dibatasi.” W3.SL.MG.

PENDAPAT KS LAIN

Merujuk pada kutipan wawancara di atas, maka kepala sekolah memngungkapkan bahwa pelatihan inklusif dibatasi padahal guru sebagai persona yang bersinggungan langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan pemahaman yang baik dan maksimal terkait pelaksanaan pendidikan inklusif.

Berdasarkan kutipan wawancara dari para kepala sekolah selaku informan, dapat disimpulkan bahwa praktik membangun kapasitas staf yang dilakukan kepala sekolah inklusif bisa meliputi beberapa kegiatan, di antaranya; workshop, bimbingan teknis (bimtek), dan *sharing-sharing* dengan stakeholder. Staf di sekolah yang lebih banyak diikutkan pelatihan untuk pengembangan pengetahuan inklusif adalah guru karena guru yang berhubungan langsung dengan peserta didik setiap harinya, sedangkan untuk karyawan juga diikutkan pelatihan namun terbatas. Topik yang dibahas dalam pelatihan inklusif adalah topik tentang pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah. Namun, sekolah juga memiliki

kesempatan yang terbatas untuk mengikutkan stafnya ke pelatihan inklusif karena banyaknya sekolah yang membutuhkan pelatihan inklusif juga. Hambatan tersebut membuat tidak semua guru dan staf di sekolah belum semua mendapatkan pelatihan inklusif, tetapi bukan menjadi masalah yang besar karena dalam pelaksanaannya guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan inklusif sangat membantu guru-guru yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan inklusif yang mana diwujudkan melalui proses kolaboratif.

h. Dukungan Emosional dan Apresiasi

Pengembangan staf saja dirasa tidak cukup dalam menjalankan pendidikan inklusif. Guru dan karyawan tidak hanya butuh dukungan intelektual saja, melainkan mereka juga membutuhkan dukungan emosional dan apresiasi. Kepala sekolah dalam penelitian Zapata (2016: 153) menyoroti pentingnya menghadapi kebutuhan sosial emosional karyawan mereka. Guru memiliki tantangan dalam melakukan pembelajaran di kelas yang heterogen di mana anak normal dengan anak berkebutuhan khusus ada di satu kelas. Hal tersebut sejalan dengan teori kepala sekolah berbicara tentang pentingnya memberikan nasihat kepada guru baru termasuk untuk mengajar secara akademik dan untuk mendengarkan kekecewaan mereka (Zapata, 2016: 163). Berikut adalah kutipan hasil wawancara kepala sekolah:

“Saat rapat, saya mendengarkan keluh kesah guru juga. “ W3.SL.MG

“Saya sering tanya bagaimana perkembangan anak berkebutuhan kepada guru-guru” W3.SL.MG.

Merujuk pada teori praktik dukungan emosional dan apresiasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka kepala sekolah mengadakan diskusi dengan guru-guru terkait apa yang mereka hadapi. Kepala sekolah mengadakan sesi tanya jawab setiap hari dengan guru dan staf sekolah, tidak hanya membahas seberapa baik pengajaran dan dukungan untuk siswa serta bekerja secara kolaboratif, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan emosional karyawan (Zapata, 2016: 153).

Praktik kepala sekolah yang dilakukan seperti di atas menunjukkan bahwa kepala sekolah peduli akan kondisi guru. Hal ini mendorong guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan mudah, karena mereka menyadari mereka tidak sendiri. Pada praktik dukungan emosional dan apresiasi, kepala sekolah ikut merayakan keberhasilan para guru dan berada bersama guru ketika guru sedang tidak mengalami kesulitan dalam pengajaran. Seperti apa yang dilakukan oleh informan-informan pada kutipan wawancara berikut:

“Saya mengarahkan bagaimana cara membina anak-anak berkebutuhan khusus dan meminta GPK untuk sharing dengan guru kelas sebagai upaya pemecahan masalah tersebut.” W4.B.BR2.

Sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh kepala sekolah di atas, di mana kepala sekolah memperhatikan kesulitan guru saat melakukan pengajaran, kepala sekolah juga selalu bersama dengan melakuakn hal preventif agar guru tidak mengalami kesulitan yang berarti. Tindakan preventif yang dilakukan seperti memastikan bahwa guru tidak sendirian dalam melaksanakan pendidikan inklusif karena kepala sekolah memberikan nasihat dan petunjuk agar guru dapat mencapai keberhasilan dalam menjalankan pendidikan inklusif.

“Guru harus siap jika anak-anak khusus membutuhkan pelayanan. Jika memang tidak bisa terlayani, silahkan konsultasi ke saya” W3.SL.MG.

“Waktu rapat saya selalu memotivasi kepada guru-guru agar mampu memberikan pelayanan inklusi yang maksimal dengan kondisi inklusi yang seperti ini.” W1.P.TP.

“Saya sebagai kepala sekolah kemudian memberikan petunjuk kepada guru untuk tidak perlu berpikiran kencang tentang hasil belajar siswa jika tidak maksimal, tugas guru itu mengajarkan materi semaksimal mungkin dan untuk hasilnya kita pasrahkan pada Tuhan.” W1.P.TP.

“Kita selalu dalam pertemuan ataupun di setiap kali kita ngumpul-ngumpul saya memberikan wejangan dengan pendekatan yang lebih personal” W5.DA.TR1.

Adapun kutipan-kutipan wawancara dengan para informan di atas menunjukkan bahwa kepala sekolah peduli terhadap guru, kepala sekolah memberikan nasihat dan wejangan agar guru dapat mencapai keberhasilan pengajaran dan guru juga selalu dibersamai oleh kepala sekolah saat mereka mengalami kesulitan. Kepala sekolah bertanya tentang bagaimana pengajaran yang dilakukan selama ini kepada guru sehingga guru-guru terdukung secara emosional.

i. Menggunakan Data dalam Pengambilan Keputusan

Menggunakan data dalam pengambilan keputusan sekolah mencakup bagaimana kepala sekolah menentukan ke arah mana sekolah berjalan berdasarkan realita yang ada di sekolah, karena diketahui untuk membawa sekolah ke arah yang lebih baik maka diperlukan sistem data. Kepala sekolah benar-benar memulai melihat data siswa, dan siapa yang tidak sukses di sini, dan mengapa

mereka tidak menjadi berhasil untuk memandu pengajaran, penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas sekolah (Waldron, McLeskey & Redd , 2011: 57).

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tentu saja data menjadi sistem penting dan *drive* bagi sekolah dalam melihat bagaimana siswa dan kondisi lingkungannya. Data yang dimiliki sekolah dapat berupa data hasil assesmen siswa data perkembangan siswa di kelas, data nilai siswa dan juga hasil ujian siswa yang kemudian nanti akan dilihat bagaimana memberikan perbaikan maupun pengembangan pada anak tersebut. Hal ini dilakukan oleh para informan sebagaimana wawancara yang peneliti kutip berikut:

“Data hasil assesmen berupa IQ anak-anak ini digunakan untuk pegangan guru agar mengetahui bagaimana mengetahui treatment yang harus dilakukan.” W3.SL.MG

“Screening awal kami lakukan dari gesture, kemampuan, dan fisik. Setelah kami menduga bahwa anak itu berkebutuhan khusus, maka kami lanjut berkomunikasi dengan orang tua untuk memastikan.” W3.SL.MG

“Saya juga menyampaikan keluhan kesah yang disampaikan orangtua tanpa nama yang dikirmkan di kontak WA saya sebagai bahan diskusi bersama.” W3.SL.MG.

Terkait wawancara di atas, data yang dikumpulkan berupa bagaimana kemampuan peserta didik yang mana menunjukkan bahwa kepala sekolah menggunakan data untuk memberikan treatment yang tepat bagi peserta didik. Tujuan dari pemberian treatment ini agar sekolah berhasil memberikan pengajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Secara lebih lanjut, sistem data yang telah ada bisa mengetahui dan memberikan gambaran apakah sekolah bisa melayani anak tersebut atau tidak, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“anak itu tidak bisa baca tulis, lalu kami tidak bisa melanjutkannya, sehingga kami tugaskan guru untuk jalan-jalan dengan anak tersebut ke

SLB dan mencoba kegiatan dan fasilitas disana. Jika anak itu merasa senang dan cocok dengan SLB tersebut, maka kami pindahkan anak itu ke SLB tersebut dengan persetujuan orang tua.” W2.PS.BC

“Dahulu pernah ada yang tidak terlalu mampu untuk jalan, lalu kami mengambil tindakan dengan memberi pegangan di tangga sehingga anak itu bisa pegangan di tangga waktu naik atau turun tangga.” W2.PS.BC

“Kalau dengan saya, saya sampaikan dengan data dan cerita guru, misalnya “dari catatan guru kelas 1 ke saya, guru sangat sulit melayani anak bapak-ibu.” W3.SL.MG

“Dulu pernah ada siswa yang hasil assesmennya menunjukkan tingkat lebih parah daripada slow learner. Pada kasus itu, anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran maupun melakukan aktivitas sehari-hari.” W3.SL.MG

Berdasarkan pada kutipan wawancara di atas, bahwa sistem data dapat membantu sekolah untuk mengambil keputusan dalam menentukan apakah anak berkembang atau tidak. Dengan sistem data tersebut, juga dapat diketahui alasan mengapa anak tidak dapat berkembang. Pada akhirnya, apabila sekolah mendapatkan data yang mendukung bahwa anak tidak mengalami perubahan yang baik, maka anak tersebut tidak dapat dilayani.

Di sisi lain, sistem data menunjukkan bagaimana melakukan pengembangan pada anak berkebutuhan khusus sehingga tidak terjadi kasus untuk memindahkan anak ke sekolah lain. Sistem data juga digunakan sebagai bahan kepala sekolah berbicara dengan guru mengenai siswa mereka dan bagaimana mereka maju. Kepala sekolah inklusif percaya semua anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tugas sekolah adalah untuk mengembangkan potensi mereka. Berikut kutipan wawancara dengan kepala sekolah selaku informan:

“Saya melihat di sekolah ini untuk mengembangkan akademiknya cukup sulit, maka saya mengembangkan non akademiknya.” W1.P.TP

“Kita ikutkan pelatihan vokasi yang diadakan oleh ULD, misalnya pembuatan roti, donat. Selain itu, sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan

seperti membuat batik dan telur asin. Itu semua dilakukan karena jika tetap dilanjutkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, harapannya juga sulit maka kita berikan vokasi agar bisa untuk hidup.” W5.DA.TR1

“ULD menyediakan dana *Lifeskills* yang biasanya kita ambil dan kita berikan pelatihan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, misalkan pelatihan menjahit maupun membuat pizza agar mereka memiliki kecakapan hidup yang baik. Bimbingan minat dan bakat juga kami lakukan. Kami melihat kemampuan siswanya apa kemudian kita bimbing. Ada siswa ABK mendapatkan juara bercerita pada tingkat nasional.” W4.B.BR2

“Ada pelatihan membuat puisi kepada anak ABK di Dikpora.” W1.P.TP

“Ada pelatihan vokasi untuk anak-anak, misalkan seperti membuat roti dan membuat batik. ULD yang memfasilitasi, kita mengajukan anaknya siapa saja.” W6.K.JT1

Merujuk pada kutipan-kutipan wawancara di atas, maka sistem data dapat mengarahkan kepala sekolah untuk membawa peserta didiknya yang berkebutuhan maju, dan membawa anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi mereka. Sekolah menjalankan fungsinya untuk mengembangkan potensi peserta didik.

Sistem data selain berguna untuk mengetahui pengajaran yang baik, treatment yang tepat, kondisi anak, dan bagaimana cara membawa anak maju, juga membicarakan tentang alokasi sumber daya di sekolah. Sumber daya seperti apa dan bagaimana yang harus diwujudkan oleh kepala sekolah di sekolah yang ia pimpin, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang mana dapat diketahui melalui sistem data. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa sumber daya fisik dan non fisik. Sumber daya yang diadakan bertujuan untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus ke kemudahan dalam melakukan aktivitas di sekolah. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh informan-informan berikut:

“Untuk anak low vision kita carikan bantuan kacamata dengan beasiswa, kemudian ketika ujian akan diberikan soal dengan font yang lebih besar dan

juga tambahan waktu serta penjelasan yang lebih panjang bagi anak-anak slow learner. Untuk anak-anak Tuna Daksa, saat ujian tetap sama dengan siswa normal namun dia tidak mengikuti pembelajaran dan ujian yang banyak kegiatan fisiknya.” W5.DA.TR1

“Kami memiliki anak yang kebutuhannya low vision, dia pintar dan lancar membaca, namun saat membaca memang mata dia sangat dekat dengan tulisan. Oleh karena itu, kami mensiasatinya dengan membesarkan font soal ketika ujian.” W3.SL.MG.

“Mengapa saya mengangkat GPK mandiri? Karena saya merasa para orang tua di SD TP kurang wawasan mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini, berbeda dengan orangtua di sekolah lain yang mau mengangkat GPK mandiri. Sehingga, akhirnya sekolah yang memfasilitasi pengangkatan GPK.” W1.P.TP

Melihat kutipan wawancara dari informan-informan di atas, sistem data diketahui dapat memudahkan kepala sekolah. Sistem data wajib digunakan oleh kepala sekolah inklusif, yang mana diketahui sistem data sangat membantu untuk bahan kepala sekolah berbicara dengan guru mengenai siswa mereka, bagaimana membawa siswa maju, seberapa baik mereka mengajar dan tentang sumber daya apakah yang sekolah butuhkan.

j. Memastikan Hak Suara Bagi Semua

Sekolah inklusif memiliki keberagaman sehingga diperlukan toleransi yang tinggi. Sekolah inklusif adalah komunitas dimana manusia dengan segala yang ia miliki berada pada satu komunitas dengan manusia lain. Hal ini juga berlaku bagi ide dan pikiran. Dalam sekolah inklusif menjadi hal yang penting agar semua orang memiliki hak yang sama untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Burbules (1993) dalam Ryan (2006: 11) setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, untuk menghormati anggota lain, hak untuk berbicara

dan merasa aman untuk berbicara; semua ide harus ditoleransi dan mengalami penilaian yang adil.

“Guru-guru setelah mengajar biasanya mengeluh tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau istirahat kita kumpul sambil makan-makan dan cerita-cerita. Jika ada guru yang ingin berbagai keluh kesah dengan saya saat itu juga maka saya siap” W5.DA.TR1.

“Pada setiap hari kamis, kami melaksanakan forum koordinasi. Berbagi masalah untuk mendapatkan usulan dari guru-guru lain” W2.PS.BC

“Guru-guru bisa sharing masalah dan solusi.” W6.K.JT1

“Di pertemuan. guru-guru bebas bercerita tentang keluhan dan apa yang ia alami di kelas, termasuk keluhan tentang anak-anak berkebutuhan khusus yang cukup sulit untuk diajarkan.” W4.B.BR2

“Saya mendengar keluhan guru-guru tentang anak didiknya yang susah untuk diajarkan materi dan adanya kasus anak yang tidak naik kelas sampai dua kali.” W1.P.TP1

Merujuk pada kutipan-kutipan wawancara di atas dengan para informan, maka dapat diketahui kepala sekolah melaksanakan praktik memastikan hak suara bagi semua. Kepala sekolah tidak membatasi siapa saja yang ingin bercerita dengan kepala sekolah. Kepala sekolah terbuka kepada guru sehingga guru menjadi terbuka kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mendengarkan masalah yang dihadapi guru selama pembelajaran di pendidikan inklusif ini.

Hak suara bagi guru bukan sekedar bercerita tentang masalah yang dia hadapi. Memastikan hak suara berarti juga memastikan guru dan karyawan sekolah menyampaikan usulan demi kebaikan sekolah ke depannya. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah perlu mendengar ide yang guru sampaikan, karena tidak ada yang salah. Kepala sekolah perlu demokratis dalam hal ini. Proses bertukar ide dan saling mendengarkan dapat dilakukan dalam dialog, seperti

contohnya pada pertemuan. Hal ini dapat digambarkan pada kutipan wawancara berikut:

“Kita saling musyawarah. Kalau ambil kebijakan kita ambil bersama dengan bapak ibu guru semuanya karena kan yang akan melaksanakan kebijakan tersebut ya kita semua bersama-sama.” W5.DA.TR1

Kunci agar setiap warga sekolah dapat menyampaikan suaranya yaitu adanya komunikasi. Komunikasi yang baik perlu dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah dapat menggunakan media yang ada telepon, saling berkunjung, bertukar informasi dengan orang, menggunakan survei untuk mengumpulkan informasi tentang keinginan masyarakat, menggunakan buletin, koran sekolah, dan pertemuan untuk mendapatkan informasi ke dalam komunitas, dan mengundang orang tua dan kelompok masyarakat ke dalam sekolah (Ryan, 2003 dalam Ryan, 2006: 11). Berikut adalah kutipan wawancara dengan informan:

“Strateginya kami melakukan komunikasi apabila ada kesulitan, teratasi” W2.PS.BC

“Saya membuka link WA saya 24 jam. Wali murid dapat curhat dan menyampaikan kritik saran kepada saya bahkan tanpa perlu menyertakan nama pengirim pesan. Jadi saya bisa mengetahui bagaimana keinginan orangtua kepada sekolah. Curhatan berupa keluhan kesah tentang anak murid lain, tentang guru, bahkan tentang saya. Setiap hari pasti ada yang curhat, walaupun itu hanya hal kecil” W3.SL.MG.

Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara dengan para kepala sekolah selaku informan di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusif yang baik melaksanakan praktik memastikan hak suara bagi semua. Hak suara yang dimaksud bisa berupa keluhan maupun ide dan gagasan. Kepala sekolah perlu mengkondisikan komunikasi yang baik antar warga sekolah, orang tua, bahkan kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan sekolah inklusif tersusun atas

keberagaman dan pastinya memiliki keberagaman masalah dan ide, sehingga kepala sekolah perlu mengatur itu semua untuk menjadikan sekolah maju.

B. Pembahasan

Adapun pembahasan yang didasarkan pada hasil penelitian, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pandangan Kepala Sekolah terhadap Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kesadaran dari seorang pemimpin sekolah dalam mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraannya. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan pandangan yang berpihak pada pendidikan inklusif agar dapat memaksimalkan penyelenggaraannya. Pandangan yang dibutuhkan adalah pandangan yang memandang bahwa pendidikan inklusif perlu diselenggarakan dengan komitmen yang kuat, ikhlas, dan tanpa kompromi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Kugelmas & Ainscow (2004: 137) yaitu:

“hal-hal yang perlu ada di sekolah agar sekolah menjadi inklusif adalah motivasi awal untuk inklusi didukung oleh sumber daya internal, komitmen tanpa kompromi dan percaya pada inklusi,...”

Berdasarkan teori di atas, maka kepala sekolah perlu memiliki pandangan dalam melaksanakan pendidikan inklusif penuh komitmen dan tanpa kompromi. Namun, pandangan yang dimiliki oleh kepala sekolah bisa berbeda dikarenakan pandangan seseorang dipengaruhi banyak faktor. Pandangan dibentuk melalui pengalaman, ilmu pengetahuan, dan latar belakang seseorang.

Untuk menjadi kepala sekolah yang inklusif maka memerlukan seseorang yang visioner. Villa and Thousand (2013: 13) dalam Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 20) mengungkapkan bahwa:

“Perubahan sistemik menuju pendidikan inklusif membutuhkan pemimpin yang visioner dan bersemangat yang mau membangun konsesus dalam tujuannya menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk semua pelajar.”

Lebih lanjut lagi, dipaparkan dalam Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 21) yang mengungkapkan bahwa para pemimpin perlu konsistensi dalam visi mereka untuk bergerak menuju sekolah yang sepenuhnya inklusif.

Merujuk pada pendapat di atas, maka kepala sekolah perlu berpandangan bahwa pendidikan inklusif berarti menerima dan terbuka terhadap perbedaan serta pandangan bahwa semua anak dapat mengenyam pendidikan yang adil dan sama. Sebagaimana telah dijelaskan pada hasil penelitian, bahwa informan W1.P.TP memiliki pandangan bahwa sekolah memang seharusnya inklusif secara maksimal, yang mana melihat pada pernyataan tersebut informan W1.P.TP memiliki komitmen penuh dan tanpa kompromi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Terdapat banyak faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi pandangan seseorang dalam pendidikan inklusi. Pendidikan dan pengalaman sangat berpengaruh dalam menciptakan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Informan W1.P.TP memiliki latar belakang pendidikan SPGLB selama satu semester, hal ini sangat berpengaruh pada pandangannya terhadap pendidikan inklusif. Namun, sebagai kepala sekolah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan SPGLB tentunya memerlukan pelatihan inklusif untuk membentuk pemahaman terkait

inklusi pada dirinya Sebagaimana hasil penelitian, pelatihan inklusif menjadi komponen penting yang memberikan pengaruh terhadap pemahaman dan kapasitas kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif yang mana dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan inklusif yang mereka dapatkan dari lembaga ULD, Universitas, maupun Lembaga Psikologi.

Informan W2.PS.BC; W4.B.BR2; W5.DA.TR1; W6.K.JT1 pada hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif pada awalnya sebatas sebagai wujud kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, namun pelatihan inklusif memberikan pemahaman mengapa pendidikan inklusif penting untuk diselenggarakan. Informan W2.PS.BC; W4.B.BR2; W5.DA.TR1; W6.K.JT1 pada akhirnya memiliki pandangan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus jangan sampai tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sekolah inklusif perlu memfasilitasi pendidikan yang ramah, tidak diskriminatif serta selalu berusaha memberikan pelayanan sesuai kebutuhan siswa.

Pandangan merupakan pemrosesan apa yang dialami dan dirasakan oleh orang tersebut yang akhirnya berbuah pada suatu pikiran. Apabila telah menerima pendidikan inklusif, maka kepala sekolah harus menjalankan dengan sepenuhnya tanpa ada batasan yang dibuat. Booth & Ainscow (2002) dalam Kugelmas & Ainscow (2004: 140) memperjelasnya sebagai kepala sekolah yang menerima sepenuhnya tanpa ada batasan yang dibuat:

“...sejauh mana nilai-nilai ini meliputi penerimaan dan perayaan perbedaan dan komitmen untuk menawarkan kesempatan pendidikan untuk semua siswa”

Kepala sekolah yang memberikan batasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah yang ia pimpin dapat dikatakan bahwa kepala sekolah tersebut memiliki pandangan negatif terhadap pendidikan inklusif. Melihat pada hasil penelitian, informan W3.SL.MG memberikan syarat dan ketentuan dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolahnya, yaitu memberikan batasan pada ketunaan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh sekolah.

Pandangan terhadap pendidikan inklusif yang timbul disebabkan oleh banyak hal. Termasuk dalam menentukan arah pandang itu sendiri, ideologi diri juga berpengaruh terhadapnya. Kepala sekolah yang menganggap pendidikan inklusif harus memiliki syarat dan ketentuan tertentu akan membawa pengaruh inklusif di sekolah yang ia pimpin menjadi tidak baik dan tidak maksimal.

2. Praktik Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Sebagaimana landasan teori yang digunakan pada teori ini, yaitu merujuk pada asimilasi teori-teori tentang kepemimpinan inklusif di sekolah. Adapun berdasarkan teori-teori tentang kepemimpinan inklusif di sekolah, maka praktik kepemimpinan inklusif di sekolah dapat dipersingkat menjadi (1) Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif, (2) Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi, (3) Melakukan audit ekuitas, (4) Mendesain ulang organisasi sekolah, (5) Kepemimpinan guru, (6) Membangun tim pengajaran, (7) Membangun kapasitas staf, (8) Dukungan emosional dan apresiasi, (9) Menggunakan data dalam pengambilan keputusan, dan (10) Memastikan hak

suara bagi semua. Sehingga, dalam penelitian ini bagian pembahasan akan merujuk pada asimilasi teori-teori berikut.

Hasil penelitian yang akan dibahas kali ini menunjukkan strategi-strategi dan praktik-praktik kepemimpinan kepala sekolah di sekolah inklusif kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, yang mana data yang didapatkan mencakup pada: menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif, terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi, melakukan audit ekuitas, melakukan audit ekuitas, mendesain ulang organisasi sekolah, kepemimpinan guru, membangun tim pengajaran, membangun kapasitas staf, dukungan emosional dan apresiasi, menggunakan data dalam pengambilan keputusan, dan memastikan hak suara bagi semua

a. Menetapkan Visi yang Tegas dan Jelas terkait Inklusif

Di sekolah umum maupun sekolah khusus, sekolah berjalan untuk dapat meraih visi sekolah yang telah ditentukan. Beberapa sekolah inklusif akan memiliki visi inklusif yang sama, yaitu melayani peserta didik berdasarkan potensi dan kebutuhan yang dimiliki.

Pada praktik ini, mendeskripsikan ketegasan kepala sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusif di sekolah yang ia pimpin, seberapa besar tekad kepala sekolah untuk dapat menjalankan sekolah inklusif secara maksimal, dan juga menunjukkan apakah kepala sekolah menjalankan sekolah inklusif dengan sepenuh hati. Berikut pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti:

- 1) Kepala sekolah menyusun visi sekolah yang inklusif dan membangun konsesus bersama

Pada pelaksanaan pendidikan inklusif, kepala sekolah membuat ketegasan bahwa sekolah yang ia pimpin adalah sekolah inklusif. Hal itu diwujudkan dalam bentuk konkret penyusunan visi-misi sekolah. Bukan visi-misi sekolah yang biasa saja yang diperlukan pada sekolah inklusif, namun yang diperlukan adalah visi-misi sekolah yang secara tersirat dapat menggambarkan bahwa sekolah ini adalah sekolah inklusif. Visi-misi di sekolah tegas dan jelas dan menunjukkan komitmen bahwa sekolah tersebut mengedepankan pendidikan untuk semua, melayani segala potensi peserta didik, dan pendidikan yang adil. Hal ini sejalan dengan pernyataan terkait visi yang perlu dimiliki sekolah diungkapkan dalam Theoharis, Causton , & Woodfield (2015: 21) yang mengungkapkan bahwa visi kepemimpinan yang kuat tentang sekolah inklusif sangat penting untuk keberhasilan implementasi pendidikan inklusi.

- 2) Kepala sekolah membangun kebersamaan dalam visi inklusif

Visi inklusif yang telah ada tentunya dapat dijalankan dengan maksimal apabila visi tersebut diketahui oleh khalayak luas, termasuk warga sekolah. Kepala sekolah harus mampu mendistribusikan visi inklusif kepada guru-guru dan para staff sehingga pelayanan inklusif di sekolah dapat berjalan dengan maksimal. Untuk menunjukkan ketegasan visi inklusif yang dimiliki sekolah, dilakukan dengan menempel visi inklusif pada dinding-dinding sekolah dan dalam pertemuan-pertemuan dengan guru dan staf, kepala sekolah mengingatkan

pelayanan inklusif yang perlu diberikan sekolah. Cara-cara tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjalankan visi inklusif di sekolah, karena hal tersebut adalah kemutlakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti yang ditegaskan oleh Waldron, McLeskey & Redd (2011: 59) bahwa visi bersama dan tingkat pencapaian inklusi yang tinggi untuk semua siswa adalah mutlak.

3) Kepala sekolah menguatkan visi inklusif melalui pelatihan

Kepala sekolah memahami bahwa untuk memiliki pemahaman yang kuat terkait inklusif memerlukan proses belajar. Kepala sekolah perlu paham proses apa saja yang dapat membawa sekolah ke arah yang sepenuhnya inklusif. Kepala sekolah memerlukan proses belajar, yang mana pada konteks ini adalah mengikuti pelatihan. Kesiapan kepala sekolah dalam mengikuti pelatihan inklusif menggambarkan bahwa kepala sekolah menginginkan dapat menerapkan visi yang tegas dan jelas tentang inklusif di sekolah yang dipimpin.

Menurut Theoharis, Causton, & Woodfield (2015: 25), tiga bidang yang menjadi perhatian agar sekolah berjalan sesuai visi dan tujuan adalah : 1) Struktur sekolah, yaitu bagaimana sekolah mengatur sumber daya manusia yang ada termasuk siswa, 2) iklim sekolah, dan 3) Memenuhi kebutuhan semua siswa. Untuk memahami bidang-bidang ini, diperlukan pelatihan yang perlu diikuti kepala sekolah agar mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif secara baik.

Pelatihan inklusif bagi kepala sekolah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan melalui ULD dan juga terdapat pelatihan-pelatihan inklusif yang difasilitasi oleh

lembaga pendidikan lainnya seperti Universitas dan SLB. Pelatihan secara general dapat digambarkan mengajarkan bagaimana pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah. Pada bagian ini, kepala sekolah merasa benar-benar diperhatikan oleh pihak Dinas Pendidikan karena Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang menaungi sekolah inklusif secara sadar melakukan pengembangan kepala sekolah dengan mudah sehingga kepala sekolah juga dapat mempertajam visi inklusif mereka melalui pelatihan-pelatihan inklusif tersebut.

b. Terlibat dalam Perencanaan Kolaboratif dan Implementasi

Pelaksanaan pendidikan inklusif harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk ke implementasinya. Perencanaan adalah hal-hal apa saja yang akan dilakukan selama satu waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan implementasi adalah eksekusi dari apa yang telah direncanakan. Praktik di kepemimpinan inklusif adalah adanya keterlibatan kepala sekolah dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi. Kepala sekolah terlibat dalam perencanaan dan memfasilitasi proses perencanaan secara demokratis dan transparan dengan tim yang representatif. Kolaboratif disini memiliki sebagai cara-cara yang memerlukan proses interaksi dan komunikasi semua pihak orang dewasa dan anak - anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses kolaboratif yang dilakukan kepala sekolah dalam perencanaan dan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kepala sekolah dalam penelitian ini berkolaborasi dengan warga sekolah dan *stakeholder* lainnya dalam perencanaan dan implementasi

pendidikan inklusif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kugelmass (2001) dan Hunt, HiroseHatae, Doering, Karasoff & Goetz (2000) dalam Kugelmas & Ainscow (2004: 140) yang menjelaskan pengembangan kolaboratif di mana staf sekolah terlibat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka kolaboratif disini dimaksudkan bahwa kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berikut pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti:

- 1) Kepala sekolah terlibat dalam perencanaan bersama guru selaku tim yang representatif.

Kepala sekolah tidak bisa melakukan perencanaan pendidikan inklusif sendiri di sekolah yang ia pimpin. Kepala sekolah perlu melibatkan pihak-pihak yang dinilai berdampak dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Kepala sekolah terlibat dalam perencanaan dan memfasilitasi proses perencanaan secara demokratis dan transparan dengan tim yang representatif yang terdiri atas administrator sekolah, guru umum, guru pendamping khusus, dan anggota staff lainnya (Theoharis, Causton, & Woodfield, 2015: 22).

Guru merupakan salah satu anggota dari tim yang representatif dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Guru tentu saja berhubungan langsung dengan anak-anak baik itu anak-anak normal hingga anak-anak berkebutuhan khusus. Kepala sekolah terlibat dan berkolaborasi dengan guru melakukan perencanaan melalui forum resmi pertemuan rutin. Oleh karena itu, setiap sekolah

inklusif yang diteliti memiliki jadwal pertemuan rutin antara guru dengan kepala sekolah.

Hal yang dibahas pada pertemuan guru adalah seputar apa saja yang akan dilakukan sekolah ke depan, dan dengan siapa saja yang membantu menjalankan program-program ke depan. Jelas pada hal ini, kepala sekolah terlibat pada perencanaan kolaboratif. Sifat kolaboratif kepala sekolah dengan para guru ini berimplikasi pada jalannya pendidikan inklusif di sekolah sehingga pemimpin yang berkolaborasi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan inklusif.

2) Kepala sekolah berkolaborasi dengan lembaga yang kompeten dalam pendidikan inklusif

Kolaborasi yang dilakukan oleh kepala sekolah perlu membawa manfaat bagi sekolah. Kolaborasi dengan lembaga yang berkompeten sebagai penyelenggara pendidikan khusus tentunya berimplikasi pada sistem pelayanan pendidikan inklusif di sekolah. Contoh lembaga yang berkolaborasi di sekolah yakni UNY, UST, Psikologi UII, dan dengan SLB. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga tersebut dinilai penting karena kepala sekolah tidak bisa melaksanakan pendidikan inklusif dengan sendiri, perlu bantuan lembaga-lembaga yang memang berwenang dalam pendidikan inklusif.

Kepala sekolah berkolaborasi dengan lembaga yang kompeten dalam pendidikan inklusif karena berkaitan dengan assesmen intelegensi peserta didik. Assesmen peserta didik tidak boleh dilakukan oleh lembaga yang sembarang,

membutuhkan lembaga yang tepat dalam melakukan assesmen. Salah satu lembaga yang kredibel dalam melakukan assesmen. Hal yang biasa dilakukan oleh sekolah ada meminta bantuan lembaga-lembaga yang berwenang terkait assesmen peserta didik. Kepala sekolah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan assesmen kepada peserta didik di sekolah inklusif untuk mengetahui kebutuhan apa yang ada pada peserta didik tersebut sehingga dapat memberikan treatment yang tepat. Hal yang dilakukan kepala sekolah ini sejalan dengan pendapat Kugelmas & Ainscow (2004: 140) bahwa sifat kolaboratif yang menjadi budaya sekolah inklusif memiliki implikasi yang jelas untuk sifat kepemimpinan dan pengambilan keputusan

3) Kepala sekolah berkolaborasi dengan orang tua

Kepala sekolah meyakini bahwa peran serta orang tua dalam pendidikan anaknya akan lebih efektif, oleh karena itu kepala sekolah melibatkan orang tua sebagai pihak yang nantinya akan berkolaborasi bersama. Sekolah berkolaborasi dengan orang untuk berbagi informasi dan membahas perencanaan bagaimana sekolah ke depannya. Pelibatan orang tua dinilai sangat efektif untuk membantu kelancaran program-program sekolah.

Kepala sekolah menyusun jadwal bagaimana sekolah dapat bertemu dengan orang tua dalam forum. Namun, secara umum pertemuan orang tua biasanya dilaksanakan pada awal semester - pertengahan semester - akhir semester serta pertemuan rutin bulanan maupun pertemuan insidental lainnya.

4) Kepala sekolah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan berada pada pihak yang paling berwenang dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di kota Yogyakarta. Kebijakan-kebijakan tentang pendidikan inklusif di kota Yogyakarta bersumber dari Dinas Pendidikan, oleh karena itu Dinas Pendidikan paling mengetahui mengenai jalannya pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di kota Yogyakarta.

Dinas pendidikan memiliki “tangan kanan” dalam membantu kelancaraan pendidikan inklusif di kota Yogyakarta yaitu ULD (Unit Layanan Disabilatis), Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan sangat penting dan wajib dilakukan oleh kepala sekolah agar terdapat persamaan persepsi jika ada satu kebijakan baru. Kepala sekolah tidak bisa lepas dari kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, begitu juga pihak Dinas Pendidikan tidak bisa lepas kolaborasi dengan sekolah-sekolah inklusif sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di masyarakat.

Merujuk pada hasil penelitian yang didapatkan peneliti di atas, membuktikan bahwa kepala sekolah sebagai informan dalam penelitian ini melaksanakan praktik kolaboratif dalam perencanaan dan implementasi. Tentu saja hal ini sesuai dengan teori bahwa masing-masing sekolah bekerja dengan jenis praktik kolaboratif yang diidentifikasi sebagai inti di sekolah inklusif (Ainscow 1999; Ferguson, Berres, Knoblock, & Wood, 1996; Lipsky & Gartner, 1996; Pugach & Johnson, 1995; Stainback & Stainback, 1996, 1991 dalam Kugelmas & Ainscow, 2004: 139). Sifat kolaboratif yang menjadi budaya sekolah inklusif memiliki implikasi yang jelas untuk sifat kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Membawa kita untuk menyimpulkan bahwa pemimpin sekolah yang

kuat, berkomitmen untuk nilai-nilai inklusif, serta sangat penting untuk mempromosikan dan mendukung tindakan kolaboratif.

c. Melakukan Audit Ekuitas.

Prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif adalah keadilan, oleh karena itu kepala sekolah perlu mewujudkan keadilan dalam pelayanan. Kepala sekolah yang inklusif Audit ekuitas diyakini oleh kepala sekolah berguna untuk mengumpulkan data lokal tentang sekolah yang ia pimpin untuk membawa ke arah pelayanan yang lebih inklusif.

Audit ekuitas digunakan untuk membawa sekolah ke arah pelayanan yang adil. Berdasarkan hasil penelitian, kepala sekolah menggunakan assesmen tes IQ peserta didik dan penyesuaian kurikulum untuk membawa pelayanan ke arah yang lebih adil. Berikut praktik audit ekuitas yang dilakukan kepala sekolah inklusif selaku informan:

1) Memfasilitasi assesmen tes IQ bagi peserta didik

Kepala sekolah mewujudkan praktik audit ekuitas dengan memfasilitasi assesmen bagi peserta didik. Assesmen berarti pengukuran. Anak-anak yang dilihat memiliki track record yang kurang dalam pembelajaran, memiliki perbedaan dengan anak lainnya, dan terlihat tidak mendapatkan hasil pada pembelajarannya maka difasilitasi untuk mengikuti assesmen oleh kepala sekolah. Hal yang dilakukan kepala sekolah ini sejalan dengan teori bahwa banyak pendidik merasa sekolah mereka beroperasi dalam standar operasional (SOP) secara keseluruhan, tetapi audit ekuitas memberikan data konkret untuk

mencerminkan realitas operasional yang dilakukan oleh sekolah dan mengidentifikasi area yang tidak proporsional untuk ditangani (Theoharis, Causton, & Woodfield, 2015: 23).

Assesmen dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti lembaga psikologi, SLB, maupun ULD di bawah naungan pemerintah. Assesmen peserta didik dilakukan sesuai kebijakan sekolah masing-masing. Kepala sekolah memiliki wewenang tentang bagaimana assesmen di sekolah yang ia pimpin akan dilaksanakan, seperti kewenangan untuk melakukan assesmen bagi seluruh peserta didik kelas 1 atau melakukan assesmen pada anak-anak yang dinilai kurang mampu mengikuti pembelajaran. Anak-anak yang selesai melakukan assesmen akan dilihat hasilnya, kemudian ada pemanggilan orang tua dari anak tersebut yang mana bertujuan agar kepala sekolah dapat bertukar informasi tentang perilaku anak tersebut di rumah dan di sekola. Namun, pada intinya assesmen yang dilakukan kepala sekolah ini dapat dijadikan bukti bahwa kepala sekolah mencari tahu data peserta didiknya untuk mengetahui apakah treatment yang diberikan sekolah sudah tepat atau belum sehingga dapat membawa ke arah yang lebih adil dalam memberikan pelayanan inklusif.

2) Kepala sekolah melakukan monitoring perkembangan peserta didik

Pada audit ekuitas, pelayanan di sekolah perlu dibawa ke arah yang adil sehingga kepala sekolah perlu mengambil data lokal secara konsisten. Hal itu dilakukan karena sekolah itu bersifat dinamis oleh karena itu perlu disesuaikan pelayanannya juga. Perwujudan yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah

monitor siswa-siswa agar dapat diketahui apakah siswa membutuhkan treatment yang berbeda atau tetap pada treatment yang sudah dilakukan.

Kepala sekolah setelah melakukan assesmen terhadap peserta didik, tidak serta merta membiarkan mereka berkembang sendiri namun diberikan treatment yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Selama melakukan pembelajaran di sekolah, kepala sekolah mendapatkan informasi dari guru mengenai perkembangan anak-anak berkebutuhan tersebut dan juga difasilitasi assesmen ulang bagi anak-anak berkebutuhan tersebut setelah 2 atau 3 tahun supaya dapat diketahui bagaimana perkembangan anak tersebut, apakah treatment yang diberikan sudah tepat atau belum, dan apakah perlu mengganti atau mengubah treatment yang diberikan sehingga dapat mencapai keadilan dalam pelayanan inklusif.

3) Kepala sekolah melakukan penyesuaian KKM

Kepala sekolah yang inklusif memahami perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak normal dengan ABK-ABK. Kepala sekolah melakukan modifikasi KKM yang bertujuan agar ABK tidak kesulitan dalam mengejar nilai yang dapat diraih oleh anak normal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah menggunakan jenis modifikasi bobot penilaian dan modifikasi nilai KKM. Modifikasi bobot penilaian dilakukan kepala sekolah dengan membedakan beban pencapaian yang perlu diraih peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal, yaitu KKM yang digunakan masih pada nilai yang sama namun syarat untuk mencapai nilai KKM tersebut berbeda. Sejalan dengan teori kurikulum pendidikan inklusif

bahwa model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan anak berkebutuhan khusus (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2017: 19).

Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat sekolah yang membedakan nilai KKM bagi siswa normal dan nilai KKM bagi siswa berkebutuhan khusus. Artinya, KKM bagi siswa berkebutuhan khusus lebih rendah daripada KKM siswa normal, seperti KKM bagi siswa berkebutuhan khusus hanya 40 sedangkan bagi siswa normal adalah 70. Penyesuaian ini disusun oleh tim kurikulum yang terdiri atas kepala sekolah, guru umum dan guru pendamping khusus.

d. Mendesain Ulang Organisasi Sekolah

Kepala sekolah melakukan desain ulang terhadap organisasi sekolah yang ia pimpin semata-mata untuk membentuk sebuah komunitas belajar. Waldron, McLeskey & Redd (2011: 54) mengungkapkan bahwa kepala sekolah berkolaborasi dengan guru untuk mendesain organisasi sekolah untuk menyesuaikan dengan visi yang telah ditentukan. Visi sekolah inklusif secara tegas dan jelas adalah memberikan pendidikan yang adil dan memaksimalkan kemampuan ABK. Oleh karena itu, pada tahap ini kepala sekolah harus mampu mendesain sekolah menjadi organisasi yang lentur, fleksibel tidak birokratis dan hirarkis bagi semua warga sekolah- kolaborasi, kerjasama, kerja tim bisa mudah dan nyaman dilaksanakan. Dengan kata lain, struktur sekolah berubah menjadi tidak kaku melalui pemetaan pelayanan dalam inklusif, dimana guru dan staf

administrasi dikonfigurasi ulang kegunaannya untuk membentuk tim dari guru pendidikan umum dan pendidikan khusus menjadi tim inklusif yang nantinya berkolaborasi dan menyampaikan pengajaran kepada kelas siswa heterogen (George Theoharis , Julie Causton , and Casey Woodfield, 2015: 27).

Mendesain ulang organisasi sekolah adalah salah satu upaya mewujudkan visi inklusif kepala sekolah. Dengan desain ulang organisasi sekolah ini, guru menyadari bahwa mereka diberdayakan untuk membuat keputusan nyata tentang ruang kelas mereka dan sekolah, mereka termotivasi untuk meningkatkan praktik mereka dan menentukan pendekatan untuk lebih baik memenuhi kebutuhan semua siswa. Praktik yang dilakukan kepala sekolah dalam mendesain ulang organisasi sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi ruang kolaborasi GPK dengan guru pendidikan umum

Kepala sekolah memastikan guru pendamping khusus dapat melakukan perencanaan bersama dengan guru pendidikan umum dan mengetahui dengan siapa guru pendamping khusus berkerjasama. Kepala sekolah menyediakan waktu agar guru pendamping khusus dan guru pendidikan umum dapat saling mengenal, saling berdiskusi dan bekerja sama demi kebaikan kelasnya masing-masing.

Kolaborasi antara GPK dengan guru umum akan membentuk komunitas belajar. Dalam praktik pendidikan inklusif, kepala sekolah perlu memastikan adanya dialog antara GPK dengan guru pendidikan umum. Hal ini dikarenakan pada pendidikan inklusif, kelas tidak hanya tanggung jawab guru pendidikan umum namun juga tanggung jawab GPK dalam memberikan pelayanan maksimal

kepada anak-anak berkebutuhan khusus di kelas. Sejalan dengan pendapat Waldron, McLeskey & Redd (2011: 55) berikut:

“Anda harus mempunyai komunitas belajar yang profesional. Jika ada sesuatu yang terjadi, ada beberapa orang yang bisa diajak bicara, siapa yang bisa membantu mengerjakan, dan siapa yang bisa memantulkan ide. Jika seorang anak memiliki permasalahan perilaku dan tidak bisa berhenti, maka saya bisa mendatangi guru dan meminta bantuan”

Kepala sekolah menggunakan praktik di atas dalam memimpin sekolah inklusif. Kepala sekolah memfasilitasi GPK dan guru umum untuk saling mengenal dan bekerja sama. Kepala sekolah mewajibkan adanya pertemuan bagi guru pendidikan umum dan GPK untuk melakukan pembahasan mengenai bagaimana pembelajaran di kelasnya akan dikelola. Guru pendidikan umum dan GPK bebas menentukan bagaimana mereka akan berkomunikasi, dan bebas memilih media komunikasi apa. GPK bisa membantu guru pendidikan umum untuk membuat soal bagi anak-anak berkebutuhan khusus, membantu melakukan pengajaran terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, membantu mengkondisikan anak-anak berkebutuhan khusus di kelas, dan juga bisa menjadi guru pengganti di kelas apabila guru pendidikan umum berhalangan mengajar.

e. Membangun Tim Pengajaran

Peningkatan kegiatan pengajaran adalah pertimbangan utama ketika sekolah menggunakan model inklusif (Waldron, McLeskey & Redd, 2011: 56). Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, mengembangkan tim dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, tetapi pada intinya melibatkan penyatuan para profesional yang akan berbagi tanggung jawab untuk bekerja sama Theoharis, dkk (2015: 28). Pernyataan tersebut berarti pengembangan tim profesional dalam melaksanakan

pembelajaran di pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif artinya pembelajaran bukan hanya untuk anak-anak normal saja, namun juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga, demi memaksimalkan hal tersebut maka perlu ada tim pengajaran di sekolah inklusif. Tim pengajaran yang dimaksud adalah adanya GPK (Guru Pendamping Khusus).

Praktik yang dilakukan kepala sekolah dalam membangun tim pengajaran adalah sebagai berikut:

1) Kepala sekolah mengusahakan adanya GPK di sekolah

Diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di kota Yogyakarta merupakan kewajiban dari Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga wajib dilaksanakan bagi sekolah-sekolah negeri di kota Yogyakarta. Implikasi dari adanya kebijakan sekolah inklusif ini adalah ULD memfasilitasi GPK di sekolah-sekolah inklusif. Kepala sekolah bisa mengajukan permintaan GPK ke ULD jika sekolah membutuhkan GPK. Namun, tentu saja ada hambatan saat kepala sekolah mengajukan permohonan GPK ke ULD yaitu tidak ada follow up dengan cepat dari pihak ULD.

Merujuk pada hasil penelitian, banyak juga kepala sekolah inklusif yang melakukan pengangkatan GPK sendiri yang mana berasal dari guru di sekolah tersebut ataupun melakukan perekrutan GPK langsung untuk sekolah. Kepala sekolah membuat kebijakan untuk mengangkat satu atau dua guru di sekolahnya untuk merangkap sebagai GPK, yang mana guru tersebut akan diikutkan pelatihan

inklusif. Kepala sekolah juga bisa mengangkat GPK secara independen apabila sekolah memiliki alokasi dana untuk pengangkatan GPK tersebut

Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah inklusif melakukan berbagai cara agar sekolah inklusif yang ia pimpin bisa memiliki fasilitas GPK, yang mana menandakan bahwa kepala sekolah berkomitmen terhadap pemberian layanan inklusif secara maksimal. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah yang memiliki GPK dapat memaksimalkan pemberian layanan dalam pembelajarannya. Kepala sekolah dalam memfasilitasi GPK di sekolahnya bisa dengan cara mengajukan permohonan ke ULD, mengangkat GPK dari guru yang sudah ada, atau melakukan perekrutan GPK secara independen.

f. Kepemimpinan Guru

Kepemimpinan guru menjadi salah satu bagian penting dalam menerapkan strategi kepemimpinan inklusif di sekolah. Berikut perwujudan praktik kepemimpinan guru yang dilakukan oleh kepala sekolah:

- 1) Kepala sekolah memberi wewenang kepada guru untuk memetakan kelasnya

Salah satu ciri kepemimpinan guru adalah guru diberi keberdayaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Waldron, McLeskey & Redd (2011: 54) yang menyatakan ketika guru menyadari bahwa mereka diberdayakan untuk membuat keputusan nyata tentang ruang kelas mereka dan sekolah, mereka termotivasi untuk meningkatkan praktik mereka dan menentukan pendekatan untuk lebih baik memenuhi kebutuhan semua siswa.

Pemberdayaan yang dilakukan kepala sekolah agar guru dapat menjalankan kepemimpinan guru adalah diwujudkan guru berwenang untuk melakukan pemetaan pada anak didiknya di kelas. Pemetaan yang dilakukan oleh guru kelas juga berfungsi agar sekolah mengetahui bagaimana keputusan yang tepat untuk diambil, karena hasil pemetaan yang dilakukan adalah data maka data tersebut dapat diolah sebagai bahan pengambilan keputusan. Kepala sekolah memberikan wewenang pada guru untuk melakukan pemetaan tentang bagaimana kondisi siswanya, siapa saja yang sudah lebih maju dalam pembelajaran, siapa saja yang kesulitan saat melakukan pembelajaran dan pemetaan kondisi peserta didik seperti contohnya siapa saja yang bisa menggunakan akses internet saat pembelajaran online. Dengan memberikan wewenang kepada guru, guru bisa melakukan analisis terhadap data yang didapat untuk tindak yang lebih lanjut.

- 2) Kepala sekolah memberikan wewenang kepada guru untuk menjalankan kepemimpinan dalam kelas.

Guru pada praktik ini diberikan wewenang untuk menjadi pemimpin dalam kelasnya. Guru bisa menentukan dan mengelola kelasnya sesuai kondisi kelasnya. Guru yang mengetahui bagaimana kelasnya sehingga guru berhak menjadi pemimpin di kelasnya. Wewenang tersebut diberikan oleh kepala sekolah agar pengelolaan kelas lebih maksimal dan guru lebih merasa diberdayakan sehingga menciptakan kinerja yang baik. Kepemimpinan dalam kelas yang dilakukan oleh guru meliputi guru dapat mengambil keputusan tentang kelasnya misalnya guru dapat memberikan pembelajaran ekstra bagi anak-anak yang kesulitan dalam pembelajaran, mengubah tata ruang kelas agar lebih nyaman saat pembelajaran.

Praktik ini sejalan dengan Waldron dan McLeskey (2010) dalam Zapata (2015: 152) yang menyatakan bahwa kepala sekolah harus memberdayakan guru untuk mengambil peran kepemimpinan, berbagi dan menganalisis data siswa, dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama.

g. Membangun Kapasitas Staf

Membangun kapasitas staf pada pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah menjadi kunci keberhasilan implementasi. Dalam Zapata (2016: 150) diketahui kepala sekolah melakukan apa pun untuk membangun keterampilan staff sekolah mereka, menggunakan beragam sumber daya seperti kursus universitas, pelatihan pengembangan profesional, DVDs, buku, dan konsisten mengulang observasi kelas dipadukan dengan umpan balik, pemodelan, dan pembinaan.

Perwujudan praktik membangun kapasitas staf berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kepala sekolah memfasilitasi pelatihan bagi guru

Dalam membangun kapasitas staf, pengembangan profesional yang sering dilakukan adalah melalui pelatihan. Pada sekolah inklusif, guru-guru diberikan pelatihan mengenai bagaimana pendidikan inklusif berjalan. Sejalan dengan George Theoharis , Julie Causton , and Casey Woodfield (2015: 28) yang mengungkapkan:

“Penting untuk mengubah praktik kelas sehari - hari yang didukung oleh pengajar. Pengubahan praktik kelas melibatkan penciptaan dan pengembangan profesi untuk guru, ahli, dan administrator. Guru diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keprofesiannya.”

Kepala sekolah memberikan fasilitas bagi guru-guru untuk mengembangkan keprofesionalitasnya melalui pelatihan pada lembaga-lembaga yang berwenang terhadap pendidikan inklusif, seperti Dinas Pendidikan, ULD, Lembaga Psikologi, Lembaga Pendidikan dan LPPMP. Tema pelatihan yang diberikan seputar pengelolaan pendidikan inklusif, penanganan ABK dan kurikulum SPPI.

Kepala sekolah berusaha melibatkan guru pada pelatihan inklusif dikarenakan kepala sekolah beranggapan bahwa guru memiliki hubungan langsung dengan peserta didik sebagai yang menerima pelayanan pendidikan inklusif. Guru dilibatkan pada berbagai jenis pelatihan seperti Bimtek, Diklat, Workshop maupun seminar-seminar. Ilmu-ilmu yang didapatkan pada pelatihan bisa langsung diaplikasikan di kelas, misalnya pelatihan tentang ciri-ciri ABK dapat diaplikasikan dengan guru melakukan screening anak-anak yang disinyalir memiliki kebutuhan khusus. Sesuai dengan teori pengembangan staf, maka guru tidak hanya sekali diikuti pelatihan melainkan keberlanjutan pelatihan seperti pelaksanaan pembinaan, pemberian umpan balik oleh guru dan adanya pelatihan tingkat lanjut.

2) Hambatan kepala sekolah dalam membangun kapasitas staff

Terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas staf yang mana melalui pelatihan tentang pendidikan inklusif. Hambatan yang terjadi antara lain: (1) Kuota pelatihan inklusif yang terbatas, dan (2) Sekolah tidak menganggap penting pelatihan inklusif. Kedua hambatan tersebut yang sering

terjadi di lapangan selama kepala sekolah mengusahakan pengembangan kapasitas staf.

Kuota pelatihan inklusif yang terbatas berimplikasi pada kuota peserta pilihan di sekolah. Kepala sekolah perlu memilah staf yang akan dikembangkan wawasan pendidikan inklusifnya, dan itu hanya 2-3 guru per sekolah saja. Hal tersebut menyulitkan bagi sekolah yang ingin memberikan pelatihan bagi guru-guru, karena tidak bisa semua guru diikutkan pelatihan. Kepala sekolah perlu memilih guru siapa saja yang harus diikutkan pelatihan, walaupun semua guru seharusnya ikut pelatihan inklusif. Kepala sekolah mensiasati dengan memilih secara random maupun memilih guru yang sulit untuk diberikan pemahaman yang akan mengikuti pelatihan inklusif.

Terdapat pula sekolah yang tidak menganggap pelatihan pendidikan inklusif itu penting. Tentu saja hal ini fatal jika dilakkan mengingat sekolah yang ia pimpin adalah sekolah inklusif yang mana memerlukan pemberian pelayanan inklusif. Implikasi dari tidak adanya pelatihan inklusif pada staf adalah tidak bisa memberikan pelayanan inklusif yang maksimal sebagaimana yang telah diatur oleh para ahli dan pemerintah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kepala sekolah masih menganggap inklusif untuk sampingan, hanya sekedar pelaksanaan kewajiban sekolah di Kota Yogyakarta sehingga apabila sekolah diberikan kesempatan berupa dana untuk mengadakan pelatihan sendiri maka sekolah akan memilih tema pelatihan lainnya daripada pendidikan inklusif. Hal ini membuat guru-guru

yang tidak mendapatkan pelatihan inklusif lebih banyak. Tentu saja praktik ini tidak sejalan dengan teori Tara (2018) yang mengungkapkan bahwa menyatakan bahwa kepala sekolah di sekolah efektif selalu mencari dan mendesain program-program yang dapat meningkatkan kapasitas dan ilmu pengetahuan para guru.

h. Dukungan Emosional dan Apresiasi

Dukungan emosional dan apresiasi disoroti menjadi salah satu praktik kepemimpinan inklusif di sekolah. Diyakini bahwa dukungan emosional dan apresiasi terhadap warga sekolah dapat memberikan rasa bahwa mereka dihargai dan nantinya akan berimplikasi pada kinerja yang meningkat. Dukungan emosional dan apresiasi tidak hanya melakukan percakapan mengenai seberapa baik pengajaran yang dilakukan guru berjalan, namun juga mendengarkan keluhan mereka dan merayakan keberhasilan yang mereka capai.

Praktik-praktik dukungan emosional dan apresiasi kepala sekolah adalah sebagai berikut:

1) Kepala sekolah berdiskusi tentang masalah pengajaran yang dialami guru

Salah satu bentuk dukungan emosional yang dilakukan kepala sekolah adalah kepala sekolah selalu mengadakan percakapan dengan guru tentang bagaimana proses pengajaran berjalan. Kepala sekolah menjalankan praktik ini bisa saat di pertemuan-pertemuan guru maupun saat waktu-waktu yang tidak formal. Kepala sekolah memulainya dengan menanyakan apa yang dirasakan guru saat mengajar,

bagaimana pengajaran berjalan, dan apa kendala yang dihadapi ketika melakukan pengajaran di kelas-kelas inklusif.

Dengan melakukan hal-hak tersebut, maka pembicaraan akan mengalir dan kepala sekolah telah memberikan dukungan emosional kepada guru. Guru juga akan terfasilitasi dalam mengutarakan apa yang dia ingin utarakan, yang pada akhirnya berimplikasi pada kinerja guru yang maksimal. Praktik yang dilakukan kepala sekolah ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Zapata (2016: 153) bahwa kepala sekolah membahas seberapa baik pengajaran yang dilakukan kepada guru.

2) Kepala sekolah memberikan pengarahan dan pedoman

Kepala sekolah pada bagian ini berperan sebagai seseorang yang meng-influence inklusif kepada warga sekolah. Tujuan dari hal tersebut adalah agar tercipta komunitas yang benar-benar inklusif di sekolah. Langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah mendukung guru agar berada di arah inklusi yang tepat dan merayakan keberhasilan mereka dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Kepala sekolah memberikan nasihat, petunjuk, arahan dan pemahaman kepada guru dan warga sekolah lainnya tentang kendala-kendala yang dialami mereka dalam pendidikan inklusif. Kepala sekolah harus memastikan bahwa guru tidak sendiri dalam menghadapi permasalahan pendidikan inklusif. Praktik ini sejalan dengan Zapata (2016: 153) yang mengungkapkan bahwa beberapa kepala sekolah berbicara tentang pentingnya memberi nasihat kepada guru dan mendengarkan kekecewaan mereka.

i. Menggunakan Data dalam Pengambilan Keputusan

Sekolah adalah organisasi yang mengusahakan perubahan yang lebih baik dari input yang didapatkan ke output yang dihasilkan. Singkatnya, sekolah adalah tempat berproses menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, sekolah adalah organisasi yang kompleks yang disertai pula kebijakan-kebijakan yang kompleks. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan menjadi krusial sebelum kebijakan diterapkan. Data menjadi alat yang membantu kepala sekolah untuk mengetahui realita apa yang terjadi di sekolah, dan kepala sekolah memahami langkah apa yang seharusnya di ambil dalam kondisi seperti ini agar semua berjalan dengan lancar.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Waldron, McLeskey & Redd (2011: 57) bahwa peningkatan sekolah tidak mungkin tidak didukung dengan sistem data, sehingga data menjadi penting dalam kehidupan sekolah. Data juga bisa membentuk diskusi antar kepala sekolah dengan guru untuk membahas mengenai pengajaran yang dilakukan, mengetahui apakah sekolah sudah sukses atau belum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berikut praktik-praktik menggunakan data dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah:

- 1) Kepala sekolah menggunakan data dari assesmen peserta didik

Pada awal kegiatan pendidikan inklusi, ada program assesmen peserta didik yang dilakukan dan difasilitasi oleh sekolah. Program assesmen kemudian menghasilkan data tentang bagaimana kemampuan siswa dan kebutuhan apa yang

dimiliki oleh siswa tersebut. Kepala sekolah inklusif menggunakan data tersebut sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar untuk mengetahui kebutuhan siswa melainkan sudah mencapai tahap menentukan langkah yang tepat dalam memfasilitasi kebutuhan siswa. Data ini selanjutnya jadi bahan diskusi bersama antara guru dan kepala sekolah sehingga dapat mencapai kesepakatan seperti apa siswa berkebutuhan tersebut menerima pelayanan.

Data assesmen peserta didik ini selain sebagai bahan diskusi dengan guru untuk menentukan treatment anak, juga digunakan sebagai diskusi antara orang tua dengan kepala sekolah. Orang tua mengadakan pertemuan karena kepala sekolah mengundang mereka. Hal ini perlu dilakukan karena kepala sekolah meyakini orang tua berperan besar dalam membawa anak berkebutuhan khusus ke arah kesembuhan. Keputusan tersebut diambil dari hasil assesmen yang didiskusikan bersama dengan orang tua.

Lebih lanjut tentang penggunaan data assesmen peserta didik adalah data tersebut dipadukan dengan keluhan kesah guru selama mengajar dan informasi dari orang tua mengenai peserta didik. Dari informasi-informasi yang diperoleh kepala sekolah, diolah dan kemudian menjadi data tentang bagaimana perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut di dalam kelas, apakah anak tersebut mengalami kemajuan atau malah tinggal kelas. Data tersebut menjadi pijakan keputusan apa yang akan diambil oleh kepala sekolah karena mengingat setiap sekolah memiliki target yang harus dicapai, sehingga menuju pada keputusan apakah kepala sekolah perlu mempertahankan anak tersebut di sekolah atau kepala sekolah perlu bekerja

sama dengan SLB terkait pemindahan anak berkebutuhan tersebut ke SLB jika memang sudah tidak bisa dilayani di sekolah inklusif.

- 2) Kepala sekolah menggunakan data untuk menentukan pengembangan peserta didik.

Pada bagian ini, kepala sekolah menggunakan data yang diperoleh untuk melakukan pengembangan. Dalam sekolah inklusif, ditemukan informasi yang berasal dari guru-guru mengenai bagaimana hasil yang diraih anak-anak berkebutuhan khusus, setelah hasil tersebut dianalisis maka kepala sekolah akan menentukan langkah selanjutnya.

Hal yang dilakukan kepala sekolah dengan memperhatikan data perkembangan anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran di kelas sejalan dengan pernyataan Waldron, McLeskey & Redd (2011: 57):

“Mereka lebih lanjut mencatat bahwa sistem data ini tidak bisa begitu saja menjadi tes sumatif yang diberikan untuk akuntabilitas oleh negara, tetapi harus menjadi data tentang kemajuan siswa yang bermakna bagi guru, yang secara langsung terkait dengan isi pengajaran kelas, dan bermanfaat untuk merencanakan pengajaran kelas.”

Berdasarkan teori di atas, kepala sekolah yang baik memandang data sebagai pembicaraan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif memiliki nilai mata pelajaran yang tidak bagus dan tertinggal dari anak-anak normal lainnya, sehingga data akhir yang didapatkan akademik anak-anak berkebutuhan khusus tidak baik.

Adapun yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah setelah mendapatkan data adalah membuat keputusan mengenai tindak lanjut yang perlu dilakukan

berdasarkan pada suatu data. Menurut Waldron, McLeskey & Redd (2011: 59) Faktor terakhir yang membedakan CES dari sekolah yang lain adalah penggunaan data untuk mendorong semua keputusan. Sejalan dengan teori tersebut, kepala sekolah mengetahui bahwa pengembangan akademik ABK di sekolah inklusif sulit, maka kepala sekolah melakukan pengembangan non akademik. Anak-anak berkebutuhan khusus diberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kecakapan hidup sebagai contohnya pembuatan roti dan menjahit yang pelatihan tersebut difasilitasi oleh ULD, kepala sekolah mengajukan nama-nama siapa saja yang ikut pelatihan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah menggunakan data kemajuan peserta didik di kelasnya. Data yang digunakan adalah data perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus yang didapatkan dari laporan guru kelas maupun pengolahan dari hasil ujian yang diraih. Kepala sekolah melihat siapa yang perlu mendapatkan tambahan pembelajaran untuk menunjang hasil nilainya, Kepala sekolah percaya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus pasti memiliki kelebihan, sehingga kepala sekolah melakukan pengembangan non akademik bagi mereka.

j. Memastikan hak suara bagi semua.

Kepala sekolah pada sekolah inklusif perlu memephrhatikan semua suara di sekolah. Hal tersebut dilakukan bahwa sekolah inklusif memang sekolah yang beragam, sehingga diyakini bahwa akan beragam pula suara yang disampaikan. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu mengayomi semua warga sekolah dan

memastikan hak suara mereka. Menurut Burbules (1993) dalam Ryan (2006: 11) setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, untuk menghormati anggota lain, hak untuk berbicara dan merasa aman untuk berbicara; semua ide harus ditoleransi dan mengalami penilaian yang adil. Praktik-praktik kepala sekolah inklusif dalam menerapkan memastikan hak suara bagi semua adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala sekolah membebaskan guru untuk bersuara.

Kepala sekolah juga membuka semua media yang ia miliki agar dapat dihubungi. Kepala sekolah bersifat demokratis.

- 2) Guru bisa berpendapat menyampaikan ide

Pada saat rapat, kepala sekolah selain memfasilitasi guru untuk dapat menceritakan keluhan kesah yang mereka alami, mereka juga bisa saling membantu dengan memberikan saran atau ide dan berpendapat pula mengenai apa yang mereka pikirkan demi kemajuan sekolah. Kepala sekolah tidak bersikap otoriter disini, melainkan kepala sekolah membuka ruang diskusi bagi guru dengan guru dan juga dengan kepala sekolah agar bisa menemukan jalan terbaik apabila membahas suatu permasalahan dan semua guru bebas untuk berpendapat.

- 3) Kepala sekolah membebaskan orang tua untuk bersuara.

Kepala sekolah meyakini bahwa koneksi yang baik dengan orang tua dapat membawa ke arah pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, suara orang tua juga perlu didengarkan oleh semua termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah

menyediakan fasilitas bagi orang tua yang ingin menyampaikan suaranya, seperti membuka forum diskusi saat pertemuan maupun melalui media sosial.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian Kemampuan Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kota Yogyakarta adalah peneliti kesulitan untuk menggali informasi lebih dalam bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Kota Yogyakarta dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat keterbatasan berinteraksi dengan informan dan observasi lebih lanjut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kemampuan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusif di SD Negeri Kota Yogyakarta, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Kepala sekolah memiliki beragam pandangan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah yang dipimpin. Keragaman pandangan tersebut dipengaruhi oleh hal seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan pada diri kepala sekolah itu sendiri. Pada penelitian ini, kepala sekolah yang memiliki pandangan terhadap pendidikan inklusif dipengaruhi latar belakang, pelatihan inklusif dan terdapat kepala sekolah yang berpandangan bahwa pendidikan inklusif sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan.
2. Terdapat praktik-praktik kepemimpinan inklusif yang dilakukan kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Secara lebih rinci dapat dibahas sebagai berikut:
 - a. Kepala sekolah menetapkan visi yang jelas dan tegas terkait inklusif, yang secara konkretnya kepala sekolah menentukan pelayanan apa saja yang perlu diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kepala sekolah yang menggunakan visi inklusif sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

- b. Adapun kunci keberhasilan pendidikan inklusif adalah kolaborasi. Kepala sekolah berkolaborasi dan menentukan perencanaan bersama dengan *stakeholder* atau lembaga yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif mengenai pemecahan masalahn dan *briefing* pelaksanaan pendidikan inklusif ke depannya serta bagaimana mereka berkolaborasi dalam implementasi rencana tersebut.
- c. Melakukan audit ekuitas adalah praktik dimana kepala sekolah mengumpulkan data lokal di sekolahnya seperti data IQ peserta didik, data perkembangan siswa, data hasil nilai ujian siswa yang akan digunakan untuk membuat keputusan yang membawa ke arah keadilan pelayanan.
- d. Mendesain ulang organisasi. Kepala sekolah memudahkan birokrasi dalam sekolah, membuat struktur yang awalnya kaku menjadi luwes dengan mendesain ulang organisasi sehingga GPK dan guru umum dapat berkolaborasi dalam menjalankan pendidikan inklusif.
- e. Membangun tim pengajaran. Sekolah inklusif akan maksimal jika terdapat GPK. Lima sekolah dari enam sekolah yang menjadi tempat penelitian memiliki GPK sehingga pelayanan inklusif lebih efektif.
- f. Dukungan emosional dan apresiasi adalah kepala sekolah mendengarkan keluhan guru-guru baik itu besar atau kecil, guru dengan leluasa berkeluh kesah dengan kepala sekolah.

- g. Menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam sekolah untuk mengambil kebijakan dan tindak lanjut. Kepala sekolah menggunakan data siswa berkebutuhan khusus untuk diberikan tambahan waktu ujian maupun diikutkan ke pelatihan vokasi untuk menambah skill.
- h. Membangun kapasitas staf dilakukan kepala sekolah dengan membuka diri lagi sehingga tidak ada batasan yang kaku antara guru dengan kepala sekolah. Kepala sekolah juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang tua/wali murid.
- i. Kepemimpinan guru dilakukan kepala sekolah dengan memberikan peran kepemimpinan bagi guru dalam kelasnya. Guru bisa menentukan bagaimana kelasnya berjalan dan dapat mengambil alih dalam memimpin rapat di kelasnya. Guru yang berprestasi juga diberi kesempatan untuk membangun kapasitas rekan-rekannya.
- j. Memastikan hak suara bagi semua adalah kepala sekolah bersikap demokratis dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepala sekolah tidak membatasi guru untuk berbicara, melainkan memberikan mereka ruang untuk berbicara. Hal ini diwujudkan pada saat rapat, guru dapat bercerita keluh kesah yang dihadapi tanpa ragu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menemukan perbedaan pandangan pada masing-masing kepala sekolah. Diperlukan pelatihan inklusif bagi kepala sekolah sehingga dapat merubah pandangan kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif ke arah yang lebih baik.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik kepemimpinan inklusif kepala sekolah masih belum maksimal karena ditemui hambatan-hambatan dalam implementasinya. Diperlukan pelatihan bagi kepala sekolah untuk memperkuat implementasi praktik-praktik kepemimpinan inklusif di sekolah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut adalah mengupas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif agar dapat diketahui akar masalah dan penyelesaian masalah yang efektif.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Ar-Ruzz Media.
- Andriani, D.E. (2011). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Upaya Mewujudkan Sekolah Efektif. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 01*, 51-62.
- Basri, H., & Tatang. (2015). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Blackledge, D. & Hunt, B. (1985). *Sociological interpretations of education*. London: Routledge.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: perspectives and method*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Budiyanto. 2017. *Pengantar Pendidikan inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Conrad, D.A, & Brown, L.I. (2011). Fostering Inclusive Education: Principal's Perspective in Trinidad and Tobago. *International Journal of Inclusive Education, 15*(9), 1017-1029.
- Direktorat Jenderal GTK. (2017). *Panduan Kerja Kepala Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Fitria, R. (2012). Proses Pembelajaran dalam Setting inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan inklusif, 1*(1), 90-101.

- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hafiz, A. (2017). Sejarah dan Perkembangan Pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 9-15.
- Handayani, T., & Rahardian, A. S. (2013). Peraturan Perundang-undangan dan Implementasi Pendidikan inklusif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 39(1), 27-48.
- Hanjarwati, A & Aminah, S. (2014). “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusif”. *Jurnal inklusif*, 1(2), 221-248.
- Helaluddin, Wijaya H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Jabar, C. S. A., et al. (2016). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <http://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kugelmas, J., & Ainscow, M. (2004). Leadership For Inclusion: A Comparison of International Practices. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 4(3), 133-141.

- Lismina. (2018). *Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi
- Luddin, A. B. M. (2010). *Dasar - dasar Konseling: Tinjauan Teori dan Praktik* . Bandung: Citapusaka Media Perintis.
- Moleong, L.J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Rev. ed.)* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nunuk. (2012). Inclusive Education Award untuk Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta: <http://pendidikan.jogjakota.go.id>. Diakses pada 20 Februari 2020.
- Nyoman Budiasih, I., G., A, (2014). “Metode Grounded Theory dalam Riset Kualitatif”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 19-27.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru.
- Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.
- Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Pratiwi, A, Lintang Sari, A. P., Rizky. U. F., et al. (2018). *Disabilitas dan Pendidikan inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press.

- Pratiwi, J.C. (2015). Sekolah inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding, Seminar Nasional Pendidikan. Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi, tanggal 21 November 2015*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ryan, J. (2006). *Inclusive Leadership and Social Justice for School*. France: Taylor & Francis, LLC.
- Saunders, Sabrina E.R. 2005. Native Leaders – Leading Natives: Looking At Inclusionary Tactics For First Nations Implementations. A final research paper submitted for 1042: Educational Leadership & Cultural Diversity Dr. Jim Ryan Theory & Policy Studies Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.
- Smith, J. D., 2009. *inklusif: Sekolah Ramah untuk Semua - Learning - Pembelajaran*. Bandung: Nuansa.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarni. (2019). Pengelolaan Pendidikan inklusif di Madrasah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 17(2), 148-161.

Suparman. (2019). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Guru: Sebuah Pengantar Teoritik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Tara, Gohlmann. (2018). *Leadership Practices that Affect Student Achievement: Creating a Supportive Organization for Learning*. Boston College Electronic Thesis or Dissertation. Dissertation.

Taufan, J & Mazhud, F. (2016). Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Tersedia pada laman: ejournal.upi.edu. Diakses pada 19 Februari 2020.

Theoharis, G., Causton, J., & Woodfield, C. (2015). Inclusive Leadership and Disability. Tersedia pada laman <http://ebookcentral.proquest.com/lib/uwa/detail.action?docID=1987321>.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Wahyosumidjo. (2008). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rajawali Presss.

Waldron, N. L., McLeskey, J., & Redd, L. (2011). Setting the Direction: The Role of the Principal in Developing an Effective, Inclusive School. *Journal of Special Education Leadership*, 24(2), 51-60.

Yusuf, Munawir. (2012). Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tersedia pada laman <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/96>.

Diakses pada 12 Oktober 2020

Zapata, Y,P. (2016). The Principal's Role in Creating and Sustaining Inclusive Education. Tersedia pada laman <http://ebookcentral.proquest.com/lib/uwa/detail.action?docID=4761167>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Kepala Sekolah

1. PANDANGAN

- a. Seperti apakah pendidikan inklusif menurut bapak/ibu?
- b. Apa pendidikan inklusif penting untuk diselenggarakan?
- c. Mengapa pendidikan inklusif itu penting?
- d. Apa yang menjadi ciri khusus pendidikan inklusif?
- e. Visi apa yang bapak/ibu bawa dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan inklusif?
- f. Mengapa visi tersebut yang bapak/ibu pilih?
- g. Pelayanan seperti apa yang perlu diberikan pada pendidikan inklusif?

2. PRAKTIK

- a. Apa tindakan (praktik , program,kegiatan) yang bapak/ibu lakukan untuk memfasilitasi pendidikan inklusif ?
- b. Mengapa tindakan tersebut yang dipilih?
- c. Apa terdapat hambatan dalam pelaksanaan praktik tersebut?
- d. Apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?
- e. Apa yang diharapkan dari keberhasilan praktik tersebut?
- f. Apa manfaat yang diharapkan dari keberhasilan dalam memfasilitasi pendidikan inklusif?
- g. Mengapa manfaat tersebut penting ?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “P”

Informan : W1. P. TP

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020

Waktu : 13.30-14.30 (60 menit)

Tempat : SD Negeri TP Yogyakarta

Wawancara	<i>Open Coding</i> (Properties atau Indikator)	Kategori
L: Penelitian saya mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusi. Sebelum itu, sejak kapan ibu menjadi kepala sekolah disini?		
P: Saya menjadi kepala sekolah disini sejak 1 Juni 2012. Sebelumnya, saya menjadi seorang guru di Pathuk Gunungkidul 1 April 1988, kemudian pindah ke Jogja tahun 1998 di SD KP 4, lalu pada 2012 diangkat menjadi kepala sekolah pertama di SD Tegalpanggung.		
L: Sekolah ini termasuk sebagai sekolah inklusi di Kota Yogyakarta. Apa hal yang membuat sekolah ini menjadi sekolah inklusi?		
P: Tahun 2013-2014 saya mendengar keluhan guru-guru tentang anak didiknya yang susah untuk diajarkan materi dan adanya kasus anak yang tidak naik kelas sampai dua kali. Sebelumnya, saya pernah berkuliah di SPGLB selama satu semester dan mendapatkan materi dasar tentang tuna grahita, dengan latar belakang tersebut saya sempat berpikir apakah anak ini memiliki masalah IQ, lalu saya	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru bercerita kesulitan mereka kepada kepala sekolah. ● Kepala sekolah ini mencari tahu bagaimana pelayanan di 	<p>Memastikan hak suara bagi semua.</p> <p>Melakukan audit ekuitas</p>

<p>inisiatif untuk melakukan assesmen kepada anak-anak yang sering dikeluhkan guru. Bekerja sama dengan SLB Pembina, akhirnya saya mengetahui hasilnya teridentifikasi IQ anak beberapa hanya 70 dan 80.</p>	<p>sekolah untuk siswa melalui pengambilan data.</p>	
<p>L: Mengapa ibu melakukan asesment itu?</p>		
<p>P: Tujuannya semata-mata hanya untuk menindaklanjuti keluhan guru dan didasari oleh rasa penasaran saya yang tinggi, namun nyatanya saya malah mengetahui ternyata terdapat anak yang membutuhkan. Biaya assesmen ini juga ditanggung sekolah, Rp 50.000 x 25 anak.</p>		
<p>L: Bagaimana tindak lanjut yang ibu ambil setelah adanya assesmen sehingga sekolah ini bisa menjadi sekolah inklusi?</p>		
<p>P: Saat rapat bersama kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, diketahui pihak Dinas memfasilitasi pengajuan assesment anak-anak dan menerima laporan assesment mandiri dari pihak sekolah. Saya melaporkan hasil assesmen mandiri yang telah saya lakukan. Pihak Dinas Pendidikan mendatangi sekolah kami dan memberikan uang ganti. Namun, saat itu, saya tidak mengetahui bahwa SD kami diangkat menjadi sekolah inklusi, kami baru mengetahuinya setelah ada mahasiswa yang melakukan penelitian di sekolah kami dan membawa SK bahwa sekolah kami adalah sekolah inklusi tertanggal 12 Juni 2015. Saya lalu melakukan pengecekan kebenaran di Dinas Pendidikan, dan ternyata benar bahwa sekolah kami adalah sekolah inklusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah terlibat dengan para pemangku kepentingan melaporkan hasil assesmen anak. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>

<p>L: Lalu setelah tahu sekolah ini inklusi, hal yang ibu lakukan itu apa?</p>		
<p>P: Setelah mengetahui bahwa SD ini adalah sekolah inklusi, saya diikutkan Diklat oleh pihak Dinas sebanyak dua kali. Pertama, di Hotel Cokro Kembang dan kedua di Hotel Ross Inn yang mana keduanya dilaksanakan oleh Dikpora DIY. Mulai itu, saya menjadi paham dan merasa terdukung oleh Dinas Pendidikan yang mana memiliki ULD untuk mengurus inklusi. Kemudian saya mulai mengajukan beberapa anak ke Dinas Pendidikan untuk melakukan assesment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mengembangkan komitmen terhadap nilai-nilai pendidikan inklusi melalui pelatihan. 	<p>Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.</p>
<p>L: Menjabat sebagai kepala sekolah di SD inklusi, apa yang ibu rasakan?</p>		
<p>P: Saya anggap ini sebagai hal biasa. Prinsip saya adalah ketika saya ditugaskan maka itu berarti saya harus memberi pelayanan. Jika mengemban amanah, saya harus lakukan tugas itu dengan makepala sekolahimal, senang maupun susah.</p>		
<p>L: Apa yang ibu lakukan setelah mengetahui bahwa ibu adalah kepala sekolah SD Inklusi?</p>		
<p>P: Sebelumnya saya harus menjalani pelatihan , oleh karena itu setelah saya mengetahui bahwa sekolah ini inklusi, saya segera meminta kepada Dinas Pendidikan agar saya segera diikutkan pelatihan setelah saya mengetahui bahwa sekolah ini inklusi. Dalam kesehariannya, saya aktif bertanya pada Dinas Pendidikan. Ada suatu usaha yang saya lakukan agar intinya dapat memberi pelayanan dengan baik. Pelatihan yang saya ikuti banyak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memiliki komitmen dalam visi mereka untuk bergerak ke arah yang sepenuhnya inklusif 	<p>Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi</p>

mbak, namun yang paling saya ingat itu pelatihan SPPI.		
L: Menurut ibu, apa hal utama yang harus dilakukan saat menjabat sebagai kepala sekolah inklusi?		
P: Yang utama itu ada 3P (Pelayanan, Penampilan, dan Prestasi)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memiliki pemahaman apa saja yang harus dilakukan sekolah demi keberhasilan pendidikan inklusi. 	Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.
L: Bagaimana usaha yang ibu lakukan untuk mewujudkan 3P itu?		
P: Saya memberikan pelayanan kepada masyarakat, lalu saya memperbaiki penampilan SD TP yang dahulu hanya sekolah biasa kini menjadi sekolah yang bagus tampilannya dengan cara saya mengajukan ke Dinas Pendidikan proposal untuk rehabilitasi sekolah sehingga hal ini dapat diwujudkan, lalu saya meningkatkan prestasi anak-anak di SD TP lebih dari yang sebelum saya menjabat dengan cara saya memfasilitasi minat dan bakat mereka melalui ikut serta dalam berbagai perlombaan.		
L: Bicara tentang memfasilitasi minat bakat, bagaimana usaha yang ibu lakukan dalam mengembangkan minat dan bakat anak-anak berkebutuhan khusus?		
P: Saya yakin bahwa semua anak punya kelebihan. Lalu, saya coba wujud pengembangan minat bakat anak melalui ekstrakurikuler. Dahulu sebelum saya menjadi kepala sekolah, kepala sekolah disini hanya pramuka, namun saat saya cerita-cerita dengan guru-guru saya mengetahui bahwa anak-anak yang berkebutuhan ini memiliki bakat. Lalu saya coba	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melakukan dialog dengan para guru, guru nyaman bercerita ke kepala sekolah tentang kondisi anak didiknya. 	Memastikan hak suara bagi semua.

<p>menghubungi guru-guru ekstrakurikuler dari SD KP, akhirnya ada ekstrakurikuler drumband dan baca Al-qur'an dan disusul pencak silat dan ekepala sekolahtra lainnya. Saya melihat di sekolah ini untuk mengembangkan akademiknya cukup sulit, maka saya mengembangkan non akademiknya.</p> <p>Terbukti selama latihan belum ada satu tahun, kami meraih juara umum 3 Drumband se DIY-Jateng yang dilakepala sekolahanakan di GOR Pangukan dengan menyabet 6 penghargaan. Dengan melihat hal-hal itu, saya menjadi tahu bahwa jika anak ini dilatih mereka itu bisa. Sekolah ini juga menyabet 7 kejuaraan MTQ tingkat kecamatan dan 1 kejuaraan MTQ tingkat kota pada tahun 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melihat realita di lapangan dan mengambil keputusan berdasarkan realita yang terjadi. 	<p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>
<p>L: Dalam memberikan pelayanan, siapa saja bu yang ibu libatkan?</p>		
<p>P: Ya semua warga sekolah mbak. Untuk pihak luar, saya bekerjasama dengan pihak Babinkamtibmas untuk membantu memberikan pelayanan pada anak-anak. Saya berkunjung ke rumah anak-anak yang bermasalah bersama babinkamtibmas. Pihak babinkamtibmas memberikan sosialisasi agar mencapai tujuan memberikan pelayanan kepada anak agar anak berkarakter yang baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan pihak berkepentingan. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>
<p>L: Kenapa si bu melibatkan pihak babinkamtibmas ?</p>		
<p>P: Saya melakukan pembinaan terhadap anak-anak nakal, melalui dihadapkan ke saya langsung kemudian membuat surat pernyataan, berita acara, dan di tanda tangani. Saya bekerja sama pula dengan pihak kepolisian</p>		

<p>(babinkamtibmas) untuk menangani permasalahan yang menjurus ke arah kriminal. Tindakan preventifnya, kami membuat kontrak disiplin kepada peserta didik baru, intinya anak memenuhi tata tertib dan jika saya sudah tidak bisa membina, saya akan kembalikan ke orangtua.</p>		
<p>L: Sebenarnya visi di sekolah ini apa sih bu? Lalu menurut ibu bagaimana visi misi sekolah ini apakah sudah bersifat inklusif belum?</p>		
<p>P: Salah satu visi di sekolah ini itu memberikan pelayanan sesuai minat bakat siswa. Sesuai kan dengan nilai inklusi yaitu mengembangkan kelebihan siswa karena tiap siswa pasti memiliki kelebihan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memiliki visi yang spesifik terkait inklusi. 	<p>Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.</p>
<p>L: Ibu untuk total ABK yang ada di SD TPini berapa ya?</p>		
<p>P: Tahun ini, ada 28 anak berkebutuhan khusus di SD TG. Dinas pendidikan memberikan kesempatan bagi SD Negeri di Kota Jogja yaitu pendaftaran siswa baru yang berkebutuhan khusus di sekolah selama 3 hari sebelum pendaftaran siswa reguler dimulai. Namun, tidak ada yang mendaftar. Tapi nanti saat di kelas 1, akan ada beberapa anak yang menunjukkan gejala berkebutuhan. Hal ini diketahui karena orangtua tidak mengetahui apa itu assesment, mereka kurang melek inklusi. Tahunya bahwa anak tertinggal pelajarannya berarti dia bodoh.</p>		
<p>L: Nah bu jadi kan berarti disini anak berkebutuhan khususnya dilakukan assesmen yang dijematani oleh sekolah ya bu, lalu orang tua anak-anak tersebut gimana bu responnya sedangkan</p>		

<p>mereka kurang melek inklusi? Lalu sikap ibu terhadap orang tua seperti itu seperti apa ya?</p>		
<p>P: Awal-awal saya tidak tahu bahwa untuk melakukan assesmen saya perlu izin dari orang tua, namun setelah mengetahuinya hasil assesmen anak saya berikan kepada orangtua. Saat orangtua diberi tahu assesmen anak, banyak orangtua yang kaget dan mengatakan“goblog” kepada anaknya. Lalu saya bertemu dan mengajak orangtua bekerja sama dan merangkul anaknya. Orang tua saya panggil ke ruangan saya, dan saya beri hasil lalu ajakan kerjasama. Saya bercerita kepada masing-masing orangtua tentang anaknya bagaimana di sekolah, hasilnya bahkan ada orangtua yang setuju bahwa kelakuan anaknya di rumah ini juga sama dengan kelakuan anaknya di sekolah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah bertemu dengan orang tua karena mereka pihak yang penting dalam perkembangan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.
<p>L: Dengan dilakukannya pertemuan itu, ibu merasa cara ini efektif tidak?</p>		
<p>P: Jadi kami memang intens melakukan komunikasi dengan orang tua. Pertemuan dengan orang tua dilakukan pada awal tiap tahun ajaran per kelas-kelas, ada juga pertemuan khusus dalam membahas kegiatan (dalam satu semester), ada juga pertemuan saat akhir semester (pembagian rapot), juga pertemuan-pertemuan jika ada masalah atau kegiatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah saling mengundang kelompok orang tua ke dalam sekolah. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>
<p>L: Untuk mempermudah jalannya inklusi disini, apa yang ibu lakukan?</p>		
<p>P: Saya membangun tim penanganan inklusi. Setelah tahu bahwa sekolah saya adalah sekolah inklusi saya langsung menunjuk salah satu guru kami sebagai GPK ,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah membentuk tim penanganan inklusi. 	<p>Membangun tim pengajaran.</p>

<p>walaupun belum dituliskan secara legal dalam sk. Kemudian, Dinas Pendidikan mulai memperhatikan dan meminta usulan kepada sekolah dua orang guru non PNS. Saya bertindak cepat ketika mengetahui bahwa sekolah ini inklusi dengan melaporkannya pada pihak Dinas sehingga saya mendapat jatah GPK, jika tidak saya tidak akan mendapatkan jatah GPK seperti SD-SD lainnya. Semua ini tergantung pada pemahaman pemimpin terhadap inklusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah bergegas lapor ke Dinas Pendidikan sehingga mendapatkan jatah GPK untuk memaksimalkan pengajaran. 	<p>Membangun tim pengajaran.</p>
<p>L: Saat ini GPK tersebut masih bekerja ya bu?</p>		
<p>P: Tidak mbak. Jadi begini, pihak ULD sudah menunjuk 2 guru non PNS untuk menjadi GPK mengurus anak-anak berkebutuhan di SD TP, namun dirasa kurang efektif seiring berjalannya waktu sekolah karena GPK yang ditunjuk merupakan seorang guru kelas yang mana kesehariannya sibuk untuk mengurus kelasnya sendiri. Lalu, saya berinisiatif untuk mengangkat GPK secara mandiri berjumlah satu orang pada Agustus 2019. Mengapa saya mengangkat GPK mandiri? Karena saya merasa para orang tua di SD TP kurang wawasan mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini, berbeda dengan orangtua di sekolah lain yang mau mengangkat GPK mandiri. Sehingga, akhirnya sekolah yang memfasilitasi pengangkatan GPK. Januari 2020 ada pengangkatan GPK dari APBD, sehingga ada dua GPK di SD Tegalpanggung. Namun, Juni kemarin keluar karena menikah dan tinggal di Temanggung, sekarang hanya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menemukan hambatan dalam kurangnya orang tua yang meleak pendidikan inklusi, kemudian dijadikan sebagai dasar pengangkatan GPK mandiri di sekolah. 	<p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>

<p>tinggal satu GPKnya. Saya sudah mengusulkan ke ULD dan sudah ada yang melamar, namun karena pandemi covid ini belum ada KBM tatap muka maka GPK belum masuk.</p>		
<p>L: GPKnya jadinya cuma ada satu ya bu? Nah apa yang ibu lakukan untuk memanager satu GPK itu agar kerjanya tetap makepala sekolahimal?</p>		
<p>P: Iya mbak, oleh karena itu ada jadwal dimana dan kapan GPK ditempatkan di kelas. Misal, untuk hari senin jadwal kelas 6, lalu hari selanjutnya kelas 4. Namun, jika dalam kondisi guru membutuhkan GPK walaupun bukan di jadwal kelas tersebut, GPK bisa masuk ke kelas itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya jadwal pengajaran bersama GPK dengan guru kelas. 	<p>Mendesain ulang organisasi</p>
<p>L: Berarti guru GPK dengan guru biasa hubungannya baik ya bu? Selain membantu mengajar, kerjasama GPK sama guru biasa apa lagi bu?</p>		
<p>P: Guru mulai paham dan sering meminta bantuan GPK, selain pendampingan. Mereka juga bekerja sama menggunakan teknik seperti membawa anak yang sulit belajar ke suasana yang baru, contohnya membawa anak belajar di perpustakaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memberikan ruang kepada GPK dan guru kelas untuk saling bekerja sama. ● Guru mengambil keputusan dalam mengajar dalam kelas. 	<p>Mendesain ulang organisasi</p> <p>Kepemimpinan guru.</p>
<p>L: Guru yang non GPK selama ini memandang anak berkebutuhan khusus itu seperti apa ya bu?</p>		
<p>P: Memang awalnya guru memiliki pandangan karena kurangnya ilmu bahwa anak-anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik berarti bahwa anak itu bodoh, padahal seharusnya kata “bodoh” tidak boleh diucapkan oleh seorang guru. Saya sebagai kepala sekolah kemudian memberikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memberikan nasihat 	<p>Dukungan emosional dan</p>

petuah kepada guru untuk tidak perlu berpikiran kencang tentang hasil belajar siswa jika tidak maksimal, tugas guru itu mengajarkan materi semaksimal mungkin dan untuk hasilnya kita pasrahkan pada Tuhan.	kepada guru untuk memahami hasil kinerja siswa jika tidak maksimal	apresiasi.
L: Selain memberi petuah, usaha apalagi yang ibu lakukan terhadap guru supaya guru semakin sadar akan pendidikan inklusi?		
P: Saya memfasilitasi guru-guru untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan. SD ini guru-gurunya telah mendapatkan pelatihan (bimtek) tentang mengelola siswa ABK sebanyak dua kali yang kedua pelatihannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yang harapannya guru-guru bisa melakukan assesmen mandiri. Pelatihan yang paling berkesan itu bimtek yang diadakan di SD X, pada hari ketiga diisi Ibu Aini membuat guru paham bahwa kecerdasan anak tidak hanya dilihat dari IQ saja yang membuat guru-guru mulai berpikiran terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memfasilitasi pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada guru. 	Membangun kapasitas staf.
L: Setelah mereka mulai berpikiran terbuka, <i>treatment</i> apa selanjutnya yang ibu lakukan terhadap guru-guru?		
P: Waktu rapat saya selalu memotivasi kepada guru-guru agar mampu memberikan pelayanan inklusi yang maksimal dengan kondisi inklusi yang seperti ini. Jika terdapat masalah, akan ditangani oleh guru kelas terlebih dahulu. Saya membawa hubungan saya dengan guru dan staf dengan <i>enjoy</i> karena semua akan dipikirkan bersama.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mendukung guru agar semangat dalam melaksanakan pendidikan inklusi. ● Guru leluasa untuk menangani dan mengambil keputusan di kelasnya. 	Dukungan emosional dan apresiasi. Kepemimpinan guru.
L: Lalu bagaimana bu untuk		

fasilitas yang disediakan?		
P: Sama aja ya mbak antara anak normal dan ABK. Sebenarnya saya ingin mengajukan pembangunan untuk ruangan abu-abu (Grey Room) untuk pemenuhan kebutuhan ABK, namun terkendala syarat yaitu harus memiliki lahan. Dana untuk pembangunan yang ini tidak boleh digunakan untuk merubah bangunan yang sudah ada, namun harus mulai dari lahan. Kita tidak punya lahan.		
L: Lalu jika ada ABK yang kebutuhannya fisik, hal yang ibu lakukan apa?		
P: Di SD TP, banyak anak ABK secara kognitif, untuk yang secara fisik belum ada. Kemarin mau ada ABK fisik masuk kesini, lalu saya minta untu dibuatkan kamar mandi khusus disabilitas, namun anak tersebut mengundurkan diri. Saya itu takut tidak bisa memberi pelayanan dengan maksimal kepada siswa, kasihan. Oleh karena itu saya sering menolak anak-anak yang ABK fisik dan memberi saran ke SD lain dengan fasilitas untuk ABK yang lebih lengkap.		
L: Dari pihak Dinas Pendidikan sendiri ada dana khusus inklusi tidak ya bu? Cukup tidak untuk operasionalnya?		
P: Ada mbak. Pernah anak-anak diberikan beasiswa dari Dikpora sebesar Rp 500.000,-/anak. selain itu, ada pelatihan membuat puisi kepada anak ABK di Dikpora.	<ul style="list-style-type: none"> ● Anak-anak inklusi sulit berkembang akademiknya sehingga diikutkan pelatihan non akademik. 	Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.
L: Wah berarti diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya bu sama pihak Dinas Pendidikan?		
P: Saya merasa SD-SD di Kota Yogyakarta ini benar-benar		

<p>diperhatikan karena harapannya semua sekolah di Kota Jogja akan menjadi inklusi</p> <p>Sekolah inklusif adalah sekolah yang mana anak-anak berkebutuhan khusus dijadikan satu kelas dengan anak-anak normal.</p>		
<p>L: Terakhir bu, selama ini bagaimana pandangan terhadap pendidikan inklusi?</p>		
<p>P: Inklusi itu artinya memberikan pelayanan yang sama. Semua anak dapat belajar bersama dalam kelas. Saya yakin dibalik kekurangan anak-anak berkebutuhan khusus, mereka ini memiliki kelebihan.</p> <p>Pendidikan inklusi menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan juga khususnya kepala sekolah tentang bagaimana caranya supaya anak berkebutuhan bisa dilayani semua dalam kelas.</p> <p>Saya menganggap ABK diibaratkan sebagai botol kecil yang dimasukan benda lainnya, bukan dengan cara langsung memasukan semua namun harus dengan cara, pelan-pelan, satu-persatu.</p> <p>Makanya, menurut saya dengan inklusi itu berarti dalam kelas perlu adanya pendekatan terhadap anak-anak yang tertinggal kemampuannya daripada teman-temannya. Inklusi berarti guru memberikan perlakuan yang berbeda kepada ABK daripada dengan anak-anak normal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memiliki keteguhan bahwa semua anak perlu dilayani dalam kelas. ● Kepala sekolah memahami bagaimana seharusnya pendidikan inklusi berjalan. 	<p>Pandangan positif terhadap pendidikan inklusif</p> <p>Pandangan positif terhadap pendidikan inklusif</p>

Lampiran 3. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “PS”

Informan : W2. PS. BC
 Hari, Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020
 Waktu : 11.30 - 12.20
 Tempat : SD Negeri BC Yogyakarta

Wawancara	<i>Open Coding</i> (Properties atau Indikator)	Kategori
L: Penelitian saya mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusi. Pertama, kan ibu diberi tugas sebagai kepala sekolah nih bu oleh Dinas, diangkat sebagai kepala sekolah nih bu oleh Dinas, saat tahu ibu dapat tugas seperti itu, perasaan ibu bagaimana?		
PS: Saya diangkat tahun 2012. Perasaan biasa saja. Saya tidak kaget. Namanya ASN sudah disumpah untuk melaksanakan apapun dan dimanapun. Tapi rasanya memang berat, ketika menjadi kepala sekolah, orang yang kita urus usianya bahkan lebih tua dari saya, jadinya saya harus mempelajari dulu bagaimana teman-teman saya ini. Saya mempelajari figur-figur teladan dr sekolah lain.		
L: Ibu tahu tidak kalau cerita sekolah ini menjadi sekolah inklusi bagaimana?		
PS: Sekolah ini sejak 2011 itu sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Dan saya juga belum ditugaskan disini. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya SD ini menjadi sd inklusi. Saya juga tidak mencari tahu, karena jika sudah ada SK ya sudah saya laksanakan saja.		
L: Nah, dalam pelaksanaan sekolah inklusi ini, layanan apa yang ibu		

berikan?		
PS: Dari 28 anak dalam kelas ada satu atau dua yang khusus. Nah, saya harap tahun 2020 ini akan berubah karena kami telah diberikan 2 GPK. walaupun anak belum jelas apakah berkebutuhan atau tidak, namun ada kecenderungan mengarah kesana maka saya tugaskan GPK untuk melakukan pendekatan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memiliki tujuan akan bagaimana pendidikan inklusi dilaksanakan ke depannya. 	Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.
L: Loh memang sebelumnya belum ada GPK bu?		
PS: Kami baru diberikan GPK oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2020. Sebelum-sebelumnya saya menunjuk guru kelas sekaligus menjadi GPK. Jika kami tidak mampu, kami mengkonsultasikan dengan SLB.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memberi tugas tambahan guru karena belum memiliki GPK. 	Membangun tim pengajaran.
L: Maksudnya mengkonsultasikan dengan SLB itu bagaimana ya bu?		
PS: Contohnya pada kelas 4 anak itu tidak bisa baca tulis, lalu kami tidak bisa melanjutkannya, sehingga kami tugaskan guru untuk jalan-jalan dengan anak tersebut ke SLB dan mencoba kegiatan dan fasilitas disana. Jika anak itu merasa senang dan cocok dengan SLB tersebut, maka kami pindahkan anak itu ke SLB tersebut dengan persetujuan orang tua. Saat ini sudah ada beberapa yang kami pindahkan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melihat perkembangan anak kemudian mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisi anak. 	Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.
L: Lalu berarti yang mengenalkan SLB pertama ke anak kan sekolah ya bu, nah apakah orang tuanya tidak tahu bahwa anaknya ini tergolong ABK?		
PS: Kami melakukan assesmen dan hasilnya kami bagikan ke orang tua. Ya saat kami memberi tahu orangtua bahwa anak ini berkebutuhan, ya orangtua mengiyakan namun mereka tidak	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tua yang dilibatkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. 	Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.

<p>mengambil aksi untuk memperhatikan anaknya secara lebih, padahal harapan kami adalah orang tua juga turut andil dalam memberikan perhatian bagi anaknya.</p>		
<p>L: Apa sih bu penyebab orang tua tidak bisa memberikan perhatian bagi anaknya?</p>		
<p>PS: Yang karena disini lingkungannya ya mbak, tidak semua anak berkebutuhan di sekolah ini tinggal bersama orang tuanya utuh. Ada yang tinggal dengan neneknya karena ibunya seorang orang tunggal, harus bekerja.</p>		
<p>L: Lalu apa yang ibu lakukan untuk memberikan pemahaman bagi orang tua dari anak-anak berkebutuhan ini?</p>		
<p>PS: Kami pernah memberikan pelatihan bagi orangtua dari anak-anak ABK satu kali saat kami mendapatkan anggaran untuk melaksanakan diklat 50 orang (25 ortu, 25 anak) pada 2017. Kemarin 2019 ada anggaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta dan mengadakan diklat juga. Komunikasi kami dengan orang tua tidak sering karena orang tua terlihat tidak nyaman apabila dikelompokkan dalam orang tua dari ABK. Dapat dilihat dari wajahnya. Untuk kepentingan-kepentingan khusus saja kami undang. Komunikasi dengan ortu ABK bisa menggunakan WA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tua diberikan pembekalan agar memahami dan dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. ● Sekolah menjalin kolaborasi dengan orang tua lebih banyak melalui <i>online</i> 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p> <p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>
<p>L: Kuota untuk anak inklusi di sekolah ini berapa ya bu?</p>		
<p>PS: Kuota yang diberikan 3orang/rombel. Saat PPDB, ada jalur afirmasi khusus ABK selama</p>		

3 hari. Sekolah tahun ini mendapatkan 1 anak		
L: Sebelumnya ibu berbicara tentang hasil assesmen anak ya bu, lalu seperti apa sih bu gambaran assesmen yang dilakukan disini?		
PS: Setiap tahun ada kegiatan assesmen, tapi anggaran terbatas. Kami mengirimkan 25 anak kadang hanya disetujui 10 anak. Namun itu dahulu. Kalau setelah tahun 2017 assesmen diberikan fasilitas dari Dinas Pendidikan dilewatkan jalur melalui ULD.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah melakukan assesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa secara optimal. 	Melakukan audit ekuitas.
L: Berapa anak bu yang sudah dilakukan assesmen?		
PS: ABK disini ada di hampir semua kelas. Yang sudah assesmen baru sekitar 15 anak, kalau yang lainnya baru prediksi-prediksi Tahun ini kami sudah mengajukan beberapa, namun belum dilakukan assesmen oleh Dinas Pendidikan dikarenakan pemerataan assesmen per sekolah dimana tahun ini kuota assesmen diberikan pada sekolah yang belum pernah mengajukan assesmen.		
L: Sekolah ini bisa memprediksi anak berkebutuhan khusus bu?		
PS: Kan ada pelatihan untuk guru-guru. Pelatihan inklusi bagi guru diberikan oleh UNY selama 10 hari dengan materi SPPI dan juga materi dasar pendidikan inklusi seperti screening anak jika anak menunjukkan perilaku yang berbeda, dan materi permainan di kelas yang cocok bagi pembelajaran ABK.	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru di sekolah difasilitasi untuk pengembangan profesionalnya. 	Membangun kapasitas staf.
L: Jadi ada kerjasama ya bu dengan UNY?		
PS: Kami bekerja sama dengan para ahli UNY, UST, dan dengan Psikologi UII berkaitan dengan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menjalin kerjasama dengan para 	Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan

asssesmen.	pemangku kepentingan inklusi.	inmplementasi.
L: Kalau untuk ibu sendiri, apa yang ibu lakukan saat tahu ibu memimpin sekolah inklusi?		
PS: Kami berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Lalu saya mengikuti pelatihan-pelatihan. Sebelum berdirinya ULD, sering kita diinformasikan lewat wa atau sms tentang pelatihan yang akan datang lalau kami diminta membuat proposal. Pada 2015 ada pelatihan pada 2016, 2017 dari Dinas Pendidikan tentang APE dan Kurikulum, dan 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berkomitmen untuk terus menambah wawasannya tentang inklusi. 	Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.
L: Lalu ibu sebagai kepala sekolah, apakah ada kebijakan inklusi yang ibu buat?		
PS: Kebijakan kami samakan, <i>include</i> aja. Karena tujuan kami agar mandiri.		
L: Kenapa tujuannya mandiri ya bu?		
PS: Visi sekolah kami “Terwujudnya Siswa Berakhlaq Mulia, Berprestasi, Mandiri, Berbudaya, dan Peduli Lingkungan”. Menurut saya, visi misi kami sesuai dengan nilai-nilai inklusi. Mandiri ini adalah salah satu upaya kami untuk membuat ABK menjadi anak yang mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah memiliki visi-misi yang sudah memasukan unsur nilai-nilai inklusi. 	Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.
L: Strategi yang ibu terapkan dalam memimpin sekolah inklusi ini apa ya bu?		
PS: Strateginya kami melakukan komunikasi apabila ada kesulitan, teratasi, lalu ya sudah berjalan aja. Kolaborasi dengan orang tua siswa di sekolah ini sudah lumayan baik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah dengan seluruh warga sekolah berkomunikasi dan saling terbuka terhadap masalah yang dihadapi. 	Memastikan hak suara bagi semua.

L: Gimana bu bentuk komunikasi yang dilakukan di sekolah ini?		
PS: Pada setiap hari kamis, kami melaksanakan forum koordinasi dengan para guru. Pada forum tersebut guru bisa cerita masalah yang dihadapi dan kami cari solusi bersama, termasuk masalah ABK atau membahas surat edaran dinas yang sifatnya tidak mendesak, termasuk membahas bagaimana mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya pertemuan rutin. ● Guru leluasa untuk menyampaikan usulan. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p> <p>Memastikan hak suara bagi semua.</p>
L: Kalau diskusi di luar forum formal seperti itu ada tidak ya?		
PS: Iya guru sering saling cerita jika ABK cukup merepotkan, mereka sering curhat saat sedang jam istirahat. Dikarenakan guru yang paling dekat dengan anak-anak adalah guru olahraga. guru-guru lainnya sering bercerita pada guru olahraga kemudian saling berbagi saran pada saat-saat istirahat sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru bisa bercerita dengan leluasa kepada kepala sekolah. 	<p>Memastikan hak suara bagi semua.</p>
L: Lalu setelah curhat-curhat seperti itu, solusi yang dilakukan seperti apa ya bu?		
PS: Guru meminta GPK melakukan pendampingan pada saat pembelajaran berlangsung, nanti ada jadwalnya untuk GPK masuk ke kelas mana. Namun, jika guru butuh GPK secara urgent maka GPK siap masuk ke kelas itu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru dan GPK berkolaborasi. 	<p>Mendesain ulang organisasi.</p>
L: Lalu saat dulu belum memiliki GPK, solusi apa yang ibu lakukan untuk menyasati belum adanya GPK?		
PS: Kami tidak mengangkat GPK namun kami menugaskan guru kelas sebagai GPK di kelasnya masing-masing. Dari Dinas Pendidikan memberikan insentif kepada dua guru yang dipilih untuk menjadi GPK di sekolah. Namun,		

tidak mungkin setiap hari dapat mengawasi semua kelas karena dia memiliki tanggung jawab di kelasnya sendiri.		
L: Memangnya gimana sih bu kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah ini?		
PS: Dahulu saat saya belum mengetahuinya itu ada perbedaan KKM, misalkan KKM anak normal 70 nah KKM ABK hanya 60. Tapi ketika saya melakukan kemitraan dengan Pak Anies, saya bekerja sama dengan SD Rambah II Riau dan ditugaskan untuk melakukan presentasi, kami memaparkan bahwa kkmnya berbeda, ternyata ditentang oleh semua. KKM yang seharusnya tetap disamakan, cuma bobot KKM nya yang berbeda.		
L: Jadinya kali ini disamakan namun bobotnya berbeda ya bu, itu maksudnya gimana ya bu implementasinya?		
PS: ya KKM sama-sama 70, namun untuk anak normal 70 sudah paham materi A - Z, sedangkan anak berkebutuhan hanya mampu menghafal materi A - J.	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya modifikasi kurikulum dalam jenis penilaian. 	Melakukan audit ekuitas.
L: Lalu untuk evaluasi atau ujian anak-anak bagaimana bu?		
PS: Evaluasinya kami jadikan satu karena tidak masalah.		
L: Fasilitas disini yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus ada tidak bu?		
PS: Fasilitas kita samakan. Dahulu pernah ada yang tidak terlalu mampu untuk jalan, lalu kami mengambil tindakan dengan memberi pegangan di tangga sehingga anak itu bisa pegangan di tangga waktu naik atau turun tangga.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melihat kondisi anak kemudian membuat perubahan. 	Menggunakan data untuk pengambilan keputusan.
L: Fasilitas lainnya bu yang bukan		

fisik bagaimana?		
<p>PS: Kami memfasilitasi pengembangan minat bakat. kami mengadakan ekstra kulikuler bagi siswa. Ada 8 ekstrakurikuler disini. Yang wajib adalah Pramuka, TPA. Yang lainnya ada PMR (kelas 4 dan kelas 5), Takraw Putra (kelas 4 dan kelas 5), Futsal Putra (kelas 2 - kelas 5), Volly Mini Putri (kelas 4 dan kelas 5), Tari (kelas 1 - kelas 5), Batik (kelas 4 - kelas 6). Bahkan ada anak berkebutuhan khusus yang mendapat prestasi di Takraw.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya pengembangan minat bakat bagi ABK dan anak normal. 	Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.
L: Berarti penganggaran anggaran disini bagaimana bu?		
<p>PS: Kalau anggaran kami ratakan, tidak ada yang kami khususkan untuk ABK. Semua anggaran kami samakan, namun kami mengusahakan untuk mengadakan barang yang memenuhi kebutuhan normal dan inklusi seperti perbaikan tangga.</p>		
L: Bullying disini banyak tidak bu? Kalau iya, hal yang dilakukan sekolah itu seperti apa?		
<p>PS: Kadang-kadang terjadi bullying, lalu guru melakukan pendekatan dan akhirnya bisa dihandle. Kita kolaborasinya bagus kok dengan anak-anak. Anak-anak diupayakan dapat saling membantu satu sama lain makanya guru melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru bertindak sebagai pemimpin dalam kelas. 	Kepemimpinan guru.
L: Terakhir bu, selama ini bagaimana pandangan terhadap pendidikan inklusi?		
<p>PS: Ya sudah menjadi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang nyaman bagi siswa. Anak yang berkebutuhan khusus perlu perlakuan yang khusus dan butuh perhatian khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berpendapat pendidikan inklusi memerlukan perlakuan khusus, namun hanya beberapa anak saja. 	Pandangan positif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif.

Lampiran 4. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “SL”

Informan : W3.SL. MG
 Hari, Tanggal : Selasa, 22 Juli 2020
 Waktu : 09.00 - 10.10
 Tempat : SD Negeri MG Yogyakarta

Wawancara	Open Coding (Properties atau Indikator)	Kategori
L: Penelitian saya mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusi. Pertama, sejak kapan nggih ibu menjadi kepala sekolah?		
SL: Saya berkarir sebagai guru sejak tahun 1995. Saya masuk di SD MN Yogyakarta sejak 1 Juni 2015. Sebelumnya saya menjadi kepala sekolah di SD DG Yogyakarta dari 2012. Kebetulan juga, posisi KS di sekolah ini juga kosong karena KS nya Pensiun.		
L: Ibu tahu tidak kalau bagaimana cerita sekolah ini menjadi sekolah inklusi?		
SL: Tidak ada tanda tangan tanda tangan. Kan namanya kebijakan, artinya sekolah inklusi merupakan kebijakan Dinas Pendidikan untuk melayani masyarakat maka kami melaksanakan sebagai wujud kewajiban kami terhadap kebijakan. Jika kami tidak melaksanakan kebijakan sekolah inklusi, kami melanggar Perwal kota yogyakarta. Begitu Perwal ditandatangani petinggi, maka saya anggap bahwa saya harus melaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melaksanakan pendidikan inklusi sebagai perwujudan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. 	Pandangan negatif terhadap pendidikan inklusif
L: Kebijakan sekolah inklusi ini sudah ada saat ibu menjabat sebagai kepala sekolah disini atau		

belum ya?		
SL: Kebijakan ini ada sebelum saya menjabat sebagai kepala sekolah di Minggiran. Ini kebijakan lama.		
L: Kalau untuk visi-misi sekolah ini apakah inklusif bu?		
SL: Secara tersirat visi misi sekolah ini tidak inklusi, tidak dapat menggambarkan langsung bahwa sekolah ini inklusi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah tidak memiliki visi misi sekolah yang menggambarkan bahwa sekolah ini inklusi. 	Rendah dalam menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.
L: Setelah diangkat menjadi sekolah inklusi, sekolah ini pasti mendapatkan siswa berkebutuhan khusus ya bu?		
SL: Anak kebutuhan khusus ada disini. Namun, kita bisa mengatakan abk itu apabila sudah ada assesmen, jika belum ada assesmen dari lembaga psikologi maka kami hanya bisa menduga. Screening awal kami lakukan dari <i>gesture</i> , kemampuan, dan fisik. Setelah kami menduga bahwa anak itu berkebutuhan khusus, maka kami lanjut berkomunikasi dengan orang tua untuk memastikan. Karena kami bukan ahli dalam diagnosis ABK, kami tidak berani memberikan diagnosis itu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah mengumpulkan data siswa kemudian mengambil tindakan selanjutnya. 	Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.
L: Lanjut berkomunikasi dengan orang tua dilakukan dengan cara seperti apa ya bu?		
SL: Kami memberikan arahan pada orang tua untuk mengajak anaknya konsultasi di klinik tumbuh kembang, dan hasil assesmennya diberikan ke kami. Saya menyampaikn kepada orang tua “tolong anaknya diajak ke bagian tumbuh kembang, karena sepertinya anak bapak-ibu membutuhkan konsultasi sebentar, nanti hasil assesmennya seperti apa, tolong berikan kepada kami agar	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk mengetahui kebutuhan siswanya. 	Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.

kami dapat memberikan <i>treatment</i> yang sesuai” dan kami tidak akan mengatakan “bapak-ibu, anak anda ABK” karena nanti orang tua akan marah jika anaknya kami beri label ABK padahal belum ada assesmen.		
L: Lalu bagaimana ibu menyampaikan alasan kenapa orang tua perlu membawa anaknya konsultasi? Padahal ibu tidak mau melabeli anaknya berkebutuhan.		
SL: Kami menyampaikan kesulitan kami kepada orang tua saat mengajar anaknya, dan menyampaikan “barangkali ada yang salah dalam layanan kami”. Kalau dengan saya, saya sampaikan dengan data dan cerita guru, misalnya “dari catatan guru kelas 1 ke saya, guru sangat sulit melayani anak bapak-ibu. Oleh karena itu, saya mohon luangkan sedikit waktu untuk membawa anak anda ke klinik tumbuh kembang, agar kami dapat mengetahui salah kami dan bagaimana pelayanan yang harus diberikan ke anaknya”. Kami tidak pernah berani memberikan label.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah berbagi informasi dengan orang tua agar terjadi kolaborasi. ● Menggunakan data dalam menyampaikan informasi agar terwujud assesmen bagi anak-anak. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p> <p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>
L: Jika ada orang tua yang tidak mau atau tidak bisa melakukan assesmen, apa yang ibu lakukan?		
SL: Ketika orang tua dinilai sulit dalam mengantarkan anaknya untuk assesmen, maka pihak sekolah akan menhandel anak ini melakukan assesmen di ULD dengan izin orang tua, jika tidak nanti kami dimarahi orang tua.		
L: ULD kan merupakan layanan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan nih bu, berarti semua assesmen di sekolah ini dilakukan di ULD ya bu?		
SL: Tidak hanya ULD mbak kalau di sekolah kami. Assesmen bisa ke ULD namun atas rekomendasi		

<p>saya. Saya tahu beban ULD itu sangat berat, mereka melayani seluruh kota. Apabila saya mengajukan permohonan assesmen belum tentu saya mengajukan saat ini namun besok sudah mendapatkan jadwal assesmen, sedangkan kami membutuhkan hasil assesmen yang cepat.</p> <p>Jika orang tua kami panggil untuk melakukan assesmen, maka kami tidak akan menyarankan ke ULD dahulu. Saya menawarkan ke orang tua apakah bapak-ibu mau melakukan assesmen di puskesmas dahulu, jika iya maka monggo. Assesmen di ULD merupakan opsi akhir di sekolah kami.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah ingin mendapatkan data kebutuhan siswa agar mengetahui bagaimana <i>treatment</i> yang diberikan. 	<p>Melakukan audit ekuitas.</p>
<p>L: Setelah anak diassesmen, kan ada hasilnya ya bu, hasil assesmen. <i>Follow up</i> apa yang ibu lakukan kemudian setelah mendapatkan hasil assesmennya?</p>		
<p>SL: Setelah orang tua mendapatkan hasil assesmen, saya mengundang kembali kedua orang tua untuk bercerita hasil assesmen dan saran yang didapat dari hasil assesmen.</p> <p>Lalu saya membenarkan “betul ibu dan bapak, sesuai assesmen yang kami terima kebetulan untuk ABK seperti ini kami belum bisa melayani (kalau itu parah) harus dengan GPK. Masalahnya, kami tidak punya GPK. Jadi jika bapak ibu menginginkan anaknya tetap disini, saya yang berdosa karena kami tidak bisa melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya”. Kemudian, orang tua biasanya menanyakan rekomendasi sekolah mana yang harus dituju yang memiliki GPK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tua dapat terbuka mengenai hasil assesmen anak kepada sekolah. 	<p>Memastikan hak suara bagi semua.</p>
<p>L: Kasus seperti apa bu yang selama ini pernah terjadi sehingga anaknya perlu pindah sekolah?</p>		

<p>SL: Dulu pernah ada siswa yang hasil assesmennya menunjukkan tingkat lebih parah daripada <i>slow learner</i>. Pada kasus itu, anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran maupun melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengancing baju. Sudah dua kali tidak naik kelas. Kami kan sekolah, lembaga pendidikan yang punya target dan standar makanya kami memanggil kedua orang tuanya dan menyampaikan keluhan guru-guru.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ada data bagaimana ABK berkembang di sekolah menunjukkan bahwa anak tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah sehingga perlu dipindah ke SLB. 	<p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>
<p>L: Lalu pada kasus itu membuat ibu merekomendasikan pindah sekolah?</p>		
<p>SL: Iya di kasus itu anaknya dipindahkan ke SLB karena tidak mungkin untuk tetap di sekolah inklusi.</p> <p>Saya menjalin hubungan yang baik dengan beberapa SLB di Yogyakarta. Apabila ada anak yang sekiranya belum dapat kami layani maka saya akan meminta orang tua anak tersebut untuk mengajak anak tersebut main-main ke SLB terlebih dahulu,, jika anak tersebut merasa senang dan nyaman maka saya akan berdiskusi dengan orang tua apakah anaknya ingin dipindahkan sekolahnya atau tidak. Saya bisa menelponkan kepala sekolah SLB yang akan dituju dan menyampaikan ke kepala sekolah SLB tersebut bahwa ada anak didik saya yang ingin “jalan-jalan” ke SLB tersebut, sehingga ada pendampingan dari pihak SLB tersebut. Orang tua akan tahu sendiri bahwa ternyata anaknya cocok di lingkungan yang “khusus”, bukan hanya sekedar lingkungan “inklusi”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menjalin kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan dalam inklusi. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>
<p>L: Memangnya selama ini bagaimana sih bu komunikasi yang</p>		

<p>dilakukan sekolah sama orang tua? Kok kelihatannya orang tua enak gitu diajak kerjasama.</p>		
<p>SL: Saya menyukai orangtua yang wira-wiri sekolah karena anak berkebutuhan butuh banyak dukungan. Sekolah sangat terbuka kepada orangtua yang akan berkonsultasi kapanpun dan dimanapun terkait pelayanan yang diberikan sekolah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah terbuka kepada orang tua dan bersedia untuk ditemui dan berbagi informasi 	<p>Menjamin hak suara bagi semua</p>
<p>L: Berapa kali pertemuan bu antara sekolah dengan orang tua siswa.</p>		
<p>SL: Dalam satu tahun ajaran, tidak ada batasan berapa kali pertemuan orangtua. Jadi, kapanpun orangtua akan datang bertemu dengan guru dan kepala sekolah makan disilahkan. Namun secara resmi pertemuan dengan orang tua minimal 3 kali/semester, saat awal semester; pertengahan semester; akhir semester.</p> <p>Namun, saya bicara dengan guru-guru kelas harus ada pertemuan dengan wali murid tiap satu bulan sekali. Saya memberikan kebebasan kepada guru, karena lebih sering bertemu dengan orang tua dalam forum resmi itu lebih bagus supaya apa yang disampaikan dengan guru itu nyambung dengan orangtua.</p> <p>Buktinya, pada saat pandemi ini sekolah kami tidak gagap dalam melaksanakan pembelajaran daring. Setiap ada masalah, saya meminta untuk dilaksanakannya perkumpulan.</p> <p>Saya sudah buktikan beberapa kali selama saya menjadi guru maupun kepala sekolah.</p> <p>Saya membuka link WA saya 24 jam. Wali murid dapat curhat dan menyampaikan kritik saran kepada saya bahkan tanpa perlu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya pertemuan rutin dengan orang tua. ● Kepala sekolah memberikan guru kebebasan untuk mengatur kelasnya sendiri. ● Kepala sekolah menggunakan media WA untuk berkomunikasi dengan orang tua dengan intens, bahkan orang tua bisa melakukan kritik tanpa nama. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p> <p>Kepemimpinan guru.</p> <p>Memastikan hak suara bagi semua.</p>

menyertakan nama pengirim pesan. Jadi saya bisa mengetahui bagaimana keinginan orangtua kepada sekolah. Curhatan berupa keluhan kesah tentang anak murid lain, tentang guru, bahkan tentang saya. Setiap hari pasti ada yang curhat, walaupun itu hanya hal kecil karena saya merawat hal-hal kecil.		
L: Apa yang melatarbelakangi ibu melakukan komunikasi seperti itu?		
SL: Prinsip saya tidak ada “anakmu-anaknya, anaknya-anaknya” karena ini “anak kita”. Jadi, semua orangtua memiliki kewajiban untuk membimbing semua anak. Saya meminta kesepakatan pada orangtua “jangan merasa berkecil hati jika orangtua lain menegur anaknya”..		
L: Kalau untuk guru-guru, diskusi yang mereka lakukan gimana bu?		
SL: Rapat guru yang resmi minimal dilakukan sebulan dua kali, tema rapat bisa banyak termasuk membahas permasalahan guru dalam mengajar ABK. Rapat insidental jika ada urgensi maupun kegiatan mendadak. Saat rapat, saya mendengarkan keluhan kesah guru juga. Selain itu, saya juga menyampaikan keluhan kesah yang disampaikan orangtua tanpa nama yang dikirimkan di kontak WA saya sebagai bahan diskusi bersama.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mengadakan pertemuan guru rutin. ● Kepala sekolah bersedia mendengar cerita dari guru. ● Kepala sekolah menggunakan data dari realita sebagai bahan diskusi. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p> <p>Dukungan emosional dan apresiasi.</p> <p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>
L: Ibu mendengar keluhan kesah guru, lalu kemudian apa yang ibu lakukan setelah itu?		
SL: Saya membuat kebijakan berdasarkan apa yang disampaikan guru. Sebelumnya, guru perlu melakukan riset tentang kondisi kelasnya sehingga didapatkan data	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menggunakan data sebagai dasar pembuatan kebijakan. 	<p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Kepemimpinan</p>

<p>yang <i>real</i>. Misalnya, saat pandemi ini saya meminta semua guru kelas untuk memetakan siapa saja siswa yang bisa belajar daring, yang hanya bisa luring, dan bisa kedua. Hasil yang didapatkan guru menjadi dasar saya dan guru mengambil kebijakan bersama. Sehingga, apa yang dimau orangtua kita bisa melayani. Semuanya bahagia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru diberikan kelulasaan menganalisis data siswa dan terlibat dalam pengambilan keputusan. 	<p>guru.</p>
<p>L: Lalu apa petuah yang ibu berikan kepada guru-guru dalam melaksanakan pendidikan inklusi?</p>		
<p>SL: Saya sangat mewanti-wanti guru-guru untuk jangan pernah sekali-kali memberikan label. Jauhkan <i>labelling</i> dari dunia kita. Apapun yang terjadi di kelas, karena sekolah inklusif menuntut kelas yang campur antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal dan pastinya akan lebih berat bagi guru, guru harus bisa melayani dan jangan pernah memberikan label. Guru harus siap jika anak-anak khusus membutuhkan pelayanan. Jika memang tidak bisa terlayani, silahkan konsultasi ke saya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah terbuka kepada guru apabila guru mengalami kesulitan. 	<p>Dukungan emosional dan apresiasi.</p>
<p>L: Sekolah ini kan tidak ada GPK ya bu, apakah ibu merasa kesulitan dengan hal ini?</p>		
<p>SL: Selama ini kami masih bisa menangani anak-anak berkebutuhan ini. Menindaklanjuti itu, saya meminta guru kelas melayani pendidikan untuk semua. Guru bertindak sebagai konselor dan guru juga sebagai GPK bagi anak yang membutuhkan, namun, guru-guru sudah paham tentang mana yang bisa saya layani dan mana yang tidak, jika tidak maka guru-guru dapat berkonsultasi ke saya,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah hanya melibatkan guru kelas dalam pengajaran inklusif 	<p>Rendah dalam membangun tim pengajaran.</p>

mereka tidak sendiri.		
L: Kenapa ibu tidak meminta GPK ke pihak ULD? Padahal mereka menyediakan bu.		
SL: Saya tidak pernah meminta GPK ke ULD karena pertama, kami tidak punya anak-anak yang berkebutuhan golongan “berat”, kami masih bisa menangani anak-anak ini. Kedua, kami tidak yakin apakah jika kami meminta, kami akan mendapatkan GPK. ULD itu sibuk mbak, dia mengurus satu kota dalam masalah inklusi sehingga saya tidak pernah mencoba untuk meminta GPK.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah tidak melibatkan profesional dalam pengajaran. 	Rendah dalam membangun tim pengajaran.
L: Lalu bagaimana pelaksanaan sekolah inklusi selama ini walaupun tidak ada GPK di sekolah ini?		
SL: Baik-baik saja mbak selama ini, tidak ada permasalahan yang besar. Dilaksanakan semampunya. Saya sering tanya bagaimana perkembangan anak berkebutuhan kepada guru-guru karena itu tugas kami sebagai pelaksana kebijakan dari Pemkot. Saya sebagai kepanjangan tangan Pemkot, wajib memastikan bahwa semuanya harus terlayani.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memberikan perhatian kepada guru dalam pengajarannya. 	Dukungan emosional dan apresiasi.
L: Berarti ada pelatihan inklusi untuk gurur-guru ya bu?		
SL: Tiap tahun itu ada pelatihan inklusi. Namun karena banyak sekolah di kota yang harus ikut pelatihan, maka jumlah guru yang ikut pelatihan per sekolah dibatasi. Tahun 2019/2020 misalnya kepala sekolah dan satu guru. Disini baru beberapa guru yang mengikuti pelatihan bagaimana pelayanan inklusi seperti guru kelas 1, kelas 3, kelas 6 dan saya mengikuti pelatihan di level kebijakan. Pelaksana pelatihan pernah	<ul style="list-style-type: none"> ● Hambatan pelaksanaan pelatihan inklusi bagi guru adalah kuota guru yang dibatasi. 	Rendah dalam Membangun kapasitas staf.

<p>dilakukan dari dinas pendidikan dan juga LPMP. Pelatihan ke guru-guru lebih ke membuat assesmen, dan bagaimana deteksi dini anak-anak ABK. Dari hasil pelatihan, sudah diaplikasikan dalam kelas.</p> <p>Jika sekolah ingin mengadakan pelatihan inklusi secara mandiri di sekolah, sebenarnya Dinas pendidikan siap memfasilitasi narasumber, namun kami memilih fokus pada program lain yang kami anggap lebih penting. Sekolah inklusi bagi kami ya penting namun ada yang lebih kami proritakan dalam pengelolaan sekolah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah tidak menganggap penting pelatihan inklusi & inklusif bukan sebagai prioritas sekolah. 	<p>Rendah dalam menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.</p>
<p>L: Contoh pelatihan yang sudah diaplikasikan di kelas itu seperti apa bu?</p>		
<p>SL: Contohnya untuk anak kelas 1, karena kita tidak mengetahui bagaimana anak tersebut maka saya meminta guru melakukan pemetaan seperti siapa saja yang sudah bisa mengenal huruf, siapa yang sudah mengenal angka, dan siapa yang belum bisa sama sekali.</p> <p>Data ini digunakan untuk pegangan guru agar mengetahui bagaimana mengetahui treatment yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan terkait dengan <i>screening</i> awal anak berkebutuhan khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah meminta guru untuk menganalisis siswanya dalam kelas. ● Kepala sekolah menggunakan data pemetaan dari guru untuk menentukan treatment yang perlu. 	<p>Kepemimpinan guru.</p> <p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>
<p>L: Lalu disini ada fasilitas-fasilitas untuk ABK tidak ya bu?</p>		
<p>P: Fasilitas kita samakan karena kami tidak memiliki anak dengan kebutuhan fisik tertentu.</p> <p>Namun, untuk fasilitas yang bukan dalam bentuk bangunan kami tetap memfasilitasi siswa kami. Kami memiliki anak yang kebutuhannya <i>low vision</i>, dia pintar dan lancar membaca, namun saat membaca memang mata dia sangat dekat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melihat realita di lapangan, ada siswa yang membutuhkan sehingga dipenuhi 	<p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>

dengan tulisan. Oleh karena itu, kami mensiasatinya dengan membesarkan font soal ketika ujian. Jika yang lain menggunakan font 12, dia menggunakan font 16.	kebutuhannya.	
L: Untuk kurikulum disini bagi anak berkebutuhan khusus bagaimana ya bu?		
SL: Kurikulum kita samakan, hanya berbeda bobotnya untuk anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan. Jadi sebelumnya memang perlu anak dilakukan assesmen agar kami dapat mengetahui apakah anak ini masih bisa lanjut belajar disini tanpa GPK, jika iya maka kami lakukan penyesuaian bobot KKM untuk anak tersebut. Solusi kami, anak berkebutuhan juga memiliki layanan khusus. Misalkan, anak normal mendapatkan tambahan pelajaran 1kali/minggu tapi anak khusus mendapatkan tambahan 3kali/minggu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah menggunakan kurikulum modifikasi dengan bobot penilaian yang berbeda agar adil. ● Kepala sekolah melihat data siswa yang tidak bisa berkembang lalu memberikan treatmen yang tepat. 	<p>Melakukan audit ekuitas.</p> <p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>
L: Kendala apa lagi bu yang ada dalam pelaksanaan sekolah inklusi disini?		
SL: Kami masih bisa melayani cerdas istimewa dan <i>gifted</i> walaupun tanpa GPK. Anak rata-rata bawah masih bisa kita handle dengan penyesuain KKM. Namun, jika anak mengalami <i>imbecile</i> dan lain-lain yang merupakan kekhususan yang sulit, maka kami akan merekomendasikan untuk ke SLB. Kami kan tidak tahu apakah anak itu berkebutuhan atau tidak saat PPDB, karena sistem RTO itu menggunakan sistem umur. <i>Screening</i> yang kami lakukan adalah melihat umur anak yang masuk, jika ada ketidakwajaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memilah kebutuhan anak untuk diterima di sekolahnya. 	<p>Rendah dalam menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.</p>

<p>umur (sangat tua di kelas 1) maka kami sudah curiga.</p> <p>Sekolah inklusi tidak bisa menerima semua ABK, hanya beberapa anak berkebutuhan saja.</p> <p>Terutama bagi kami sekolah inklusi yang tidak memiliki GPK, karena yang kami layani tidak hanya satu anak melainkan 28 anak dalam satu rombel dengan 28 karakter, jika anak berkebutuhan tidak terlayani dengan kami maka kami yang salah karena itu bukan ranah kami.</p> <p>Sekolah inklusi memang melaksanakan pendidikan untuk semua namun ada syarat dan ketentuannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menganggap sekolah inklusi dapat dilaksanakan namun terdapat syarat dan ketentuan tertentu. 	<p>Perspektif negatif terhadap pendidikan inklusif</p>
<p>L: Syarat dan ketentuan yang ibu maksud itu seperti apa?</p>		
<p>SL: Pendidikan inklusi bagi saya itu penting tetapi memang harus ahlinya. Kami berkewajiban untuk memberikan pelayanan ke semua anak karena saya penganut “berikanlah suatu masalah kepada ahlinya”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menganggap sekolah inklusi dapat berjalan jika terdapat profesional. Sedangkan, tidak ada profesional di sekolahnya. 	<p>Rendah dalam menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.</p>
<p>L: Terakhir ini bu, bagaimana sih bu pendapat ibu mengenai pendidikan inklusi?</p>		
<p>SL: Kami tetap mendukung karena kami tahu bahwa di antara semua anak pasti ada anak yang berkebutuhan khusus. Kami dukung dengan mereka itu harus tetap dialayani, tetapi tolong lihat kami dan daya dukung kami juga. Tidak bisa semua harus kami layani. Hal ini bukan berarti inklusi itu bisa melayani semua jenis ketunaan. Inklusi tidak bisa disamaratakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mendukung pelaksanaan sekolah inklusi, melaksanakan pendidikan inklusi namun dengan syarat melihat daya dukung sekolah. 	<p>Rendah dalam menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusi.</p>

Lampiran 5. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “BR 2”

Informan : W4.B.BR2
 Hari, Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
 Waktu : 11.00 - 11.30 (30 menit)
 Tempat : SD Negeri BR2 Yogyakarta

Wawancara	Open Coding (Properties atau Indikator)	Kategori
L: Penelitian saya mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusif. Pertama, apakah ini pertama kali bapak menjadi kepala sekolah?		
B: Saya menjadi kepala sekolah pertama di sekolah ini.		
L: Bapak masuk kesini saat sekolah ini sudah jadi sekolah inklusif atau belum pak?		
B: Sudah mbak.		
L: Tapi bapak tahu tidak alasan mengapa sekolah ini jadi sekolah inklusif?		
B: Tidak tahu mbak, soalnya saya kesini kan saat sudah jadi inklusif jadi tidak mengetahui bagaimana detailnya dan dahulunya seperti apa. Mungkin karena disini banyak siswa-siswa berkebutuhan khusus, dan dari SD lain dipindahkan kesini karena disini melayani anak-anak berkebutuhan khusus.		
L: Tapi bapak memahami sekolah inklusif tidak?		
B: Ya harus ikut pelatihan-pelatihan dulu mbak. Pelatihan inklusif diadakan dari ULD, namun pernah saya mengikuti diadakan di SD Tumbuh tentang penanganan anak-anak inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mengikuti pelatihan terkait inklusif untuk menambah ilmu. 	Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif.
L: Lalu jumlah ABK yang belajar disini ada berapa ya pak?		

<p>B: Disini setiap rombel pasti ada anak berkebutuhan khusus. Total hingga saat ini adalah 51 anak. Mayoritas memiliki kebutuh <i>slowlearner</i></p> <p>Untuk RTO tahun ini yang 3 hari khusus inklusif, tidak ada yang mendaftar.</p>		
<p>L: ABKnya cukup banyak ya pak. Lalu bagaimana pak guru-guru disini dalam berkolaborasi? Apa lewat pertemuan-pertemuan gitu pak?</p>		
<p>B: Ada pertemuan guru. Dilakukan sebulan sekali.</p> <p>Di pertemuan. guru-guru bebas bercerita tentang keluhan dan apa yang ia alami di kelas, termasuk keluhan tentang anak-anak berkebutuhan khusus yang cukup sulit untuk diajarkan.</p> <p>Saya mengarahkan bagaimana cara membina anak-anak berkebutuhan khusus dan meminta GPK untuk sharing dengan guru kelas sebagai upaya pemecahan masalah tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya pertemuan guru secara rutin. ● Guru dapat leluasa bercerita dengan kepala sekolah. ● Kepala sekolah memberikan nasihat pengajaran pada guru. ● Kepala sekolah memfasilitasi GPK dan guru kelas bekerja sama. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p> <p>Memastikan hak suara bagi semua</p> <p>Dukungan emosional dan apresiasi.</p> <p>Membangun tim pengajaran.</p>
<p>L: Berapa pak total GPK di sekolah ini?</p>		
<p>B: Ada GPK dari Dinas Pendidikan berjumlah 4 orang. Untuk pembagian kerjanya untuk mengajar kelas 1-2, kelas 3, kelas 4-5, dan kelas 6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat GPK untuk pelaksanaan inklusif di sekolah. 	<p>Membangun tim pengajaran.</p>
<p>L: Berarti tidak ada yang tidak dari ULD ya pak?</p>		
<p>B: Ada mbak. Ada orang tua yang memfasilitasi GPK mandiri untuk anaknya, namun hanya satu orang tua aja.</p>		
<p>L: Dengan pembagian kerja per kelas seperti itu bagaimana pak</p>		

kolaborasi yang dilakukan GPK dan guru selama ini?		
<p>B: Iya mbak jadwalnya diatur per kelas, karena kan</p> <p>GPK melakukan pendampingan apabila ada guru yang kesulitan dalam mengajar, dan tiap GPK ada jadwal untuk masuk ke kelasnya walaupun jadwal fleksibel, maksudnya GPK tetap akan mendampingi jika benar-benar dibutuhkan walaupun bukan jadwalnya. Kerjasama lainnya yang dilakukan dgn guru kelas berupa membuat soal maupun materi. Terkadang juga ada GPK yang menggantikan tugas guru kelas jika guru kelas berhalangan mengajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● GPK dapat bekerja sama dengan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. ● GPK dan guru kelas membuat perencanaan di kelas bersama-sama. 	<p>Mendesain ulang organisasi sekolah.</p> <p>Mendesain ulang organisasi</p>
L: Lalu biar GPKnya makin berkualitas, apa yang bapak lakukan?		
B: .Ada pelatihan GPK mbak. Bimtek dari ULD dan juga <i>sharing-sharing</i> bagaimana penanganan siswa inklusif dengan pihak ULD.	<ul style="list-style-type: none"> ● GPK mengikuti pelatihan inklusif. 	Membangun kapasitas staf.
L: Itu kan untuk GPK ya pak. Bagaimana pelatihan yang ditujukan untuk guru-guru biasa?		
B: Jika pihak ULD mengadakan, saya mengirimkan beberapa orang guru secara random untuk mengikuti pelatihan. Diprioritaskan bagi yang belum pernah mengikuti.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mengirimkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan inklusif. 	Membangun kapasitas staf.
L: ULD kan selain menyediakan pelatihan-pelatiham, mereka juga menyediakan assesmen nih pak, nah untuk sekolah ini apakah ada assesmen?		
<p>B: Disini assesmen nya bisa ke ULD atau kita kerjasama dengan SLB Negeri 1 Bantul. Jadi, ada tim assesmen yang datang ke SD.</p> <p>Dari awal siswa yang masuk ke kelas 1, semua perlu melakukan assesmen. karena saat kelas 1 kita</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk pelaksanaan inklusif 	Kepala sekolah terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi

<p>sama sekali tidak tahu bagaimana anak itu sebenarnya, sehingga biar bisa memberi pelayanan yang tepat maka kita lakukan assesmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melakukan assesmen untuk mengetahui kebutuhan siswa 	<p>Melakukan audit ekuitas</p>
<p>L: Lalu setelah diassesmen dan orang tua tahu, apa yang selanjutnya dilakukan di sekolah ini?</p>		
<p>B: Kita memberikan pemahaman pada orang tua atau wali siswa. Guru kelas satu memberikan pelatihan tentang ABK kepada orang tua atau wali murid, namun pelatihan ini hanya singkat dan ada di kelas masing-masing, bukan pelatihan yang diadakan sekolah namun hanya inisiatif guru-guru kelas 1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru dapat memberikan pelatihan kepada orang tua sebagai agenda memaksimalkan pendidikan inklusif. 	<p>Kepemimpinan guru.</p>
<p>L: Selain itu, bagaimana pak komunikasi orang tua dengan sekolah?</p>		
<p>B: Ada pertemuan dengan orang tua termasuk orang tua anak berkebutuhan. Jika diperlukan, maka orang tua dapat bertemu secara personal dengan guru maupun saya. Nanti pertemuannya bisa dalam forum atau dipanggil dalam kelas dengan gurunya. Di sekolah pertemuan dengan orang tua minimal 1 kali dalam satu semester, namun jika pertemuan untuk guru dengan orang tua sangat tidak terbatas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Orang tua bisa leluasa untuk berkonsultasi dan bercerita dengan sekolah. ● Sekolah mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua. 	<p>Memastikan hak suara bagi semua.</p> <p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>
<p>L: Kurikulum untuk ABK disini apakah berbeda dengan siswa normal?</p>		
<p>B: Sama saja mbak kurikulumnya. KKM nya yang berbeda. KKM sekolah adalah 6,0. namun KKM per bidang studi berbeda-beda. Anak berkebutuhan tetap mengacu ke KKM reguler, namun kita tetap membimbing anak itu sehingga bisa mengikuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kurikulum sekolah merupakan kurikulum reguler yang dimodifikasi pada jenis 	<p>Melakukan audit ekuitas.</p>

	penilaian.	
L: Kemudian, fasilitas apa saja yang ada di sekolah ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus?		
<p>B: SD kami baru dibangun dari tahun lalu, namun kami akan membuat <i>Grey Rooms</i> untuk ABK, akan dibangun juga tangga dan kamar mandi khusus bagi ABK. Sebelum adanya pandemi, anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan beasiswa inklusif dari Dikpora sebesar 600.000 - 1.200.000 tergantung kebutuhan apa yang dimiliki siswa tersebut.</p> <p>Jika kondisi normal tanpa pandemi, ULD menyediakan dana <i>Lifeskills</i> yang biasanya kita ambil dan kita berikan pelatihan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, misalkan pelatihan menjahit maupun membuat pizza agar mereka memiliki kecakapan hidup yang baik. Bimbingan minat dan bakat juga kami lakukan. Kami melihat kemampuan siswanya apa kemudian kita bimbing. Ada siswa ABK mendapatkan juara bercerita pada tingkat nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ABK difasilitasi pelatihan <i>lifeskill</i> dari ULD melalui sekolah. 	Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.
L: Bagaimana bapak memandang pendidikan inklusif?		
B: Sebagai abdi negara dan ditetapkan di sekolah inklusif, maka	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memiliki 	Perspektif positif terhadap

<p>kami perlu memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan meningkatkan kemampuan ABK semaksimal mungkin. Kami harus bisa memberikan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Kami memberikan kesempatan bagi GPK untuk berlatih tentang cara-cara mengatasi anak berkebutuhan khusus.</p>	<p>komitmen untuk melakukan pelayanan yang maksimal.</p>	<p>pendidikan inklusif.</p>
<p>L: Terakhir, apa yang ditanamkan di sekolah ini sehingga orang-orang tahu jika sekolah ini inklusif?</p>		
<p>B: Ada misi yang kami usung adalah “Semua anak dapat sekolah”. Tulisan itu ada di spanduk di dekat gerbang sekolah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah tegas dengan misi semua anak dapat sekolah 	<p>Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif.</p>

Lampiran 6. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “DA”

Informan : W5.DA.TR1
 Hari, Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020
 Waktu : 10.00 - 11.00 (60 menit)
 Tempat : SD Negeri TR Yogyakarta

Wawancara	<i>Open Coding</i> (Properties atau Indikator)	Kategori
L: Penelitian saya mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusif. Pertama, ibu bisa ceritakan saat ibu menjadi kepala sekolah disini, apakah sekolah ini sudah menjadi sekolah inklusif?		
DA: Saya menjadi kepala sekolah disini saat sekolah ini sudah menjadi sekolah inklusif. Dulunya kan sekolah ini sekolah terpadu.		
L: Sekolah terpadu itu apa ya bu?		
DA: Sebelum adanya kebijakan inklusif oleh Pemkot sekolah ini merupakan sekolah terpadu yang pelaksanaannya hampir sama dengan sekolah inklusif yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah reguler.		
L: Pada saat itu, apa yang ibu rasakan ketika pertama kali diangkat kepala sekolah sudah memimpin di sekolah inklusif?		
DA: Perasaan bercampur baur. Yang pertama, saya ikut senang karena bisa melayani dan memberikan layanan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Walaupun sebenarnya sekolah di Kota Yogyakarta ini semua dinyatakan sebagai sekolah inklusif,		

<p>namun realitanya masih banyak sekolah-sekolah yang tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka merasa mengurus anak yang normal saja sulit apalagi mengurus anak berkebutuhan khusus. Tapi bagi saya, bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus merupakan kepuasan tersendiri karena kan disini bisa membantu anak-anak yang benar-benar membutuhkan, dan juga kita bisa membantu pemerintah dengan memberikan pelayanan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memiliki kebanggaan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. 	<p>Pandangan positif terhadap pendidikan inklusif.</p>
<p>L: Lalu tujuan itu ibu wujudkan dalam bentuk apa bu? Visi misi kah?</p>		
<p>DA: Visi misi sekolah mbak. Di depan dekat gerbang masuk itu ada di misi sekolah, “Memberikan pelayanan sesuai minat bakat siswa”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menuliskan visi yang inklusif 	<p>Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif.</p>
<p>L: Tentunya itu tujuan yang ingin ibu capai nggih. Namun, sebelumnya ibu usaha apa yang ibu lakukan secara nyata untuk memahami sekolah inklusif?</p>		
<p>DA: Kebetulan saya baru pertama kali ditempatkan di sekolah inklusif. Saya tidak tahu apa itu inklusif dan bagaimana penyelenggaraannya. Dari situ, saya belajar bersama bapak-ibu guru disini tentang sekolah inklusif itu apa, kemudian kami juga menghadiri beberapa undangan workshop atau diklat tentang inklusif, dan saya sendiri juga belajar dari internet sehingga sedikit-sedikit saya tahu pendidikan inklusif itu apa, bagaimana harus melaksanakan, apa alasannya kita harus melaksanakan pendidikan inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melakukan upaya untuk membentuk pemahaman inklusif bersama guru dan staf. 	<p>Membangun kapasitas staf.</p>
<p>L: Jadi dulu ada kegiatan untuk</p>		

belajar bersama tentang inklusif ya bu?		
DA: Sampai sekarang kami masih belajar. Kita mengadakan workshop tentang inklusif di sekolah ini dengan mendatangkan narasumber sebanyak dua kali dalam satu tahun. Workshop itu kadang-kadang dibiayai oleh Dinas Pendidikan, namun saat Dinas Pendidikan tidak ada bantuan ya kami menggunakan dengan anggaran sendiri. Workshop berfungsi memberikan bekal inklusif pada bapak-ibu guru, dan semua telah mengikuti workshop-workshop tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah konsisten memberikan pelatihan agar guru dan staf di sekolahnya memahami inklusif. 	Membangun kapasitas staf.
L: Biasanya yang mengadakan pelatihan-pelatihan inklusif itu dari pihak mana bu?		
DA: Pelatihan untuk yang berkaitan dengan pendidikan sekolah inklusif dilakukan oleh Dikpora DIY, dan saat ini melalui ULD. Jadi untuk diklat itu untuk sekolah inklusif, sudah diikuti beberapa kali.		
L: Berarti sekolah menjalin kerja sama dengan lembaga luar ya bu?		
DA: Kami bekerja sama dengan ULD, Dinas Pendidikan sebagai atasan dari pendidikan di SD Kota Jogja, Dikpora DIY, dan selain itu dengan psikolog dari UGM, UII, maupun SLB, dan juga dengan PLB UNY. Selain itu ada kelompok guru-guru penyelenggara inklusif di Kota Yogyakarta dan juga orang tua yang punya anak yang lebih bertanggungjawab dengan pendidikan anaknya.		
L: Jadi guru-guru disini juga masuk ke kelompok guru-guru penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta ya bu?		
DA: Iya mbak. Bahkan salah satu guru kami, menjadi guru penggerak inklusif di Kota Yogyakarta. Beliau	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menunjuk guru yang memiliki 	Kepemimpinan guru.

<p>juga menjadi koordinator pelaksanaan inklusif di sekolah ini, dan di tingkat kota selalu menjadi narasumber tentang topik inklusif. Guru kelas itu perlu mendapatkan bekal agar bisa menerima dan menangani dengan sepenuh hati.</p>	<p>kompetensi inklusif untuk memimpin pengembangan profesional guru-guru lainnya di tingkat sekolah hingga kota.</p>	
<p>L: Bagaimana dukungan orang tua disini ya bu dalam pelaksanaan pendidikan inklusif?</p>		
<p>DA: Ada beberapa macam orang tua ya, ada yang mendukung, ada yang merasa malu dan ditutup-tutupi, ada yang bisa menerima pelan-pelan. Bagi orang tua yang merasa malu jika anaknya berkebutuhan khusus, itu dia akan menutup-tutupi kekurangan-kekurangan anaknya. Jika ia kita beri laporan tentang anaknya, kadang menyanggah.</p>		
<p>L: Namun sebelumnya darimana ya bu orang tua tahu jika anaknya memiliki kekhususan? Dan cara ibu menangani orang tua yang tidak bisa menerima kekhususan anaknya itu seperti apa?</p>		
<p>DA: Mereka mengetahuinya kebanyakan setelah kita berikan hasil assesmen anaknya. Hasil assesmen kami berikan kepada orang tua. Responnya ada yang penuh legowo jika anaknya berkebutuhan, ada yang menangis karena kurang bisa menerima. Orang tua dari anaknya yang kita assesmen kita kumpulkan pada satu ruangan, kemudian kita sampaikan kepada mereka pemahaman bahwa putra putri yang dititipkan oleh Allah kepada beliau-beliau ini adalah amanah, apapun kondisinya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berkomunikasi dengan orang tua anak yang telah diassesmen dan saling bertukar informasi. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>

<p>harus diterima dengan sebaik-baiknya, dirawat, didik dan dilatih sesuai dengan kondisi anak.</p> <p>Kita beri pengertian kepada beliau-beliau bahwa “kondisi anak yang sekarang itu belum akan sama persis dengan kondisi yang akan datang, kalau putra bapak-ibu bisa tertangani dengan diberi kasih sayang dengan sepenuh hati itu akan mengalami perubahan, namun jika tidak tertangani dengan baik maka kebutuhan khususnya akan semakin parah”. Mereka kami harapkan bisa menerima dan lebih bisa menyadari apakah mereka telah memberikan yang terbaik atau belum. Kita meyakinkan orang tua bahwa anak mereka adalah tanggungan mereka, mereka yang bertanggung jawab dengan dididik dan dirawat.</p>		
<p>L: Jadi bisa dikatakan juga ya bu kalau orang tua mendukung anaknya diassesmen?</p>		
<p>DA: Waktu anaknya akan diassesmen, orang tua belum tentu tahu anaknya akan diassesmen, karena anak tidak kita bawa keluar namun kami mendatangkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah berkolaborasi 	<p>Terlibat dalam perencanaan</p>

<p>psikolog ke sekolah, kerjasama dengan SLB maupun Psikologi UGM. Sebenarnya ULD sendiri mengadakan fasilitas assesmen, gartis pula, namun saya kurang puas karena hasilnya kurang detail. Namun, ada juga orang tua yang pada saat mendaftarkan anaknya disini sudah membawa hasil assesmen sendiri.</p>	<p>dengan lembaga yang penting dalam pendidikan inklusif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah tidak mau mendapatkan hasil yang kurang memuaskan pada assesmen karena berkaitan untuk kebutuhan anak. 	<p>kolaboratif dan implementasi.</p> <p>Menetapkan visi inklusif yang tegas dan jelas.</p>
<p>L: Untuk prosedur assesmennya sendiri terhadap anak-anak itu seperti apa ya bu?</p>		
<p>DA: Guru kan selama mengajar pasti memperhatikan bagaimana anak-anak didiknya setiap hari. Apabila ada guru yang merasa bahwa anak didiknya tidak bisa dibimbing, maka anak tersebut dilakukan assesmen. Kita tidak mengassesmen semua anak saat kelas 1, karena mubadzir, biaya assesmen kan mahal dan kita setiap tahun hanya mengganggu 60 anak untuk diassesmen satu sekolah. Diadakan pula assesmen ulang bagi anak yang dahulunya pada saat kelas satu/dua sudah melakukan assesmen untuk mengetahui perkembangannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru melakukan <i>screening</i> terhadap anak berkebutuhan agar dapat memberikan pelayanan yang adil. ● Sekolah melakukan assesmen ulang untuk memastikan perubahan kebutuhan peserta didik. 	<p>Melakukan audit ekuitas.</p> <p>Melakukan audit ekuitas.</p>
<p>L: Berarti assesmen tidak harus dari kelas 1 ya bu kalau di sekolah ini?</p>		
<p>DA: Pelaksanaan assesmen bukan dimulai dari kelas 1, karena menurut saya kelas 1 kemampuan membaca dan memahami anak sangat bergantung pada orang tua apakah</p>		

<p>dibimbing dengan baik oleh orang tua atau tidak.</p> <p>Sebenarnya guru sudah memahami dan mengetahui anak didiknya yang mana yang berkebutuhan khusus, cuma guru tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa anak itu berkebutuhan khusus.</p>		
<p>L: Berarti untuk tetap terus menjalin komunikasi sama orang tua dan wali murid itu bagaimana bu?</p>		
<p>DA: Pertemuan orang tua biasanya saat pengajian, menerima raport, ketika anak-anak mau ujian, ketika anak-anak ada workshop, dan saat awal semester (pertama masuk).</p> <p>Paling rutin itu pertemuan untuk pengajian, karena setiap sebulan sekali kita mengadakan pengajian bagi orang tua/wali murid untuk kelas 1-2, 3-4, dan 5-6. P</p> <p>Namun, untuk pertemuan orang tua khusus dari ABK tidak ada. Sebenarnya, saya kemarin sudah menganggarkan pertemuan khusus untuk orang tua dari ABK ini namun ternyata kesibukan sekolah terlalu banyak sehingga pertemuan itu selalu mundur. Tetapi, jika dalam keadaan mendesak maka tetap kita panggil untuk <i>sharing-sharing</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ada pertemuan orang tua karena orang tua merupakan pihak penting dalam pendidikan inklusif. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>
<p>L: Jadi disini setelah melalui assesmen diketahui ada berapa anak berkebutuhan bu?</p>		
<p>DA: Ada 79 ABK di sekolah kita. Sebagian besar adalah <i>slow learner</i>, lalu <i>low vision</i> ada tiga anak, dan masalah kesulitan berjalan ada satu anak.</p>		
<p>L: Dengan jumlah anak berkebutuhan yang cukup banyak ya bu, bagaimana pembelajaran disini ya bu? apakah ada guru-guru khusus untuk melaksanakan pendidikan</p>		

inklusif?		
DA: Disini ada GPK. Jumlahnya ada tiga GPK. Tugasnya membantu guru jika guru ada kesulitan dan jika GPK dibutuhkan saat proses pembelajaran berlangsung, maka GPK dapat membantu guru biasa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah memfasilitasi kolaborasi GPK dengan guru umum 	Mendesain ulang organisasi
L: Lalu dengan adanya GPK, pembelajarannya jadi bagaimana bu apakah lebih maksimal?		
DA: Lebih maksimal mbak dengan adanya tiga GPK. Masing-masing GPK handle dua kelas, yaitu kelas 1-2; kelas 3-4; dan kelas 5-6. Tahun-tahun sebelumnya, GPK kita hanya satu, berasal dari Dinas Pendidikan, dan itupun hanya datang ke sekolah 1x/minggu jadi penanganan ABK saat itu di sekolah ini tidak maksimal. Kemudian, GPK tersebut ditarik oleh Dinas Pendidikan. Baru, pada Januari 2020 kita diberikan bantuan tiga orang GPK dari ULD karena banyaknya ABK kita	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah merasa dengan adanya GPK, pembelajaran jauh lebih maksimal. 	Membangun tim pengajaran.
L: Kemudian untuk guru-guru biasa seperti apa bu sikap mereka dalam melaksanakan pendidikan inklusif?		
DA: Guru kan kalau disini tidak sering dirolling ya mbak. Memang kadang-kadang bukannya dia tidak mau menerima pendidikan inklusif namun mereka terlalu banyak mengeluh ketika melaksanakan pembelajaran. Guru-guru setelah mengajar biasanya mengeluh tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau istirahat kita kumpul sambil makan-makan dan cerita-cerita. Jika ada guru yang ingin berbagai keluhan kesah dengan saya saat itu juga maka saya siap.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah secara terbuka menerima semua cerita dan keluhan guru. Guru leluasa untuk bercerita dengan kepala sekolah. 	Memastikan hak suara bagi semua.
L: Biasanya yang ibu lakukan setelah mendengarkan cerita dan keluhan kesah guru tentang		

<p>pelaksanaan pendidikan inklusif itu seperti apa?</p>		
<p>DA: Saya selalu menekankan bahwa ASN itu adalah pelayanan yang harus melayani sebaik-baiknya, apapun kondisi anak kita di sekolah adalah tanggung jawab kita, karena kita diberi amanah. Sedikit kita beri tahu, ngobrol, serta sosialisasi baik dari teman maupun kepala sekolah dan juga yang saya lakukan terhadap guru-guru yang sering mengeluh itu saya ikutan workshop yang paling awal, termasuk juga untuk guru-guru yang baru masuk. Untuk staf tidak kita ikutkan pelatihan karena tidak berhubungan langsung dengan siswa, namun ketika ada pelatihan yang dilakukan untuk internal sekolah maka mereka tetap kita ikutkan.</p> <p>Kita selalu dalam pertemuan ataupun di setiap kali kita ngumpul-ngumpul saya memberikan wejangan dengan pendekatan yang lebih personal “kita itu pelayanan, kita lah yang akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Panjenengen seharusnya bersyukur jika hanya mendapatkan amanah menjaga mereka di sekolah saja, bayangkan orang tua mereka yang perlu menjaga mereka di rumahnya.”. Dan itu sudah terbukti mbak mereka lebih kuat visi inklusifnya. Memang ada guru-guru yang frontal “anak kayak gitu dinaikan, anak kayak gitu gabisa apa-apa” karena mungkin guru tersebut belum bisa menerima. Bagi saya, jika ada guru yang berbicara dengan nada keras tentang anak kebutuhan khusus, maka saya akan mengingatkannya dengan nada keras juga. Saya bergantung bagaimana pribadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memiliki visi pelayanan yang terbaik. ● Kepala sekolah berkomitmen penuh memberikan pelatihan inklusif pada guru agar guru menyadari pentingnya pendidikan inklusif. ● Pemberian nasihat kepada guru. 	<p>Memiliki visi yang tegas dan jelas terkait inklusif.</p> <p>Melakukan pengembangan staf.</p> <p>Dukungan emosional dan apresiasi.</p>

<p>gurunya apakah bisa ditangani dengan halus atau perlu dimarahin. Guru yang melakukan protes hanya satu atau dua orang, karena rotasi guru disini tidak sering.</p>		
<p>L: Berapa kali bu pertemuan antar guru berlangsung?</p>		
<p>DA: Pertemuan guru secara resmi dilakukan 1 kali/bulan. Namun jika briefing untuk surat-surat dari Dinas Pendidikan, kami lebih sering dan tidak terbatas. Kami membahas masalah di sekolah termasuk masalah inklusif, serta hal apa saja yang akan dilakukan sekolah ke depannya. Serta, untuk penyelesaian masalah akan kita lakukan briefing dengan segera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertemuan guru dengan kepala sekolah dilakukan guna membahas rencana sekolah kedepannya. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>
<p>L: Kalau pertemuan-pertemuan seperti itu gimana bu berjalannya?</p>		
<p>DA: Ya kita saling musyawarah mbak. Kalau ambil kebijakan kita ambil bersama dengan bapak ibu guru semuanya karena kan yang akan melaksanakan kebijakan tersebut ya kita semua bersama-sama. Itu sudah menjadi kesepakatan. Kecuali, jika ada kebijakan dari pimpinan atas, kita tinggal menyampaikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah tidak membatasi siapa saja yang berhak berpendapat hingga mencapai kesepakatan bersama. 	<p>Memastikan hak suara bagi semua.</p>
<p>L: Dengan adanya GPK, kerja sama mereka seperti apa ya bu?</p>		
<p>DA: Biasanya anak-anak yang berkebutuhan ini kesulitan dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memfasilitasi guru 	<p>Membangun tim pengajaran</p>

pembelajaran maka GPK akan dimintai tolong oleh guru kelas mendampingi, lalu ABK ini belajar bersama teman-temannya dahulu, tapi jika sudah sulit untuk ditangani dalam kelas maka akan diajak belajar di <i>Grey Rooms</i> .	kelas dan GPK untuk bekerja sama dalam melakukan pengajaran.	
L: Jadi di sekolah ini sudah ada <i>Grey Rooms</i> ya bu?		
DA: Iya mbak. <i>Grey Rooms</i> di dalamnya sudah tersedia alat-alat untuk membantu pembelajaran bagi ABK. Ada juga beasiswa bagi ABK dari Pemerintah Pusat, namun tidak semua, hanya 13 anak dari 79 ABK yang mendapatkan beasiswa karena ini bergantung pada kebutuhan apa yang dimiliki anak tersebut. Jika anak memiliki kebutuhan di tahap <i>slow learner</i> maka anak itu tidak mendapatkan beasiswa, yang dapat adalah anak dengan kebutuhan yang lebih khusus dari itu.		
L: Dengan adanya fasilitas itu apakah ada juga anggaran khusus untuk pelaksanaan pendidikan inklusif disini?		
DA: Kita menganggarkan sendiri, kita ambilkan dari BOS maupun BOSDA. Pihak Dinas Pendidikan tidak memberikan anggaran khusus inklusif.		
L: Kemudian apakah ada perbedaan kurikulum antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus?		
DA: Kita modifikasi kurikulum mbak terutama untuk ABK dalam indikator pencapaian dan penilaian. KKMnya tetap sama, hanya bobotnya yang berbeda. Namun, ABK jika ditangani dengan baik maka akan baik pula. Kita pernah punya anak <i>slow learner</i> , namun ketika gurunya benar-benar telaten dan ada kecocokan antara guru dengan anak itu maka anak	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah menggunakan kurikulum modifikasi dan juga berbeda bobot penilaian. 	Melakukan audit ekuitas.

<i>slow learner</i> itu meraih nilai 90 matematika saat USBN.		
L: Lalu untuk membantu para ABK ini mencapai standar mereka pada saat ujian, apa yang dilakukan bu?		
DA: Misalkan, untuk anak <i>low vision</i> kita carikan bantuan kacamata dengan beasiswa, kemudian ketika ujian akan diberikan soal dengan font yang lebih besar dan juga tambahan waktu serta penjelasan yang lebih panjang bagi anak-anak <i>slow learner</i> . Untuk anak-anak Tuna Daksa, saat ujian tetap sama dengan siswa normal namun dia tidak mengikuti pembelajaran dan ujian yang banyak kegiatannya.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memahami anak-anak berkebutuhan khusus sehingga memberikan kebijakan yang tersendiri. 	Menggunakan data untuk pengambilan keputusan.
L: Kalau untuk non akademisnya anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti apa bu pengembangannya?		
DA: Untuk anak-anak berkebutuhan tidak bisa kita targetkan dengan pengetahuan keilmuan yang banyak ya, makanya kita punya program namanya vokasi. Kita ikutkan pelatihan vokasi yang diadakan oleh ULD, misalnya pembuatan roti, donat. Selain itu, sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti membuat batik dan telur asin. Itu semua dilakukan karena jika tetap dilanjutkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, harapannya juga sulit maka kita berikan vokasi agar bisa untuk hidup. Ekstrakurikuler tetap sama. Mungkin saja ada ABK anak yang kekurangan dalam keilmuan, namun memiliki kelebihan di bidang lain.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melihat kesulitan untuk mengembangkan anak berkebutuhan sehingga mereka diberikan pelatihan. 	Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.
L: Selama ini ibu menjabat sebagai kepala sekolah inklusif, adakah hal yang menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaannya?		
DA: Saya pernah merasa capek ya		

<p>mengurusi pendidikan inklusif, karena siswanya yang sulit untuk diarahkan dan orang tua yang sulit untuk diberi tahu. Namun, saya anggap enteng saja, jika bisa ditangani ya kita tangani kalau tidak ya kita lakukan pendekatan persuasif secara personal. Kita anggap sebagai wujud tanggung jawab.</p> <p>Saya rasa apabila kita mengelola anak berkebutuhan khusus dan berhasil, maka ada rasa puas ya. Berhasil tidak hanya pada pengetahuan, namun bisa saja di berbagi bidang lainnya. Kita anggap saja itu sebagai wujud syukur kami untuk saling membantu dan bahwa anak-anak seperti itu belum tentu akan seperti itu terus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah menganggap keberhasilan mengelola pendidikan inklusif sebagai tujuan. 	<p>Pandangan positif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif</p>
<p>L: Kunci pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah ini selama ibu sebagai kepala sekolah itu apa saja?</p>		
<p>DA: Kita tanamkan dulu rasa syukur pada diri kita bahwa kita ataupun keluarga kita semuanya normal dan baik-baik saja. Kita tanamkan bahwa ABK juga penerus bangsa yang pada waktu tertentu mereka akan menggantikan kita semua maka kita harus siap mendidiknya. Oleh karena itu, guru-guru disini kita tanamkan pula rasa menerima untuk mengajari anak berkebutuhan khusus, dengan cara menambah keilmuan dan keterampilan mereka melalui diikutkan workshop dan diklat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memperkuat visi inklusif karena ABK adalah penerus bangsa. ● Kepala sekolah bertujuan meningkatkan visi inklusif guru dengan pelatihan keterampilan. 	<p>Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif.</p> <p>Membangun kapasitas staf.</p>
<p>L: Terakhir, bagaimana pandangan yang ibu miliki tentang pelaksanaan pendidikan inklusif?</p>		
<p>DA: Pemkot Jogja sudah mencanangkan bahwa semua sekolah ada sekolah inklusif, namun kenyataannya masih ada anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak</p>		

<p>bisa diterima di sekolah-sekolah tertentu karena mereka tidak mau repot dan takut jika nilainya nanti menjadi jatuh atau dengan alasan lainnya. Upaya Pemkot sudah sangat bagus (sosialisasi ke sekolah-sekolah) tapi kan menerima inklusif tidak semudah mengembalikan tangan, karena memang pada kenyataannya “rekoso” mbak. Jadi pelaksanaan pendidikan inklusif masih perlu ditingkatkan lagi pelayanannya. Jangan sampai anak-anak berkebutuhan khusus itu terbuang dan tidak tertangani. Apapun kondisinya, mereka adalah masa depan bangsa dan pasti akan menggantikan kita.</p> <p>Beban memang juga beban karena memerlukan kesabaran yang lebih. Namun, penanganan pendidikan inklusif itu adalah tanggung jawab kita bersama karena anak-anak itu harus tetap mendapatkan pendidikan, agar mereka tetap bisa tertangani sesuai kebutuhan sehingga menjadi penerus bangsa yang berkualitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berkomitmen mendidik anak inklusif. Kepala sekolah teguh terhadap visi inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab. 	<p>Pandangan positif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif.</p>
--	---	---

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah “K”

Informan : W6.K.JT1
 Hari, Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
 Waktu : 11.00 - 11.30 (30 menit)
 Tempat : SD Negeri JT 1 Yogyakarta

Wawancara	<i>Open Coding</i> (Properties atau Indikator)	Kategori
L: Penelitian saya mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi pendidikan inklusif. Pertama, bagaimana pandangan atau pandangan bapak terhadap pendidikan inklusif?		
K: Pendidikan inklusif di Indonesia merupakan suatu yang harus diapresiasi. Penyelenggaraan yang bersifat layak untuk peserta penyandang disabilitas. Mengapa? Karena penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia terutama untuk memperoleh pendidikan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mengapresiasi adanya pendidikan inklusif. ● Kepala sekolah meyakini penyandang disabilitas memerlukan pemenuhan hak yang sama. 	Pandangan positif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif.
L: Lalu menurut bapak mengapa pendidikan inklusif diadakan?		
K: Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar, memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa peserta didik agar dapat lebih fokus dalam belajar.		
L: Bapak kan saat ini menjadi pemimpin dari sekolah inklusif ini pak. Apakah bapak mengikuti pengembangan kapasitas di ranah ini pak?		
K: Pelatihan ya. Pelatihan inklusif saya pernah mengikuti namun atas	● Kepala sekolah ikut dalam	Menetapkan visi yang tegas dan

nama SD yang saya ampu dahulu, namun untuk SD yang ini saya belum mengikuti pelatihan inklusi atas nama SD ini. Yang memfasilitasi pelatihan inklusi ini adalah ULD (Unit Layan Disabilitas).	pelatihan inklusif untuk mengembangkan kapasitasnya.	jelas terkait inklusif.
L: Nah kan sekolah yang bapak pimpin saat ini termasuk sekolah inklusif ya pak, lalu tujuan pendidikan inklusif yang dilakukan di sekolah ini apa pak?		
K: Sekolah ingin menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran terutama peserta didik yang berkebutuhan khusus.	● Kepala sekolah mengetahui kemana arah pendidikan inklusif ini di sekolah yang ia pimpin.	Menetapkan visi yang tegas dan jelas terkait inklusif.
L: Kemudian tujuan itu bapak wujudkannya dengan cara apa pak?		
K: Tentunya ada strategi yang diterapkan. Begitu pula, dalam pelaksanaan lembaga sekolah ini ada yang namanya visi misi ya mbak, jadinya kita melakukan kegiatan persekolahan demi mewujudkan visi misi sekolah kami.		
L: Memangnya, apa visi-misi sekolah ini ya pak? Lalu mengapa visi-misi yang bapak jadikan sebagai acuan pelaksanaan sekolah?		
K: (1) Menggali dan mengembangkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berwawasan ilmu pengetahuan tentunya juga teknologi; (2) Memahami kelebihan dan kekurangannya, bertanggung jawab, memiliki keterampilan sosial, mandiri, berkarakter, unggul dalam prestasi, berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Dari keduanya visi tersebut adalah bentuk kolaborasi dalam		

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mengarah pada kesetaraan dalam hak belajar dan untuk mendapatkan bekal dalam kehidupan.		
L: Lalu dalam pelaksanaan visi sekolah tersebut, siapa saja yang bapak libatkan?		
K: Warga sekolah mbak. Peran warga sekolah itu meliputi melaksanakan visi dan misi sesuai peran dan kemampuan yang dimiliki guna mewujudkan cita-cita instansi atau lembaga sekolah, selanjutnya mereka juga menciptakan satu pemahaman dalam satu wadah instansi atau lembaga negara dengan satu tujuan, dan menghasilkan output pendidikan yang sesuai dengan visi-misi sekolah dan sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mewujudkan visi misi sekolah. 	Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.
L: Semua warga sekolah kan banyak ya pak jumlahnya, lalu strategi yang dilakukan itu seperti apa ya pak?		
K: Dengan menyelenggarakan koordinasi kepada administrasi sekolah sekaligus pihak yang terkait dengan lembaga penyelenggara pendidikan inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berkoordinasi dengan <i>stake holder</i> pendidikan inklusi. 	Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.
L: Salah satu perwujudan yang konkrit dari strategi yang bapak lakukan itu apa ya pak?		
K: Membentuk Tim Khusus inklusif di sekolah. Tim ini terdiri dari guru dan karyawan sekolah secara umum, terutama melibatkan Guru Pendamping Khusus (GPK).	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah melaksanakan strategi dengan membentuk tim inklusi. 	Membangun tim pengajaran.
L: Jadi di sekolah ini sudah memiliki GPK ya pak? Sejak kapan?		
K: Ada 2 GPK sejak 2019. Honorinya dari ULD. Dahulu saya menunjuk guru-guru untuk menjadi GPK di sekolah,	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mengusahakan adanya GPK di sekolah untuk 	Membangun tim pengajaran.



<p>setelah ada anggaran maka sistem dari ULD berbeda. Kemudian ULD memiliki dana untuk mebiayai GPK-GPK yang diangkat oleh Dinas Pendidikan melalui ULD. Itu juga diberi kuota, tidak semua sd mendapatkan GPK. Sistemnya kemudian berubah GPK hanya mengampu ABK dan tidak boleh disambi.</p>	<p>menunjang pembelajaran inklusif.</p>	
<p>L: Lalu bagaimana pak selama ini tim inklusif melakukan tugasnya?</p>		
<p>K: Melalui pembelajaran yang nyata, dengan berkolaborasi kepada seluruh pihak warga sekolah. Kita tentunya akan masukan nilai-nilai inklusif seperti karakter religius, toleransi, peduli sosial, bersahabat, mandiri, menghargai prestasi dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tim inklusi berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan juga orang tua. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>
<p>L: Lalu bagaimana dalam konkretnya untuk pembelajaran pak?</p>		
<p>K: Tentunya GPK nanti bekerja sama dengan guru kelas. GPK melakukan pendampingan kepada anak-anak ABK di kelas dan juga bisa melakukan pendampingan secara sendiri di luar kelas. Sebagai sekolah inklusif, campur ya jadinya dalam ada anak normal dan ABK. GPK juga bisa didampingi saat ujian jika ABK mengalami kesulitan dalam pemahaman soal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah memfasilitasi adanya kerjasama GPK dan guru kelas 	<p>Mendesain ulang organisasi</p>
<p>L: Dengan adanya pendampingan oleh GPK di kelas, apakah ABK ini tetap bisa mengikuti KKM yang ada? Dan berapa ya pak KKM yang diterapkan di sekolah ini baik untuk anak normal dan ABK?</p>		
<p>K: Ya mereka masih kurang ya karena kemampuannya tidak setara dengan anak normal. Oleh karena itu mereka memiliki kurikulum</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah memiliki kurikulum yang berbeda 	<p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>

sendiri di sekolah ini. Baru kita mulai bentuk tahun ini dan sudah jadi. Ada dua kurikulum dalam setiap mata pelajaran, yaitu untuk anak normal dan ABK. Misalkan KKM anak normal 70, sedangkan KKM bagi ABK itu 40.		
L: Kemudian sekolah dalam membentuk kapasitas guru itu bagaimana pak? Baik itu GPK atau guru umum.		
K: Untuk guru disini sudah mengikuti pelatihan inklusif, namun tidak semua guru hanya beberapa guru yang ikut pelatihan. Pelatihan dilakukan oleh ULD. Kita juga pernah mengada <i>workshop</i> inklusif di sekolah, yang mana segala 'ubo rampe'nya difasilitasi ULD termasuk narasumbernya. GPK sendiri ada pelatihan juga, difasilitasi oleh ULD dan kita memberikan ruang bagi GPK untuk berkembang.	<ul style="list-style-type: none"> ● Semua guru di sekolah belum bisa tercover untuk mengikuti pelatihan. ● Kepala sekolah mengusahakan tetap ada pelatihan inklusif. ● Kepala sekolah memberi ruang GPK untuk ikut pelatihan di ULD 	<p>Hambatan dalam mengembangkan kapasitas staf.</p> <p>Mengembangkan kapasitas staf.</p> <p>Mengembangkan kapasitas staf.</p>
L: Dengan adanya pelatihan inklusif yang diikuti guru-guru tersebut, <i>impact</i> apa yang didapatkan oleh sekolah menurut bapak?		
K: Ya guru bisa melakukan screening untuk kepentingan assesmen peserta didik. Untuk mengetahui apakah anak ini ABK atau tidak. Jadi dia melihat bagaimana perkembangan anak tersebut. Guru kemudian mendata siapa saja yang perlu diikuti assesmen. Data tersebut diberikan ke GPK untuk diusulkan ke ULD agar dilakukan assesmen. Bisa ULD datang ke sekolah atau kita kesana.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah mengusahakan assesmen untuk mengetahui kebutuhan anak. ● Sekolah menggunakan data untuk mengambil tindak lanjut 	<p>Melakukan audit ekuitas</p> <p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>
L: Secara keseluruhan prosedur untuk melakukan assesmen di sekolah ini bagaimana pak? Dan siapa yang mengadakan assesmen?		


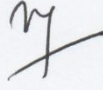
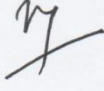
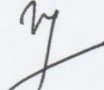
<p>K: Assesmen dilakukan dengan dasar hasil <i>screening</i> guru di kelas. Saat pelaksanaan assesmen tersebut, orang tua juga kita ikutkan untuk menyimak kegiatan assesmen yang dilakukan, jadi ada undangan untuk orangtua yang anaknya melalui tahap assesmen, supaya semua benar dan jelas bahwa sekolah tidak mengada-ada. Lalu setelah mendapatkan hasil assesmen maka digunakan sebagai bahan pembinaan bagi GPK. ULD yang kami ajak kerjasama karena gratis, kalau dengan lembaga independen yang lain kami tidak punya dana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah melibatkan orang tua dalam melihat pelaksanaan assesmen bagi anaknya. ● Sekolah memperhatikan data yang ada sebagai bahan pembinaan lanjut. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p> <p>Menggunakan data dalam pengambilan keputusan.</p>
<p>L: Kemudian tujuan mengundang orang tua dari anak-anak yang dilakukan assesmen ini untuk apa ya pak?</p>		
<p>K: Agar mereka lebih memahami. Orang tua masih kadang tidak bisa menerima secara terbuka bahwa anaknya ABK, namun dengan adanya hasil assesmen maka orang tua lebih legowo.</p>		
<p>L: Untuk komunikasi selanjutnya dengan orang tua siswa seperti apa pak?</p>		
<p>K: Ada pertemuan-pertemuan dengan orang tua. Biasanya saat mau rapotan, semester awal, mau ujian atau semester akhir. Guru bisa mengundang orang tua apabila ada permasalahan anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah menjalin kolaborasi yang bagus dengan orang tua. ● Guru diberi kekuasaan menjadi pemimpin di kelasnya. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi. Kepemimpinan guru.</p>
<p>L: Untuk guru-guru disini bagaimana bapak menjalin komunikasi dengan mereka?</p>		
<p>K: Pertemuan internal dengan semua guru dan kepala sekolah. Guru-guru bisa sharing masalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah berkolaborasi dengan guru. 	<p>Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi.</p>

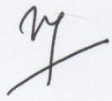
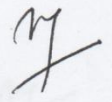
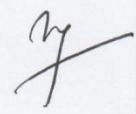
dan solusi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru dapat leluasa berbicara dengan kepala sekolah. 	Memastikan hak suara bagi semua.
L: Setelah adanya komunikasi yang dijalin, lalu apa yang diberikan kepala sekolah kepada peserta didik khususnya yang berkebutuhan khusus?		
K: Ada pelatihan vokasi untuk anak-anak, misalkan seperti membuat roti dan membuat. ULD yang memfasilitasi, kita mengajukan anaknya siapa saja. Disini tidak ada <i>grey rooms</i> dan sarana prasarana lainnya. Jika seandainya ada ABK fisik itu belum bisa mendukung.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sekolah melihat data ABK di sekolah untuk diberikan pelatihan vokasi. 	Menggunakan data untuk pengambilan keputusan.
L: Terakhir ini pak, menurut bapak kunci keberhasilan sekolah inklusif itu apa ya?		
K: Kepala sekolah harus tahu bahwa anak itu termasuk anak ABK, kedua ada kerjasama dengan orang tua, ketiga selalu memantau kegiatan-kegiatan inklusif dan rajin mendampingi guru serta staf dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala sekolah mengetahui apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan sekolah inklusif. ● Kepala sekolah mendampingi guru dan staf dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, karena mereka tidak sendiri. 	Menetapkan visi yang jelas dan tegas terkait inklusif. Dukungan emosional dan apresiasi.

Lampiran 8. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan *Member Check* 1

Penyajian Data Hasil Penelitian	
Kemampuan Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pendidikan Inklusif	
Informan	: W1. P. TP
Hari, Tanggal	: Selasa, 14 Juli 2020
Waktu	: 13.30-14.30 (60 menit)
Tempat	: SD Negeri TP Yogyakarta
Hasil	Member Check
<p>1. Perspektif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif</p> <p>Informan berpendapat bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Informan memahami bahwa anak yang berkebutuhan khusus juga memiliki potensi sehingga informan menerapkan pada sekolah yang ia pimpin untuk mengembangkan potensi anak sesuai minat bakat. Informan memiliki latar belakang PG SLB selama satu semester sehingga memahami gejala anak-anak berkebutuhan.</p>	
<p>2. Visi yang tegas dan jelas terkait inklusif</p> <p>Informan mencetuskan 3P dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu Pelayanan, Penampilan, dan Prestasi. Informan memasukan inklusif pada visi misi sekolah yaitu memberikan pelayanan sesuai minat bakat siswa. Informan juga menunjukkan visi-misi tersebut ke warga sekolah dan masyarakat luas, seperti adanya papan visi misi di sekolah. Kapasitas yang dimiliki informan juga dikembangkan lagi melalui</p>	

<p>pelatihan-pelatihan inklusif agar lebih maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.</p>	
<p>3. Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi</p> <p>Kolaborasi eksternal yang dilakukan informan adalah dengan Dinas Pendidikan, ULD, Universitas (Jurusan Psikologi), serta SLB. Kolaborasi internal adalah dengan seluruh warga sekolah dan orang tua/wali siswa. Informan melakukan perencanaan inklusif seperti membahas assesmen dan permasalahan ABK yang melalui pertemuan-pertemuan bersama.</p> <p>Informan juga menentukan siapa saja yang bekerja sama dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah dibahas bersama.</p>	<p>ny</p>
<p>4. Melakukan audit ekuitas</p> <p>Assesmen untuk mengumpulkan data lokal sekolah. Informan berinisiatif melakukan assesmen pada anak-anak yang dikeluhkan guru-guru sulit untuk diberikan pengajaran, dan juga latar belakang pendidikan informan yaitu SPGLB selama satu semester. Assesmen dilakukan informan bekerja sama dengan SLB pada awalnya, kemudian selanjutnya menjalin kerjasama dengan ULD. Terdapat juga penyesuaian kurikulum untuk membawa pelayanan ke arah yang adil yaitu kurikulum modifikasi dimana KKM 70 untuk siswa normal berbeda bobotnya untuk siswa berkebutuhan khusus.</p>	<p>ny</p>
<p>5. Mendesain ulang organisasi sekolah</p> <p>Guru diberikan kesempatan untuk saling bekerja sama dan</p>	

<p>berkolaborasi dalam pembelajaran. GPK dan guru dapat menyusun pembelajaran bersama tanpa perlu melewati proses birokrasi yang kaku. GPK dapat masuk ke kelas jika dibutuhkan oleh guru umum untuk membantu, sehingga jadwal GPK yang telah ada bersifat fleksibel.</p>	
<p>6. Membangun tim pengajaran</p> <p>Informan mengusahakan adanya fasilitas GPK di sekolahnya. Informan meminta GPK ke pihak ULD ketika mengetahui bahwa sekolahnya inklusif sehingga sekolah yang ia pimpin bisa mendapatkan GPK. Sebelumnya, informan menunjuk seorang guru di sekolahnya untuk menjadi GPK sementara.</p>	
<p>7. Kepemimpinan guru</p> <p>Informan memberikan kesempatan pada guru untuk mengambil langkah penanganan masalah yang terjadi dalam kelasnya.</p>	
<p>8. Membangun kapasitas staf</p> <p>Informan memfasilitasi guru-guru untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan. SD ini guru-gurunya telah mendapatkan pelatihan (bimtek) tentang mengelola siswa ABK sebanyak dua kali yang kedua pelatihannya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yang harapannya guru-guru bisa melakukan assesmen mandiri.</p>	
<p>9. Dukungan emosional dan apresiasi</p> <p>Waktu rapat, informan selalu memotivasi kepada guru-guru</p>	

<p>agar mampu memberikan pelayanan inklusi yang maksimal dengan kondisi inklusi yang seperti ini. Informan mendukung guru secara emosional dengan memberikan petuah kepada guru untuk tidak perlu berpikiran kencang tentang hasil belajar siswa jika tidak maksimal, tugas guru itu mengajarkan materi semaksimal mungkin.</p>	
<p>10. Menggunakan data dalam pengambilan keputusan</p> <p>Informan memanfaatkan realita di sekolah yang ia pimpin sebagai bahan pertimbangan tindakan yang akan diambil. Informan melihat di sekolah ini untuk mengembangkan akademiknya cukup sulit, maka dikembangkan non akademiknya. Selain itu, informan melihat data kondisi ekonomi orang tua siswa sehingga sekolah yang mengangkat GPK mandiri. Informan juga melihat data sebagai sumber informasi dimana nanti ABK dapat ikut ke pelatihan vokasi dari ULD.</p>	
<p>11. Memastikan hak suara bagi semua</p> <p>Informan mendengarkan keluh kesah guru karena kesulitan dalam memberikan pengajaran pada ABK. Informan memperhatikan dan mendengar apa kemauan guru, termasuk saat guru bercerita mengenai minat bakat siswa di sekolah yang cukup beragam, informan kemudian memfasilitasinya dengan tambahan ekstra kulikuler.</p>	

Lampiran 9. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan *Member Check* 2

Penyajian Data Hasil Penelitian

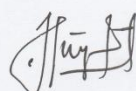
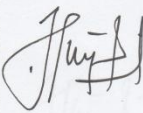
Kemampuan Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pendidikan Inklusif

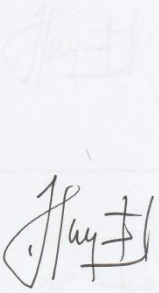
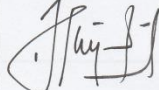
Informan : W2. PS. BC

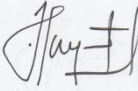
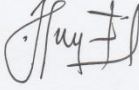
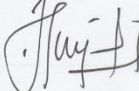
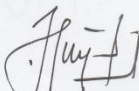
Hari, Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020

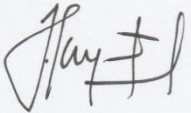
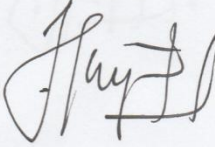
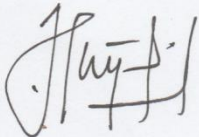
Waktu : 11.30 - 12.20

Tempat : SD Negeri BC Yogyakarta

Hasil	Member Check
<p>1. Perspektif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif</p> <p>Informan berpendapat bahwa pendidikan inklusif sudah menjadi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang nyaman bagi siswa. Anak yang berkebutuhan khusus perlu perlakuan yang khusus dan butuh perhatian khusus.</p>	
<p>2. Visi yang tegas dan jelas terkait inklusif</p> <p>Informan membawa visi yang tegas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah yang ia pimpin. Informan mewujudkannya dalam visi misi sekolah "Terwujudnya Siswa Berakhlaq Mulia, Berprestasi, Mandiri, Berbudaya, dan Peduli Lingkungan". Menurut informan, visi misi kami sesuai dengan nilai-nilai inklusi. Mandiri ini adalah salah satu upaya sekolah untuk membuat ABK menjadi anak yang mandiri.</p> <p>Informan juga melakukan pengembangan kapasitas agar lebih kuat dalam memegang visi inklusif dan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Informan melakukan pengembangan diri</p>	

<p>melalui pelatihan-pelatihan inklusif yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan maupun lembaga indepen.</p>	
<p>3. Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi</p> <p>Kolaborasi eksternal dilakukan dengan orang tua, UNY, UST, dan dengan Psikologi UII berkaitan dengan assesmen. Informan melakukan komunikasi dengan orang tua agar pelaksanaan pendidikan inklusif tidak berhenti di sekolah saja. Komunikasi dengan orang tua berkaitan untuk memperlancar implementasi pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.</p> <p>Kolaborasi internal dilakukan dengan para guru. Pada setiap hari kamis ada forum koordinasi yang dilaksanakan di sekolah, membahas permasalahan di sekolah termasuk masalah pendidikan inklusif dan koordinasi kegiatan sekolah yang akan dilakukan.</p>	
<p>4. Melakukan audit ekuitas</p> <p>Assesmen untuk mengumpulkan data lokal sekolah. Setiap tahun ada kegiatan assesmen, tapi anggaran terbatas. Assesmen dilakukan yang utama di ULD, lalu dari lembaga psikologi di waktu-waktu tertentu.</p> <p>Informan pada walanya tidak mengetahui bahwa KKM siswa normal dan ABK harus sama, namun setelah mengikuti pelatihan infoman melakukan penyesuaian kurikulum untuk membawa pelayanan ke arah yang adil yaitu kurikulum modifikasi dimana KKM 70 untuk siswa normal berbeda bobotnya untuk siswa</p>	

berkebutuhan khusus.	
<p>5. Mendesain ulang organisasi sekolah</p> <p>Guru diberikan kesempatan untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembelajaran. GPK dan guru dapat menyusun pembelajaran bersama dan melakukan pendampingan terhadap ABK yang mengalami kesulitan. GPK dapat masuk ke kelas jika dibutuhkan oleh guru umum untuk membantu</p>	
<p>6. Membangun tim pengajaran</p> <p>Informan mengisahkan adanya fasilitas GPK di sekolahnya. Informan telah diberi GPK oleh pihak Dinas Pendidikan yaitu 2 GPK pada tahun 2020, sebelumnya informan menunjuk salah satu guru sebagai koordinator pelaksanaan pendidikan inklusif.</p>	
<p>7. Kepemimpinan guru</p> <p>Informan memberikan kesempatan pada guru untuk mengambil langkah penanganan masalah yang terjadi dalam kelasnya, seperti jika terdapat bullying maka guru kelas yang turun menangani masalah tersebut terlebih dahulu dan memberikan pengarahan kepada anak-anak agar tidak melakukan bully.</p>	
<p>8. Membangun kapasitas staf</p> <p>Informan memfasilitasi guru-guru untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan. Contohnya, pelatihan inklusi bagi guru diberikan oleh UNY selama 10 hari dengan materi SPPI dan juga materi dasar pendidikan inklusi seperti screening anak jika</p>	

<p>anak menunjukkan perilaku yang berbeda, dan materi permainan di kelas yang cocok bagi pembelajaran ABK.</p>	
<p>9. Dukungan emosional dan apresiasi</p> <p>Informan menerapkan strategi komunikasi yang kuat antara guru dengan kepala sekolah, Informan memotivasi sehingga setiap ada masalah pasti teratasi. Informan berpendapat bahwa komunikasi yang berjalan lumayan baik.</p>	
<p>10. Menggunakan data dalam pengambilan keputusan</p> <p>Informan memanfaatkan realita di sekolah yang ia pimpin sebagai bahan pertimbangan tindakan yang akan diambil. Informan melihat ABK yang memiliki kesulitan saat berjalan sehingga diupayakan oleh sekolah pengadaan pegangan di tangga. Selain itu, data perkembangan siswa digunakan untuk menentukan apakah anak tersebut masih bisa diajarkan di sekolah, contoh anak pada kelas 4 belum bisa baca tulis maka akan dibantu sekolah untuk pindah ke SLB agar mendapatkan pelayanan yang tepat.</p>	
<p>11. Memastikan hak suara bagi semua</p> <p>Informan mendengarkan keluhan guru karena kesulitan dalam memberikan pengajaran pada ABK. Informan memfasilitasi guru-guru berbicara pada forum koordinasi untuk berbagi masalah untuk mendapatkan usulan dari guru-guru lain. Para guru juga tidak segan untuk bercerita kepada informan mengalami kesulitan melaksanakan pendidikan inklusif, yang mana nanti akan membahas jalannya bersama.</p>	

Lampiran 10. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan *Member Check 3*

Penyajian Data Hasil Penelitian



Kemampuan Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pendidikan Inklusif




Informan : W3.SL.MG



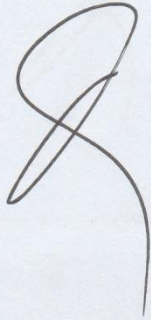
Hari, Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020




Waktu : 09.00 - 10.10 (70 menit)

Tempat : SD Negeri MG Yogyakarta



Hasil	Member Check
<p>1. Perspektif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif</p> <p>Informan mendefinisikan pendidikan inklusif memang harus dilaksanakan, namun ada syarat yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan informan menganut “serahkan sesuatu pada ahlinya”. Informan masih tetap mendukung dan apresiasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.</p> <p>Informan berpendapat bahwa perlu menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah inklusi karena merupakan kebijakan Dinas Pendidikan untuk melayani masyarakat maka dilaksanakan sebagai wujud kewajiban kami terhadap kebijakan.</p>	
<p>2. Visi yang tegas dan jelas terkait inklusif</p> <p>Informan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak dicantumkan dalam visi-misi sekolah secara tersirat melainkan melalui prakteknya.</p> <p>Informan juga berkomitmen untuk mengembangkan kapasitasnya terkait pendidikan inklusif melalui pelatihan-pelatihan inklusif.</p>	



<p>3. Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi</p> <p>Informan berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dalam perencanaan informan bekerja dengan orang tua/wali agar anaknya yang sulit untuk diajarkan ini mengikuti assesmen agar sekolah dan orang tua mengetahui kebutuhan yang ada pada diri anak tersebut. Informan rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua/wali murid dan juga dengan guru-guru dalam membahas masalah di sekolah termasuk masalah inklusif. Informan juga memiliki hubungan baik dengan beberapa SLB untuk membantu pelaksanaan pendidikan inklusif.</p>	
<p>4. Melakukan audit ekuitas</p> <p>Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di kelas akan dipanggil orang tuanya ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah dan meminta orang tua untuk melakukan assesmen.</p> <p>Orang tua bebas memilih tempat assesmen bagi anaknya. Assesmen dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit dan ULD karena sekolah menerima dan memandang bahwa hasil assesmen sama baiknya. Informan tidak mematenkan bahwa assesmen harus dilakukan di ULD karena ULD memiliki keterbatasan pelayanan.</p>	
<p>5. Mendesain ulang organisasi sekolah</p> <p>Tidak ada GPK di sekolah sehingga kolaborasi untuk membahas masalah pengajaran ABK dilakukan antara kepala sekolah dengan guru-guru umum.</p>	




<p>6. Membangun tim pengajaran</p> <p>Informan tidak memiliki GPK di sekolahnya, hal tersebut dikarenakan informan menyadari bahwa ULD sangat sibuk dan untuk meminta GPK juga belum tentu diberikan oleh ULD. Menyiasati hal itu, informan menuguskan guru sebagai konselor di masing-masing kelasnya.</p>	
<p>7. Kepemimpinan guru</p> <p>Informan memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan analisis dan pendataan pada kelasnya karena guru yang paling memahami bagaimana kelasnya, yaitu guru diminta untuk mendata siswa-siswa yang bisa mengikuti pembelajaran luring, daring, dan keduanya. Untuk guru kelas 1, informan meminta guru melakukan pemetaan seperti siapa saja yang sudah bisa mengenal huruf, siapa yang sudah mengenal angka, dan siapa yang belum bisa sama sekali. Informan juga memberi kesempatan kepada guru kelas untuk lebih sering bertemu dengan orang tua/wali kelas.</p>	
<p>8. Membangun kapasitas staf</p> <p>Hanya beberapa guru yang mengikuti pelatihan inklusif, termasuk informan mengikuti pelatihan pada level kebijakan. Namun karena banyak sekolah di kota yang harus ikut pelatihan, maka jumlah guru yang ikut pelatihan per sekolah dibatasi.</p>	




<p>9. Dukungan emosional dan apresiasi</p> <p>Informan mendengarkan keluhan kesah guru saat menyampaikan kesulitan mereka mengajar ABK. Informan sering tanya bagaimana perkembangan anak berkebutuhan kepada guru-guru. Informan siap menjadi tem[at konsultasi guru dalam menangani permasalahan ABK.</p>	
<p>10. Menggunakan data dalam pengambilan keputusan</p> <p>Informan menggunakan data pemetaan dari guru untuk menentukan treatment yang perlu diberikan dan untuk penentuan assesmen dari data screening awal gesture, kemampuan, dan fisik. Informan juga menggunakan data perkembangan ABK untuk melihat apakah sekolah masih bisa melayani anak tersebut atau tidak. Data perkembangan siswa juga digunakan informan untuk menentukan tambahan pembelajaran bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar.</p>	
<p>11. Memastikan hak suara bagi semua</p> <p>Informan memastikan bahwa sekolah sangat terbuka kepada orangtua yang akan berkonsultasi kapanpun dan dimanapun terkait pelayanan yang diberikan sekolah. Informan membuka link WA selama 24 jam dimana orang tua hingga guru dapat berbcerita, kritik, dan saran terhadap informan maupun pelayanan sekolah.</p>	


Lampiran 11. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan *Member Check* 4

Hasil	Member Check
<p>1. Perspektif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif</p> <p>Informan berpendapat bahwa pendidikan inklusif merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan sekolah. Informan dan sekolah yang dipimpinnya harus bisa memberikan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan sesuai dengan kebutuhannya.</p>	
<p>2. Visi yang tegas dan jelas terkait inklusif</p> <p>Informan memegang teguh bahwa sekolah harus bisa memberikan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan memberikan kesempatan pada GPK untuk berkembang, Terkait visi-misi sekolah sendiri, tidak menggambarkan secara tersirat bahwa sekolah ini inklusif. Namun, sekolah ini memiliki fasilitas yang lengkap dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.</p>	
<p>3. Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi</p> <p>Kolaborasi internal dilakukan oleh informan dengan guru dan warga sekolah lainnya. Terdapat pertemuan anata kepala sekolah dengan guru 1x/bulan. Pertemuan membahas apa yang</p>	

<p>akan dilakukan sekolah dan penanganan masalah yang ada di sekolah, termasuk masalah inklusif.</p> <p>Kolaborasi eksternal dilakukan dengan orang tua, ULD, dan SLB. Terdapat pertemuan antara sekolah dengan orang tua minimal 1x/semester untuk membahas masalah pengajaran terhadap anak, namun jika pertemuan untuk guru dengan orang tua sangat tidak terbatas. Kerjasama dengan ULD dan SLB berkaitan dengan assesmen peserta didik untuk mengetahui kebutuhan yang ada pada diri peserta didik.</p>	
<p>4. Melakukan audit ekuitas</p> <p>Assesmen untuk mengumpulkan data lokal sekolah. Informan melakukan assesmen pada setiap anak yang masuk ke kelas satu, karena saat kelas satu ekolah sama sekali tidak tahu bagaimana anak itu sebenarnya, sehingga biar bisa memberi pelayanan yang tepat maka kita lakukan assesmen. Assesmen dilakukan informan bekerja sama dengan SLB dan ULD. Terdapat juga penyesuaian KKM bagi ABK, yati dengan KKM sama namun bobot berbeda. Anak berkebutuhan tetap mengacu ke KKM reguler, namun dibimbing anak itu sehingga bisa mengikuti.</p>	
<p>5. Mendesain ulang organisasi sekolah</p>	

<p>Guru diberikan kesempatan untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembelajaran. GPK melakukan pendampingan apabila ada guru yang kesulitan dalam mengajar, dan tiap GPK ada jadwal untuk masuk ke kelasnya namun jadwal bersifat fleksibel. GPK dan guru berkolaborasi berupa membuat soal maupun materi. Terkadang juga ada GPK yang menggantikan tugas guru kelas jika guru kelas berhalangan mengajar.</p>	
<p>6. Membangun tim pengajaran</p> <p>Informan mengisahkan adanya fasilitas GPK di sekolahnya. Di sekolah yang dipimpin informan, terdapat GPK dari Dinas Pendidikan berjumlah empat orang. Untuk pembagian kerjanya untuk mengajar kelas 1-2, kelas 3, kelas 4-5, dan kelas 6.</p>	
<p>7. Kepemimpinan guru</p> <p>Informan memberikan kesempatan pada guru untuk mengambil langkah kepemimpinan di kelasnya, seperti guru kelas satu memberikan pelatihan tentang ABK kepada orang tua atau wali murid dan guru lainnya bisa berinisiatif melakukan hal lainnya.</p>	

<p>8. Membangun kapasitas staf</p> <p>Informan memfasilitasi guru-guru untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan. Jika pihak ULD mengadakan, informan mengirimkan beberapa orang guru secara random untuk mengikuti pelatihan. Diprioritaskan bagi yang belum pernah mengikuti. Ada pelatihan GPK melalui bimtek dari ULD dan juga sharing-sharing bagaimana penanganan siswa inklusif dengan pihak ULD.</p>	
<p>9. Dukungan emosional dan apresiasi</p> <p>Informan memberikan motivasi dan arahan pada guru-guru. Informan mengarahkan bagaimana cara membina anak-anak berkebutuhan khusus dan meminta GPK untuk sharing dengan guru kelas sebagai upaya pemecahan masalah penanganan ABK.</p>	
<p>10. Menggunakan data dalam pengambilan keputusan</p> <p>Informan memanfaatkan realita di sekolah yang ia pimpin sebagai bahan pertimbangan tindakan yang akan diambil. Informan melihat data anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah, lalu informan berinisiatif mengikutkan pelatihan <i>lifeskills</i> bagi ABK yang diadakan oleh ULD. Hal itu bertujuan untuk menambah keterampilan ABK. Informan melihat potensi minat bakat siswa ABK kemudian dibimbing semaksimal</p>	

<p> mungkin, sehingga terdapat siswa ABK mendapatkan juara bercerita pada tingkat nasional.</p>	
<p>11. Memastikan hak suara bagi semua</p> <p>Guru tidak segan untuk bercerita masalah yang sedang dihadapi saat pelaksanaan pendidikan inklusif kepada kepala sekolah. Di pertemuan. guru-guru bebas bercerita tentang keluhan dan apa yang ia alami di kelas, termasuk keluhan tentang anak-anak berkebutuhan khusus yang cukup sulit untuk diajarkan. Orang tua juga tidak segan untuk bercerita masalah yang dihadapi, orang tua dapat bertemu secara personal dengan guru maupun informan.</p>	

Lampiran 12. Penyajian Data Hasil Penelitian *Member Check* 5

Penyajian Data Hasil Penelitian



Kemampuan Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pendidikan Inklusif

Informan : W5.DA.TR1

Hari, Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020

Waktu : 10.00 - 11.00 (60 menit)

Tempat : SD Negeri TR Yogyakarta

Hasil	Member Check
<p>1. Perspektif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif</p> <p>Informan berpendapat bahwa penanganan pendidikan inklusif itu adalah tanggung jawab bersama karena anak-anak itu harus tetap mendapatkan pendidikan, agar mereka tetap bisa tertangani sesuai kebutuhan sehingga menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Informan sebelumnya tidak memahami bagaimana pendidikan inklusif berjalan, namun informan memenuhi undangan <i>workshop</i> inklusif dan belajar bersama staff agar mampu menyediakan pelayanan inklusif yang maksimal.</p>	
<p>2. Visi yang tegas dan jelas terkait inklusif</p> <p>Informan selalu menekankan bahwa pelaksana pendidikan itu adalah pelayanan yang harus melayani sebaik-baiknya, apapun kondisi anak kita di sekolah adalah tanggung jawab kita, karena kita diberi amanah. Untuk menunjukkan bahwa sekolah yang ia pimpin adalah sekolah inklusif, maka melalui misi sekolah "Memberikan pelayanan sesuai minat dan bakat siswa" ditekankan, dan misi tersebut terpampang informasinya di</p>	

lingkungan sekolah.

3. Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi




Kolaborasi internal dilakukan oleh informan dengan guru dan warga sekolah lainnya. Pertemuan guru secara resmi dilakukan 1 kali/bulan. Namun jika briefing untuk surat-surat dari Dinas Pendidikan, kami lebih sering dan tidak terbatas. Serta, untuk penyelesaian masalah akan dilakukan *briefing* dengan segera. Membahas apa yang akan dilakukan sekolah dan penanganan masalah termasuk masalah inklusif.




Kolaborasi eksternal dilakukan dengan orang tua, ULD, Universitas dan SLB. Orang tua biasanya berkomunikasi dengan sekolah sehingga sekolah bisa *sharing-sharing* masalah anak bersama orang tua. Informan mendatangkan psikolog ke sekolah, kerjasama dengan SLB maupun Psikologi UGM dan juga ULD untuk melakukan assesmen terhadap peserta didik.



4. Melakukan audit ekuitas

Assesmen untuk mengumpulkan data lokal sekolah. Informan meminta guru melakukan screening terhadap siswanya sehingga diketahui siapa yang kiranya perlu dilakukan assesmen. Sekolah tidak mengassesmen semua anak saat kelas 1, karena setiap tahun hanya menganggarkan 60 anak untuk diassesmen satu sekolah. Diadakan pula assesmen ulang bagi anak yang dahulunya pada saat kelas satu/dua sudah melakukan assesmen untuk mengetahui perkembangannya. Terdapat juga penyesuaian KKM bagi ABK, yaitu dengan KKM sama namun bobot







berbeda.	
<p>5. Mendesain ulang organisasi sekolah</p> <p>Guru diberikan kesempatan untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembelajaran. GPK tugasnya membantu guru jika guru ada kesulitan dan jika GPK dibutuhkan saat proses pembelajaran berlangsung, maka GPK dapat membantu guru biasa. Mereka berkolaborasi dengan leluasa. Biasanya anak-anak yang berkebutuhan ini kesulitan dalam pembelajaran maka GPK akan dimintai tolong oleh guru kelas mendampingi, lalu ABK ini belajar bersama teman-temannya dahulu, tapi jika sudah sulit untuk ditangani dalam kelas maka akan diajak belajar di Grey Rooms.</p>	
<p>6. Membangun tim pengajaran</p> <p>Informan mengemukakan adanya fasilitas GPK di sekolahnya. Di sekolah yang dipimpin informan, pada Januari 2020 diberikan bantuan tiga orang GPK dari ULD karena banyaknya ABK. Pelayanan menjadi lebih maksimal mbak dengan adanya tiga GPK. Masing-masing GPK menghandle dua kelas, yaitu kelas 1-2; kelas 3-4; dan kelas 5-6.</p>	
<p>7. Kepemimpinan guru</p> <p>Informan memberikan kesempatan pada guru untuk mengambil langkah kepemimpinan apabila guru tersebut berprestasi, seperti salah satu guru menjadi guru penggerak inklusif di Kota Yogyakarta dan juga menjadi koordinator pelaksanaan inklusif di sekolah ini, dan di tingkat kota selalu</p>	





<p>menjadi narasumber tentang topik inklusif.</p>	
<p>8. Membangun kapasitas staf</p> <p>Guru-guru disini ditanamkan rasa menerima untuk mengajari anak berkebutuhan khusus, dengan cara menambah keilmuan dan keterampilan mereka melalui diikutkan workshop dan diklat. Informan belajar bersama bapak-ibu guru disini tentang sekolah inklusif itu apa, kemudian kami juga menghadiri beberapa undangan workshop atau diklat tentang inklusif, dan informan sendiri juga belajar dari internet agar paham bagaimana pelayanan pendidikan inklusif seharusnya.</p>	
<p>9. Dukungan emosional dan apresiasi</p> <p>Informan dalam pertemuan ataupun di setiap kali kita ngumpul-ngumpul informan memberikan wejangan dengan pendekatan yang lebih personal dalam membahas mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah serta masalah-masalah lainnya.</p>	
<p>10. Menggunakan data dalam pengambilan keputusan</p> <p>Informan memanfaatkan realita di sekolah yang ia pimpin sebagai bahan pertimbangan tindakan yang akan diambil. untuk anak low vision dicarikan bantuan kacamata dengan beasiswa, kemudian ketika ujian akan diberikan soal dengan font yang lebih besar dan juga tambahan waktu serta penjelasan yang lebih panjang bagi anak-anak slow learner. Untuk anak-anak Tuna Daksa, saat ujian tetap sama dengan siswa normal namun dia tidak mengikuti pembelajaran dan ujian yang banyak kegiatan</p>	



<p>fisiknya.</p> <p>Lalu informan berinisiatif mengikuti pelatihan <i>lifeskills</i> bagi ABK yang diadakan oleh ULD. Itu semua dilakukan karena jika tetap dilanjutkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, harapannya juga sulit maka diberikan vokasi agar bisa untuk hidup.</p>	
<p>11. Memastikan hak suara bagi semua</p> <p>Guru tidak segan untuk bercerita masalah yang sedang dihadapi saat pelaksanaan pendidikan inklusif kepada kepala sekolah. Guru-guru setelah mengajar biasanya mengeluh tentang anak-anak berkebutuhan khusus pada jam istirahat atau saat berkumpul bersama.</p> <p>Informan mendengarkan pendapat guru. Kalau ambil kebijakan maka akan ambil bersama dengan bapak ibu guru semuanya karena kan yang akan melaksanakan kebijakan tersebut ya kita semua bersama-sama sehingga perlu musyawarah.</p>	

Lampiran 13. Penyajian Data Hasil Penelitian dengan *Member Check* 6

Hasil	Member Check
<p>1. Perspektif kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif</p> <p>Informan berpendapat bahwa dalam melaksanakan pendidikan inklusif, sekolah ingin menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keaneka ragaman , tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran terutama peserta didik yang berkebutuhan khusus.</p>	
<p>2. Visi yang tegas dan jelas terkait inklusif</p> <p>Informan memaparkan bahwa kunci pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu kepala sekolah harus tahu bahwa anak itu termasuk anak ABK, kedua ada kerjasama dengan orang tua, ketiga selalu memantau kegiatan-kegiatan inklusif dan rajin mendampingi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolahnya berjalan. Misi sekolah yang dipimpin informan ini salah satunya berbunyi “memfasilitas pendidikan anak sesuai minat dan bakat”, yang mana visi misi tersebut menunjukkan bahwa sekolah ini melayani pendidikan inklusif.</p>	

<p>3. Terlibat dalam perencanaan kolaboratif dan implementasi</p> <p>Informan berkolaborasi dengan warga sekolah. Peran warga sekolah itu meliputi melaksanakan visi dan misi sesuai peran dan kemampuan yang dimiliki guna mewujudkan cita-cita instansi atau lembaga sekolah. Informan bekerja sama dalam merencanakan rencana sekolah serta dalam menangani permasalahan sekolah termasuk permasalahan inklusif dengan menyelenggarakan koordinasi kepada administrasi sekolah sekaligus pihak yang terkait dengan lembaga penyelenggara pendidikan inklusif.</p>	
<p>4. Melakukan audit ekuitas</p> <p>Assesmen untuk mengumpulkan data lokal sekolah. Dilakukan screening untuk kepentingan assesmen peserta didik. Pelaksanaan assesmen dengan ULD yang memfasilitasi assesmen gratis, dan pada pelaksanaan assesmen siswa harus didampingi oleh orang tua agar timbul kesepahaman antara sekolah dengan orang tua.</p> <p>Kurikulum yang diterapkan di sekolah informan adalah kurikulum yang berbeda antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Terdapat kurikulum dan KKM untuk anak normal dengan KKM dan juga ada kurikulum khusus dan KKM</p>	

<p>husus bagi anak-anak berkebutuhan khusus.</p>	
<p>5. Mendesain ulang organisasi sekolah</p> <p>Guru diberikan kesempatan untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Informan memberi ruang untuk GPK bekerja sama dengan guru kelas. GPK melakukan pendampingan kepada anak-anak ABK di kelas dan juga bisa melakukan pendampingan secara sendiri di luar kelas.</p>	
<p>6. Membangun tim pengajaran</p> <p>Informan mengisahkan adanya fasilitas GPK di sekolahnya. Terdapat dua GPK sejak 2019. GPK tersebut merupakan usaha informan mengisahkan GPK di ULD, karena tidak semua sekolah mendapatkan GPK.</p>	
<p>7. Kepemimpinan guru</p> <p>Informan memberikan kesempatan pada guru untuk untuk menyelesaikan masalah di kelasnya seperti guru bisa mengundang orang tua apabila ada permasalahan anak.</p>	
<p>8. Membangun kapasitas staf</p> <p>Guru-guru disini sudah mengikuti pelatihan inklusif, namun belum semua karena ada kuota pelatihan guru per sekolah. Pelatihan dilakukan oleh ULD. Kita juga pernah mengada</p>	

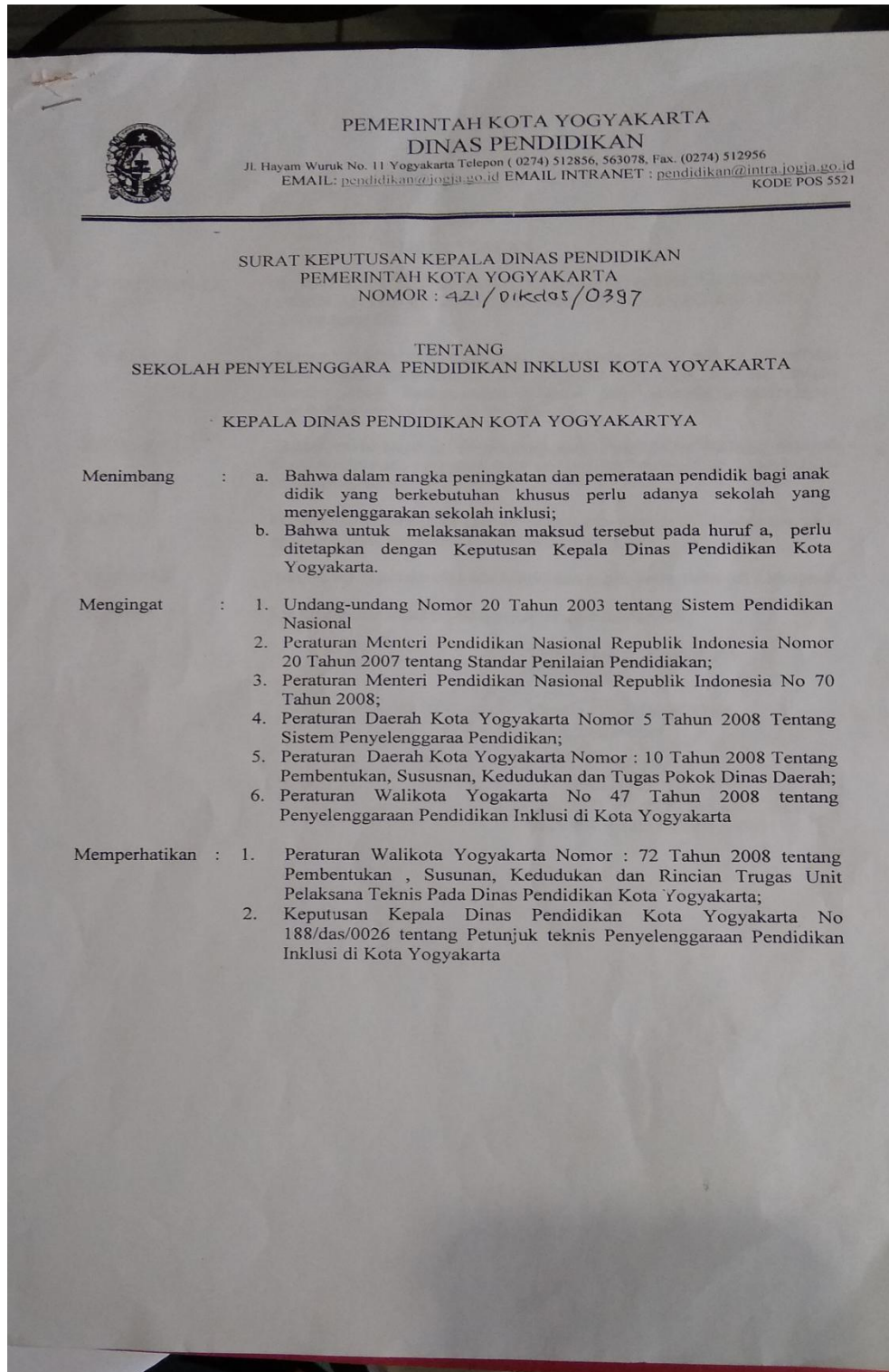
<p>workshop inklusif di sekolah, yang mana segala perlengkapannya difasilitasi ULD termasuk narasumbernya. GPK sendiri ada pelatihan juga, difasilitasi oleh ULD dan informan memberikan ruang bagi GPK untuk berkembang.</p>	
<p>9. Dukungan emosional dan apresiasi</p> <p>Informan sebagai pemimpin di sekolah selalu memantau pelaksanaan pendidikan inklusif sehingga dapat memberikan intruksi atau wejangan kepada guru saat mengalami kesulitan. Hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan inklusif menurut informan.</p>	
<p>10. Menggunakan data dalam pengambilan keputusan</p> <p>Informan menugaskan untuk mendapatkan data kemampuan siswa dalam kelasnya, kemudian data tersebut bermanfaat untuk mengambil keputusan mengenai siswa siapa saja yang akan diberikan assesmen untuk mengetahui apa kebutuhannya.</p> <p>Lalu informan mengikutkan pelatihan vokasi bagi ABK yang diadakan oleh ULD, misalkan seperti membuat roti dan membuat batik. ULD yang memfasilitasi, sekolah mengajukan anaknya siapa saja.</p>	

11. Memastikan hak suara bagi semua

Guru tidak segan untuk bercerita masalah yang sedang dihadapi saat pelaksanaan pendidikan inklusif kepada kepala sekolah. Guru-guru bisa *sharing* masalah dan mencoba mencari solusi bersama-sama.



Lampiran 14. SK Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta



Lampiran 15. Kurikulum untuk anak-anak normal

Kriteria Ketuntasan Minimal Siswa Inklusi Kurikulum
Tahun Pelajaran 2020/2021:

No	Mata Pelajaran	Kelas						JML	RATA - RATA
		1	2	3	4	5	6		
Kelompok A (Umum)									
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	40	20	40	30	20	20	170	28,3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	40	20	40	30	20	20	170	28,3
3	Bahasa Indonesia	40	20	40	30	20	20	170	28,3
4	Matematika	40	20	40	30	20	20	170	28,3
5	Ilmu Pengetahuan Alam				30	20	20	70	23,3
6	Ilmu Pengetahuan Sosial				30	20	20	70	23,3
7	Seni Budaya dan Prakarya	70	60	70	60	60	60	360	63,3
8	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	70	60	70	60	60	60	360	63,3
Kelompok B (Umum)									
1	Bahasa Jawa	30	20	40	20	20	20	120	25
2	Membatik	60	20	40	20	20	20	120	30
Ekstrakurikuler									
	1. Pramuka	-	-	B	B	B	B	-	-
	2. TPA Iqro/Baca Tulis Al Qur'an	B	B	B	B	B	B	-	-
	3. Bahasa Inggris	B	B	B	B	B	B	-	-
	4. Macapat				B	B	B		
	5. Pencak Silat/Karate	B	B	B	B	B	B		
	6. Komputer	B	B	B	B	B			

Dengan berdasarkan pada daftar tabel di atas, maka Kriteria Ketuntasan Minimal tingkat Sekolah (Satuan Pendidikan) di SD Negeri Jetis 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 ditetapkan dari nilai Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) yang terendah yaitu 70 untuk

Kurikulum SD Negeri Jetis 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 44

Lampiran 16. Kurikulum untuk ABK

Kriteria Ketuntasan Minimal Kurikulum
Tahun Pelajaran 2020/2021:

No	Mata Pelajaran	Kelas						JML	RATA - RATA
		1	2	3	4	5	6		
Kelompok A (Umum)									
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	75	75	75	75	75	75	450	75
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	75	75	75	75	75	75	450	75
3	Bahasa Indonesia	75	75	75	75	75	75	450	75
4	Matematika	70	70	70	70	70	70	420	70
5	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	75	75	75	225	75
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	70	70	70	210	70
7	Seni Budaya dan Prakarya	75	75	75	75	75	75	450	75
8	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	75	75	75	75	75	75	450	75
Kelompok B (Umum)									
1	Bahasa Jawa	70	70	70	70	70	70	420	70
2	Membatik	75	75	75	75	75	75	450	75
Ekstrakurikuler									
	1. Pramuka	-	-	B	B	B	B	-	-
	2. TPA Iqro/Baca Tulis Al Qur'an	B	B	B	B	B	B	-	-
	3. Bahasa Inggris	B	B	B	B	B	B	-	-
	4. Macapat				B	B			
	5. Pencak Silat/Karate	B	B	B	B	B			
	6. Komputer	B	B	B	B	B			

Lampiran 17. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 540611, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas_fip@uny.ac.id

Nomor : 764/UN34.11/PP/Pen/2020

2 Juli 2020

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : **Izin Penelitian**

Yth . W1.P.TP W4. B. BR2
 W2. PS. BC W5.DA.TR1
 W3. SL. MG W6.K.JT1

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Larasati Azizah
NIM : 16101241045
Program Studi : Administrasi Pendidikan - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 7 Juli - 7 Agustus 2020

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :

1. Sub. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



Dr. Sujarwo, M.Pd.
NIP 19691030 200312 1 001